

LAPORAN KINERJA 2018



BALAI BESAR PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG





TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA 2018 BALAI BESAR POM DI BANDUNG

PENANGGUNG JAWAB

Kepala Balai Besar POM di Bandung

KETUA

Dra. Rera Rachmawati, Apt.

WAKIL KETUA

Leni Maryati, S.Si., Apt., M.Si.

SEKRETARIS

Fadli Reizandi, A.Md.

ANGGOTA

- Dwie Astrini, S.Si., Apt., M.Si.
- Dra. Sri Prihatin, Apt., MM.
- Fany Nurmalasari, S.Si., Apt.
- Tanti Kuspriyanto, S.Si., M.Si.
- Dwi Kurniasari, S.Si., Apt.
- Iltizam Nasrullah, S.Si., Apt., M.Si.
- Heri Kuswanto, S.Farm., Apt.
- Dra. Shafa Thalib, Apt., MT.
- Fitria Augustin Trirahmadani, S.Si., Apt.
- Imas Ridawati, S.Si., M.Si.
- Dra. Kinteki Rarastri, Apt.
- Siti Aminah, S.Si., Apt., M.Si.
- Puji Astuti, S.Si., Apt.
- Alia Kadarsih Abubakar, S.Si., Apt.
- Tri Winarsih Nuryani, S.Si., Apt.
- Afinna Nurfitri Annandari, S.Farm., Apt.
- Elly Yanti, ST.
- Yadi Cahyadi, S.Kom.



KATA PENGANTAR KEPALA BALAI BESAR POM DI BANDUNG



“
Balai Besar
Pengawas Obat
dan Makanan di
Bandung selaku
Unit Pelaksana
Teknis di
Lingkungan
Badan POM RI
senantiasa selalu
berupaya
menjamin mutu
Obat dan
Makanan yang
beredar di
masyarakat
”

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa karena penyusunan Laporan Kinerja Balai Besar POM Balai Besar Tahun 2018 dapat diselesaikan. Tahun 2018, merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015 – 2019. Pada tahun 2018, terjadi beberapa isu strategis baik internal maupun eksternal yang mempengaruhi pencapaian kinerja Balai Besar POM di Bandung. Namun, hal-hal tersebut tidak menjadi hambatan tetapi dijadikan sebagai tantangan untuk terus meningkatkan kinerjanya dalam rangka “menjamin mutu Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat”.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan tahun 2018 maka disusunlah Laporan Kinerja (LAPKIN) ini. LAPKIN disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.01.21.04.15.2163 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Addendum Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Balai Besar/Balai POM.

LAPKIN Balai Besar POM di Bandung disusun pada akhir periode anggaran pelaksanaan program/kegiatan yang memiliki dua fungsi utama yaitu (1) merupakan sarana bagi Balai Besar POM di Bandung untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder* yang berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran, serta (2) sarana dan upaya untuk



memperbaiki atau meningkatkan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*), baik dalam bentuk regulasi maupun alokasi sumber daya yang dimiliki oleh Balai Besar POM di Bandung.

Berbagai kendala dan hambatan dialami dalam mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2018, namun dengan meningkatkan efektifitas dan efisiensi sumber daya yang ada serta kerjasama yang baik maka target kinerja dapat dicapai.

Akhir kata, kami berharap Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja Balai Besar POM di Bandung kepada pemberi mandat dan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja Badan POM serta Balai Besar POM di Bandung di masa yang akan datang.

Bandung, 13 Februari 2019
Kepala Balai Besar POM di Bandung

I Gusti Ngurah Bagus Kusuma Dewa, S.Si., Apt.,MPPM



DAFTAR ISI



SAMBUTAN.....	i
DAFTAR ISI	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
HIGHLIGHT	viii

Bab 1	1.1 GAMBARAN UMUM ORGANISASI	1
Pendahuluan	1.2 STRUKTUR ORGANISASI	3
	1.3 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI	7
	1.4 ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS	8
	1.5 ISU STRATEGIS	11

Bab 2	2.1 RENCANA STRATEGIS	14
Perencanaan	2.1.1 SASARAN KEGIATAN	17
Kinerja	2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018	24
	2.3 KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR	26

Bab 3	3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	28
Akuntabilitas	3.1.1 SASARAN STRATEGIS KE-1: MENGUATNYA	
Kinerja	SISTEM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	30
	3.1.2 SASARAN STRATEGIS KE-2: MENINGKATNYA	
	KEMANDIRIAN PELAKU USAHA, KEMITRAAN	
	DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN DAN	
	PARTISIPASI MASYARAKAT	56
	3.1.3 SASARAN STRATEGIS KE-3: MENINGKATNYA	
	KUALITAS KAPASITAS KELEMBAGAAN BALAI	
	BESAR POM DI BANDUNG	59



3.1.4 SASARAN STRATEGIS KE-4: MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN BERBASIS RISIKO DI PROVINSI JAWA BATAT	66	
3.1.5 SASARAN STRATEGIS KE-5: MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BBPOM BANDUNG	92	
3.1.6 SASARAN STRATEGIS KE-6: TERWUJUDNYA REFORMASI BIROKRASI BBPOM DI BANDUNG SESUAI DENGAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI BPOM 2015-2019	100	
3.2 REALISASI ANGGARAN	106	
3.3 ANALISIS EFISIENSI KEGIATAN	109	
<hr/>		
Bab 4	4.1 KESIMPULAN	112
Penutup	4.2 SARAN	113
LAMPIRAN		114
DAFTAR TABEL		133
DAFTAR GAMBAR		136



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LAPKIN) Balai Besar POM di Bandung Tahun 2018 sebagai wujud Akuntabilitas Kinerja Balai Besar POM di Bandung kepada publik/pemberi mandat yang sekaligus memberikan gambaran mengenai keberhasilan Balai Besar POM di Bandung dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangannya. Selain sebagai media pertanggungjawaban kinerja kepada publik/pemberi mandat, Laporan Kinerja ini merupakan instrumen untuk mengevaluasi pencapaian Kinerja Balai Besar POM di Bandung yang dapat dijadikan umpan balik bagi perbaikan kinerja di tahun-tahun yang akan datang.

Dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, tujuan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2015-2019 ditetapkan. Tujuan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2015-2019, yaitu 1) Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat di wilayah Provinsi Jawa Barat; 2). Meningkatkan daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi.

Tujuan yang telah ditetapkan menjadi arahan bagi Balai Besar POM di Bandung dalam merumuskan sasaran strategis, kebijakan, program dan kegiatan. Sesuai dengan Rencana Kinerja Balai Besar POM di Bandung Tahun 2018 dan Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Bandung Tahun 2018 telah ditetapkan sebanyak 6 (enam) Sasaran Kegiatan yang harus dicapai oleh Balai Besar POM di Bandung.

SASARAN KEGIATAN

- TERWUJUDNYA OBAT DAN MAKANAN YANG AMAN DAN BERMUTU DI PROVINSI JAWA BARAT
- MENINGKATNYA KEPATUHAN DAN KEPUASAN PELAKU USAHA SERTA KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP KEAMANAN, MANFAAT DAN MUTU OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG
- MENINGKATNYA PENGETAHUAN MASYARAKAT TERHADAP OBAT DAN MAKANAN AMAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG
- MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN BERBASIS RISIKO DI PROVINSI JAWA BARAT
- MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG
- TERWUJUDNYA REFORMASI BIROKRASI BBPOM DI BANDUNG SESUAI DENGAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI BPOM 2015-2019



Pengukuran kinerja yang tercantum dalam dokumen LAPKIN Balai Besar POM di Bandung tahun 2018 berdasarkan Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Balai Besar POM di Bandung yang telah ditetapkan pada tanggal 12 September 2018. Perjanjian kinerja tersebut merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahun 2018 yang berlandaskan pada Revisi Renstra Balai Besar POM di Bandung Tahun 2015-2019. Pada sasaran kegiatan kesatu yaitu **“Terwujudnya Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu di Provinsi Jawa Barat”** diperoleh capaian indikator kinerja dengan kategori memuaskan sebanyak 3 (tiga) indikator, yaitu persentase obat yang memenuhi syarat di provinsi Jawa Barat 105%, persentase kosmetika yang memenuhi syarat di provinsi Jawa Barat 108%, dan persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat di provinsi Jawa Barat 104%. 1 (satu) indikator kinerja dengan kategori baik yaitu persentase obat tradisional yang memenuhi syarat di provinsi Jawa Barat 100%, dan 2 (dua) indikator kinerja dengan kategori cukup, yaitu indeks pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung 95% dan persentase makanan yang memenuhi syarat di provinsi Jawa Barat 93%. Dalam mencapai sasaran kegiatan tersebut didukung oleh program/ kegiatan dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut: a) Sampel makanan yang diuji dengan parameter kritis sebesar 100% dan b) Sampel obat yang diuji dengan parameter kritis sebesar 100%.

Sasaran kegiatan kedua yaitu **“Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung”** dengan indikator kegiatan Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang obat dan makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung, capaian indikator kinerja kategori tidak dapat disimpulkan 140%. Dalam mencapai sasaran kegiatan diatas didukung oleh program/ kegiatan dengan indikator kinerja kegiatan Penyelenggaraan sosialisasi/workshop/diseminasi/seminar/publikasi/penyuluhan sebesar 100%

Sasaran kegiatan ketiga yaitu **“Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Bandung”** diperoleh capaian indikator kinerja dengan kategori memuaskan, yaitu Indeks pengetahuan masyarakat 118%. Pencapaian sasaran kegiatan diatas didukung oleh program/ kegiatan dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut: a) Layanan informasi pengawasan obat dan makanan 126%, b) Komunitas yang diberdayakan 100% dan c) Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) 100%.

Sasaran kegiatan keempat yaitu **“Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di provinsi Jawa Barat”** diperoleh capaian indikator kinerja dengan kategori memuaskan sebanyak 3 (tiga) indikator, yaitu persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Bandung 120%, persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Bandung 117% dan persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di provinsi Jawa Barat 116%. 1 (satu) indikator kinerja dengan kategori baik yaitu persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di provinsi Jawa Barat 100%, dan 1 (satu) indikator kinerja dengan kategori cukup, yaitu rasio tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Bandung 91%. Dalam mencapai sasaran kegiatan tersebut didukung oleh program/ kegiatan dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut: a) Dukungan teknis dan manajemen laboratorium 100%, b) penyediaan alat laboratorium 100%, c) cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan 106.48%, pengawasan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian 115.40%, pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, suplemen kesehatan dan makanan 112.36% dan audit sarana dalam rangka sertifikasi, labelisasi halal, surveilan 108.90%.



Sasaran kegiatan kelima yaitu **“Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana obat dan makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung”** diperoleh capaian indikator kinerja dengan kategori tidak dapat disimpulkan, yaitu Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM di Bandung 139%. Pencapaian sasaran kegiatan diatas didukung oleh program/ kegiatan dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut: a) penyidikan obat dan makanan 100% dan b) dukungan teknis investigasi awal dan penyidikan di bidang obat dan makanan 100%.

Sasaran kegiatan keenam yaitu **“Terwujudnya reformasi birokrasi BBPOM di Bandung sesuai dengan road map reformasi birokrasi BPOM 2015-2019”** diperoleh capaian indikator kinerja dengan kategori cukup, yaitu nilai AKIP BBPOM di Bandung 97%. Pencapaian sasaran kegiatan diatas didukung oleh program/ kegiatan dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut: a) Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi 111.11%, b) Pengadaan sarana dan prasarana penunjang kerja 100%, c) Layanan perkantoran 100% dan d) Penguatan kelembagaan pengawasan obat dan makanan di kabupaten/kota 100%.

Pada tahun 2018 Balai Besar POM di Bandung memperoleh anggaran sebesar Rp 62.106.653.000,00. Anggaran tersebut terdiri atas Belanja Pegawai Rp 19.373.505.000,00; Belanja Barang Rp 37.299.676.000,00; serta Belanja Modal Rp 5.433.472.000,00; Realisasi anggaran Balai Besar POM di Bandung tahun 2018 adalah sebesar Rp 56.048.142.083,00 (90,24%), yang terdiri atas Belanja Pegawai Rp 18.810.010.873,00 (97,09%); Belanja Barang Rp 32.354.349.912,00 (86,74%) dan Belanja Modal Rp 4.883.781.298,00 (89.88%).

Seluruh kegiatan BBPOM di Bandung yang dilakukan selama tahun 2018 dilaksanakan dengan efisien, secara keseluruhan Kinerja Balai Besar POM di Bandung pada tahun 2018 telah memenuhi harapan. Meskipun demikian pada tahun 2018 dan seterusnya akan terus ditingkatkan sesuai dengan pedoman Revisi Renstra Balai Besar POM tahun 2015-2019.



HIGHLIGHT

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Jawa Barat, Balai Besar POM di Bandung secara terencana, berkesinambungan dan penuh komitmen dengan seluruh jajarannya melaksanakan tugas dan fungsi tersebut dengan kesungguhan demi tercapainya visi dan misi organisasi. Selama tahun 2018, beberapa prestasi yang telah diraih dan beberapa hasil pengawasan obat dan makanan yang telah dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Bandung, seperti berikut :

1. Piagam Penghargaan, Role Model Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kategori "Baik", dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
2. Juara 2, Lomba Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi(KIE) Serentak di Area Car Free Day tanggal 12 Agustus 2018, dengan tema "Semarak Car Free Day, Dari BPOM Untuk Indonesia"
3. Penyelenggaraan terbanyak kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi dengan Tokoh Masyarakat, yang dilaksanakan di seluruh wilayah provinsi Jawa Barat
4. Peringkat Ke 1 Tingkat Provinsi sebagai Instansi Pemerintah dengan jumlah Perkara terbanyak yang ditangani tahun 2018. Penghargaan ini diberikan oleh POLDA Provinsi Jawa Barat.
5. Penanganan pro justitia perkara pelanggaran di bidang obat dan makanan terbanyak di lingkungan Badan POM RI.
6. Sebagai upaya penguatan kelembagaan, di provinsi Jawa Barat telah terbentuk LOKA POM Kabupaten Bogor dan LOKA POM Kota Tasikmalaya.
7. *Roadshow Job Fair*, sebagai ajang penjurangan kandidat CPNS terbaik bagi Badan POM RI, diselenggarakan di 2 Perguruan Tinggi Negeri di Kota Bandung, yaitu di Institut Teknologi Bandung dan Universitas Padjadjaran.
8. Pemusnahan Produk Hasil Pengawasan dan Penindakan di Bidang Obat dan Makanan, dengan nilai taksiran harga sebesar Rp. 8.106.134.588, (delapan milyar seratus enam juta seratus tiga puluh empat ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah).

Selain itu, dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis diperlukan inovasi untuk meningkatkan kinerja, beberapa inovasi yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Bandung sebagai berikut :



SIMEUT, SISTEM MANAJEMEN SURAT TERPADU

Salah satu inovasi yang dilakukan dalam dalam rangka mengoptimalkan pelayanan terhadap *stake holder* . SiMeUt adalah suatu standar dan system aplikasi yang akan digunakan sebagai tools utama dalam pelaksanaan

manajemen tata kelola surat secara terpadu di Balai Besar POM di Bandung. *Tools* ini dirancang mampu menjadi standar yang digunakan dalam mengelola surat masuk dan keluar, sehingga dapat diperoleh pelayanan kepada *stake holder* yang lebih cepat, dengan sistem yang sederhana dan mudah digunakan. SIMEUT juga akan menjadi cikal bakal suatu system dengan cakupan yang lebih luas menjadi system yang terintegrasi dalam pengelolaan administrasi di Balai Besar POM di Bandung yaitu *e-office*.



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Pengawasan Obat dan Makanan memiliki fungsi strategis nasional dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan untuk mendukung daya saing nasional. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan maka diperlukan adanya penguatan kelembagaan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM), adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Badan POM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut, dan untuk meningkatkan pengawasan Obat dan Makanan di seluruh wilayah Indonesia maka Badan POM berdasarkan surat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/411/M.KT.01/2018 tanggal 8 Juni 2018 tentang Penataan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan, menerbitkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 tahun 2018 tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan dan Nomor 12 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat Makanan.

Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. UPT terdiri atas: a. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai Besar POM; b. Balai Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai POM; dan c. Loka Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Loka POM.



Balai Besar POM di Bandung yang beralamat di Jl. Pasteur No. 25 Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung merupakan salah satu UPT BPOM tipe A yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Balai Besar POM di Bandung berkoordinasi dengan Loka POM dalam hal pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat Makanan, didirikan 2 Loka POM di Provinsi Jawa Barat yaitu Loka POM di Kabupaten Bogor yang beralamat di Jl. Karanggen Raya No. 1001, Citeureup, Puspasari, Kabupaten Bogor dengan wilayah kerja Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok dan Loka POM di Kota Tasikmalaya yang beralamat di Jl. Dinding Asri Raya No. 11 Perumahan Bumi Resik Panglayungan, Kota Tasikmalaya dengan wilayah kerja Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Banjar.

Loka POM mempunyai tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk, pengambilan contoh (sampling), dan pengujian Obat dan Makanan, intelijen, penyidikan, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

KEDUDUKAN

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung merupakan UPT BPOM yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. UPT BPOM dipimpin oleh Kepala.

TUGAS

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018, Balai Besar POM di Bandung sebagai UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



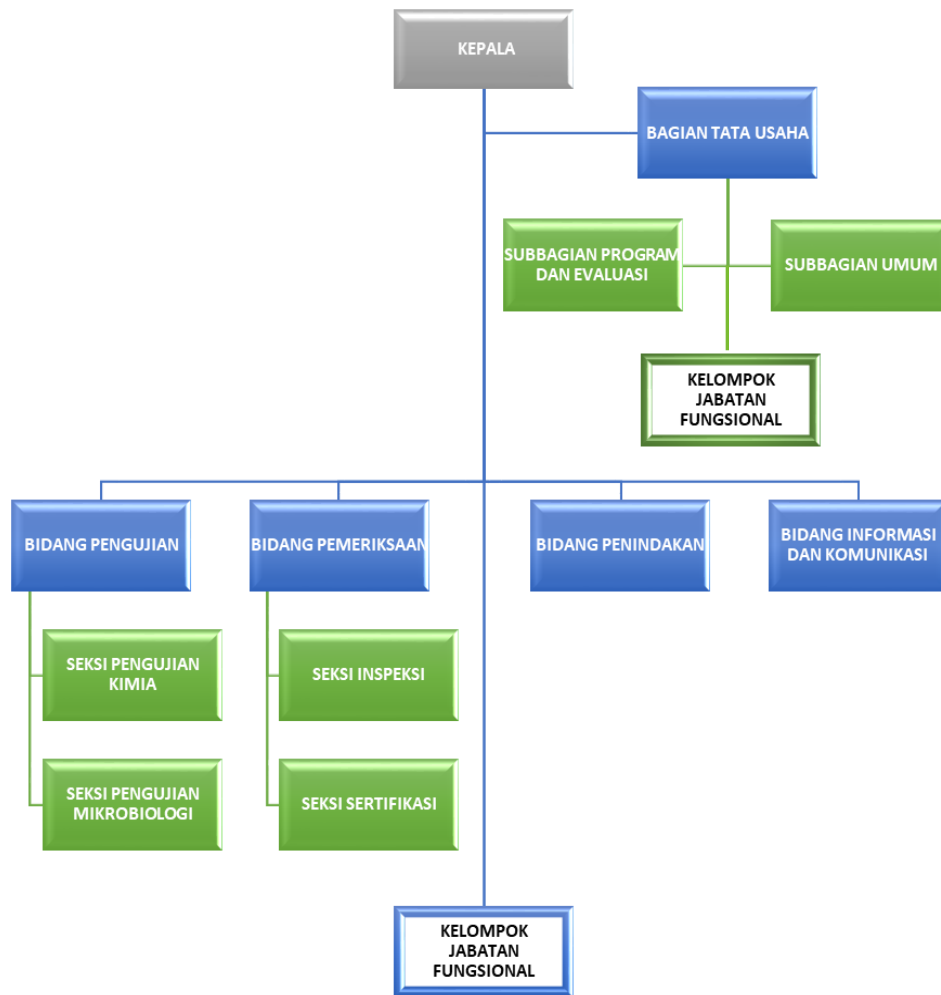
FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Besar POM di Bandung menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan;
5. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan;
6. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan;
7. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
8. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
9. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
10. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
11. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.2 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar POM di Bandung disusun berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan.



GAMBAR 1.1

STRUKTUR ORGANISASI BALAI BESAR POM DI BANDUNG

Sesuai dengan struktur organisasi, kegiatan bidang-bidang kerja Balai Besar POM di Bandung dapat dikelompokkan sebagai berikut: Bidang Pengujian, Bidang Pemeriksaan, Bidang Penindakan, Bidang Informasi dan Komunikasi, serta Bagian Tata Usaha melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. **Bidang Pengujian** mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan.

Bidang Pengujian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan;
- b. Pelaksanaan pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan; dan
- c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan.

Bidang Pengujian terdiri atas:



- a. Seksi Pengujian Kimia, yang mempunyai tugas melakukan pengujian kimia Obat dan Makanan.
 - b. Seksi Pengujian Mikrobiologi yang mempunyai tugas melakukan pengujian mikrobiologi Obat dan Makanan.
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. **Bidang Pemeriksaan** mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan.

Bidang Pemeriksaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan;
- b. Pelaksanaan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
- c. Pelaksanaan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk Obat dan Makanan;
- d. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan; dan
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan.

Bidang Pemeriksaan terdiri atas:

- a. Seksi Inspeksi yang bertugas melakukan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan,
 - b. Seksi Sertifikasi yang bertugas melakukan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk Obat dan Makanan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. **Bidang Penindakan** mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Bidang Penindakan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;



- b. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
 - c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
4. **Bidang Informasi dan Komunikasi** mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Bidang Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - b. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - c. Penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
 - d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
5. **Bagian Tata Usaha** mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan.

Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- c. Pengelolaan persuratan dan kearsipan;
- d. Pengelolaan penjaminan mutu dan tata laksana;
- e. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- f. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
- g. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan
- h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Evaluasi yang mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, pengelolaan keuangan, penjaminan mutu, tata laksana, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.
- b. Subbagian Umum yang mempunyai tugas melakukan pengelolaan persuratan, kearsipan, kepegawaian, teknologi informasi komunikasi, perlengkapan, dan kerumahtanggaan; dan

- c. Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. **Kelompok Jabatan Fungsional** mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur Organisasi Loka POM di Kota Tasikmalaya dan Loka POM di Kabupaten Bogor:



GAMBAR 1.2
STRUKTUR ORGANISASI LOKA TASIKMALAYA DAN BOGOR

1.3 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Sasaran strategis Balai Besar POM di Bandung disusun berdasarkan visi, misi dan sasaran strategis yang ingin dicapai Badan POM, dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumberdaya serta infrastruktur yang dimiliki Balai Besar POM di Bandung. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2015-2019) ke depan diharapkan Balai Besar POM di Bandung akan dapat mencapai sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu
2. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan



3. Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman
4. Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko
5. Menguatnya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan
6. Terwujudnya RB Balai Besar POM di Bandung sesuai roadmap RB BPOM 2018 - 2019

Terkait dengan peta strategi tersebut, Balai Besar POM di Bandung sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM mempunyai peran strategis dalam pencapaian outcome tersebut di atas, utamanya dalam melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerjanya yaitu Provinsi Jawa Barat. Mengingat luasnya cakupan pengawasan Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Bandung dituntut dapat menjalankan fungsi koordinasi keluar baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota dalam upaya pengawasan Obat dan Makanan.

1.4 ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

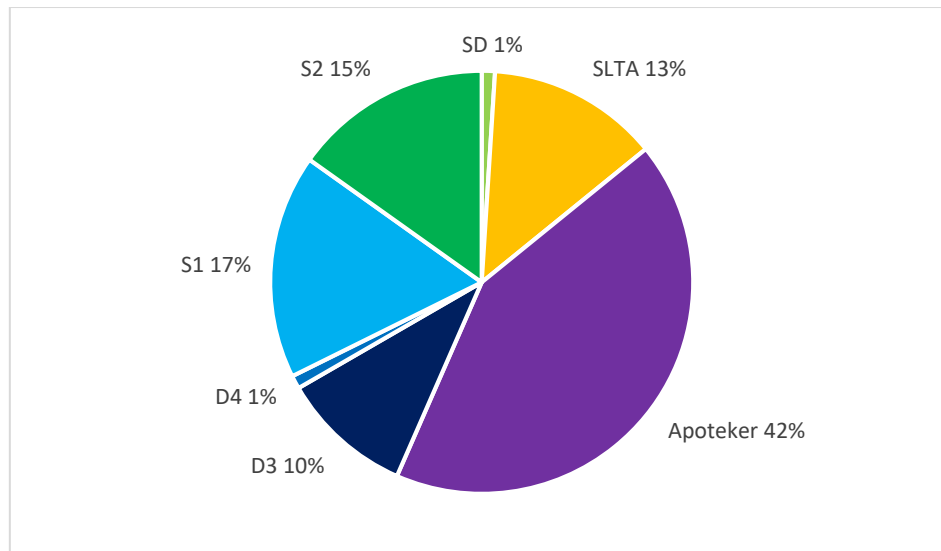
1.4.1 ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS INTERNAL

1) ANGGARAN

Pada tahun 2018, pagu anggaran Balai Besar POM di Bandung sesuai dokumen Perjanjian Kinerja Badan POM Tahun 2018 adalah Rp 63.075.093.000,00 (enam puluh tiga milyar tujuh puluh lima juta sembilan puluh tiga ribu rupiah). Kemudian, terjadi pemotongan anggaran menjadi Rp 62.106.653.000,00 (enam puluh dua milyar seratus enam juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah) yang terbagi dalam tiga Program, yaitu Program Pengawasan Obat dan Makanan yang merupakan program teknis untuk melaksanakan tugas-tugas utama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, serta dua Program Generik, yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis. Anggaran tersebut sudah termasuk anggaran Penguatan Kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan di Kab/Kota.

2) SUMBER DAYA MANUSIA

Balai Besar POM di Bandung memiliki sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kemampuan dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pengawasan Obat dan Makanan. SDM yang ada di BBPOM di Bandung termasuk Loka POM di Kota Tasikmalaya dan Loka POM di Kabupaten Bogor dengan pendidikan profesi apoteker adalah SDM terbanyak, yaitu 42% diikuti dengan pendidikan S1 :17% dan S2 : 13%. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar 1.1.

**GAMBAR 1.3****PROFIL TINGKAT PENDIDIKAN SDM BALAI BESAR POM DI BANDUNG**

Peningkatan kompetensi terus menerus dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun melalui pelatihan-pelatihan teknis. Namun demikian, jumlah kebutuhan SDM belum tercukupi sesuai dengan analisis beban kerja (ABK). Pada saat ini, jumlah SDM yang dimiliki termasuk SDM Loka POM di Kota Tasikmalaya dan Loka POM di Kabupaten Bogor adalah 143 orang, sedangkan kebutuhan berdasarkan ABK tahun 2018 adalah 276 orang. Belum dilakukan penghitungan ABK secara khusus untuk Loka POM di Kota Tasikmalaya dan Loka POM di Kabupaten Bogor untuk periode 2018.

3) SARANA PRASARANA

Penyediaan sarana prasarana merupakan pendukung utama dalam mencapai tujuan organisasi. Sarana prasarana terdiri dari 1). sarana dan prasarana kerja; 2). Alat Laboratorium. Sarana dan prasarana kerja terdiri dari luas bangunan, meja, kursi dan alat pengolah data. Luas lahan Balai Besar POM di Bandung seluas 4.268 m² dengan luas lantai bangunan sebesar 5.686 m². Bangunan yang ada selain memiliki fungsi sebagai area perkantoran, juga termasuk fungsi pelayanan publik dan laboratorium. Namun Secara umum pemenuhan terhadap kebutuhan alat pengolah data dan *meubelair* kerja masih terpenuhi yaitu sebesar 95,88%, namun untuk pemenuhan kebutuhan luas lantai bangunan masih belum terpenuhi. Pada tahun 2018, persentase pemenuhan luas bangunan baru mencapai 79,92%, sehingga masih diperlukan tambahan untuk perluasan bangunan.

4) PERALATAN LABORATORIUM

Pengujian laboratorium merupakan tulang punggung pengawasan yang dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Bandung. Laboratorium Balai Besar POM di Bandung telah mendapat sertifikat akreditasi sebagai laboratorium penguji dari Komite Akreditasi



Nasional dengan nomor sertifikat LP-173-IDN. Ilmu dan teknologi terus berkembang, begitu pula dengan proses pengujian. Untuk itu, laboratorium harus terus ditingkatkan kapasitasnya agar pengawasan Obat dan Makanan dapat berjalan secara optimal. Untuk melakukan pengujian, laboratorium telah dilengkapi dengan peralatan yang memadai agar dapat menghasilkan hasil uji yang valid dan dapat dipercaya. Namun, dibandingkan terhadap Standar Minimum Laboratorium Balai Besar POM di Bandung, masih terdapat *gap* sehingga pengadaan peralatan laboratorium terus dilakukan. Pada tahun 2018, pemenuhan Standar Minimum Alat Laboratorium adalah sebesar 80,94%.

1.4.2 ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS EKSTERNAL

Wilayah kerja Balai Besar POM di Bandung adalah seluruh wilayah administratif Provinsi Jawa Barat. Secara administratif pemerintahan, wilayah Provinsi Jawa Barat terbagi kedalam 27 kabupaten/kota, meliputi 18 kabupaten dan 9 kota serta terdiri dari 626 kecamatan, 5962 desa/kelurahan. Dengan luas wilayah 37.173,97 km² serta jumlah penduduk pada tahun 2013 sebesar 45.340.799 jiwa (Sumber : Badan Pusat Statistik, 2013). Jumlah sarana produksi dan sarana distribusi yang harus diawasi sebanyak 32.215 sarana.

Catchment area yang sangat luas dengan jumlah sarana produksi dan distribusi yang sangat banyak menjadi suatu kendala tersendiri dalam hal pengawasan Obat dan Makanan. Berdasarkan Inpres Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan (Diktum Kesepuluh huruf f), Kepala BPOM diinstruksikan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan instansi terkait. Berdasarkan hal tersebut, maka dikeluarkan Peraturan Badan POM No. 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pada peraturan tersebut, terjadi penguatan kelembagaan pengawasan Obat dan Makanan melalui pembentukan 40 (empat puluh) UPT Loka BPOM Kabupaten/Kota yang merupakan Proyek Prioritas Nasional Bidang Kesehatan Tahun 2018.

Pada Peraturan Badan POM No. 11 tahun 2018 tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan.

Berdasarkan peraturan tersebut di atas di wilayah Provinsi Jawa Barat ditetapkan dua loka. Kedua Loka POM tersebut adalah Loka POM di Kota Tasikmalaya dan Loka POM di Kabupaten Bogor. Wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya meliputi 5 Kabupaten/kota yaitu Kota Tasikmalaya, Kota Banjar, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten



- Mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi terkait.

Terkait hal tersebut di atas, maka BBPOM di Bandung melakukan beberapa strategi untuk pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Jawa Barat, diantaranya meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait.

2) Penguatan Kelembagaan dan Regulasi

Dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor: 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), terjadi perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) BPOM dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan. Berdasarkan Perpres tersebut di atas, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Balai Besar POM di Bandung dalam menjalankan fungsi penindakan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan diberi kewenangan intelijen dan penyidikan di bidang Obat dan Makanan sesuai peraturan perundang-undangan.

3) Penguatan Strategis Pengawasan

Dengan maraknya penyalahgunaan dan penggunaan bahan berbahaya pada produk Obat dan Makanan, BBPOM di Bandung melakukan upaya untuk menanggulangi hal tersebut sesuai dengan arahan Badan POM. Upaya yang dilakukan meliputi Reformulasi metode sampling, Pengawasan peredaran online Obat dan Makanan, serta Intensifikasi operasi penindakan dan pengungkapan aktor intelektual melalui perkuatan kemitraan dengan institusi penegak hukum.

4) Pengembangan Laboratorium

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kualitas pengujian laboratorium, BBPOM di Bandung berusaha menerapkan aspek GLP yang meliputi standar ruang lingkup pengujian, standar peralatan, dan standar kompetensi yang ditetapkan oleh PPOMN. Pemenuhan standar ruang lingkup pengujian dilakukan melalui pengembangan metode uji, verifikasi dan validasi metode uji, keikutsertaan dalam uji profisiensi dan kolaborasi serta jaminan mutu hasil pengujian. Pemenuhan standar peralatan laboratorium di BBPOM di Bandung dilakukan dengan cara penambahan fungsi dan pengadaan alat laboratorium. Pemenuhan standar kompetensi personel laboratorium dilakukan dengan mengikuti pelatihan baik yang diadakan oleh internal maupun eksternal Badan POM.

5) Pemberdayaan Masyarakat

Pengawasan obat dan makanan memiliki aspek permasalahan yang berdimensi luas dan kompleks. Oleh karena itu diperlukan sistem pengawasan yang komprehensif mulai dari awal proses suatu produk hingga produk tersebut beredar di tengah masyarakat. Obat



dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan dipasaran masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga kesadaran masyarakat dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, bermanfaat dan bermutu harus ditumbuhkan. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dalam bentuk KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi), yang meliputi GNPOPA (Gerakan Nasional Peduli Obat dan Pangan Aman), Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD), KIE KP (Keamanan Pangan) dan KIE OTKOS (Obat Tradisional dan Kosmetik) dan Kegiatan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya.

6) Pengawasan Obat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Dengan adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional dan kebijakan pemerintah berupa Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berdampak terhadap tingginya kebutuhan obat yang aman, bermutu dan bermanfaat. Hal ini akan mendorong banyak industri farmasi melakukan pengembangan fasilitas dan peningkatan kapasitas produksi dengan perluasan sarana yang dimiliki. Dalam hal ini tuntutan terhadap peran BBPOM di Bandung akan semakin besar, antara lain adalah peningkatan pengawasan *pre market* melalui sertifikasi CPOB dan *post market* melalui intensifikasi pengawasan obat beredar. Selain itu dengan diberlakukannya sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang menyebabkan peningkatan pemaparan obat kepada masyarakat maka strategi sampling harus difokuskan terhadap pengawalan obat-obat JKN.



BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) merupakan produk dari perencanaan strategis, yaitu suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Renstra Balai Besar POM di Bandung tahun 2015-2019 telah disusun dengan mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis (Renstra) Badan POM 2015 – 2019 tanggal 30 Maret 2015 dan diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 515 tanggal 6 April 2015, dan berpedoman pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.

Revisi Renstra BPOM Tahun 2015-2019 disusun mengacu pada Nawacita, arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN serta dengan memperhatikan adanya perubahan organisasi dan Tata Kerja BPOM sebagaimana tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang BPOM serta Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM. Perubahan struktur organisasi dan atau tugas dan fungsi BPOM berdampak pada perubahan arah kebijakan dan strategi serta perubahan sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan dan indikator kinerjanya.

Secara garis besar, lingkungan strategis eksternal yang dihadapi oleh BPOM pada tahun 2015-2019 terdiri atas 2 (dua) isu pokok, yaitu kesehatan dan globalisasi. Isu kesehatan terkait dengan perlunya peningkatan pengawasan Obat dan Makanan sebagai implikasi diberlakukannya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), desentralisasi dan otonomi daerah, agenda Sustainable Development Goals (SDGs), demografi, program fortifikasi pangan, serta perubahan iklim dunia. Adapun isu terkait globalisasi, utamanya tantangan menghadapi



perdagangan bebas dan komitmen internasional, perubahan ekonomi dan sosial masyarakat, serta perkembangan teknologi.

Revisi Renstra BPOM Tahun 2015–2019 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan BPOM. Diharapkan *output* dan *outcome* dari pelaksanaan program dan kegiatan BPOM Tahun 2015-2019 tersebut menjadi bentuk konkrit kontribusi BPOM terhadap pencapaian agenda Nawacita nasional, khususnya dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Untuk itu, capaian target *outcome* dan *output* akan dipantau secara berkala, dan dievaluasi pada akhir periode Rencana Strategis/RPJM sebagai impact assessment.

Selain merupakan referensi utama bagi seluruh unit kerja di lingkungan BPOM dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Revisi Renstra BPOM Tahun 2015-2019 diharapkan dapat menjadi rujukan pemangku kepentingan dalam membuat program dan kegiatan yang bersinergi dengan Pengawasan Obat dan Makanan

Badan POM (BPOM) sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga Pengawasan Obat dan Makanan dituntut untuk dapat menjamin keamanan, mutu, manfaat/khasiat Obat dan Makanan sesuai persyaratan yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan hal tersebut di atas telah dirumuskan definisi filosofis bagi BPOM, sebagai berikut:

“BPOM sebagai koordinator pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan secara independen, efektif dan terintegrasi dengan sektor terkait lainnya, untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan, melalui penetapan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan; penataan dan pembinaan kepatuhan, serta pengendalian dan penindakan atas berbagai bentuk pelanggaran; yang diperkuat dengan partisipasi masyarakat”.

Untuk dapat memenuhi peran dan fungsi BPOM sebagaimana harapan dalam definisi filosofis tersebut memerlukan konsekuensi perubahan dalam beberapa hal. Dalam arti lain diperlukan sebuah transformasi bagi BPOM yang selanjutnya juga harus diikuti dengan berbagai perubahan yang menyertainya.

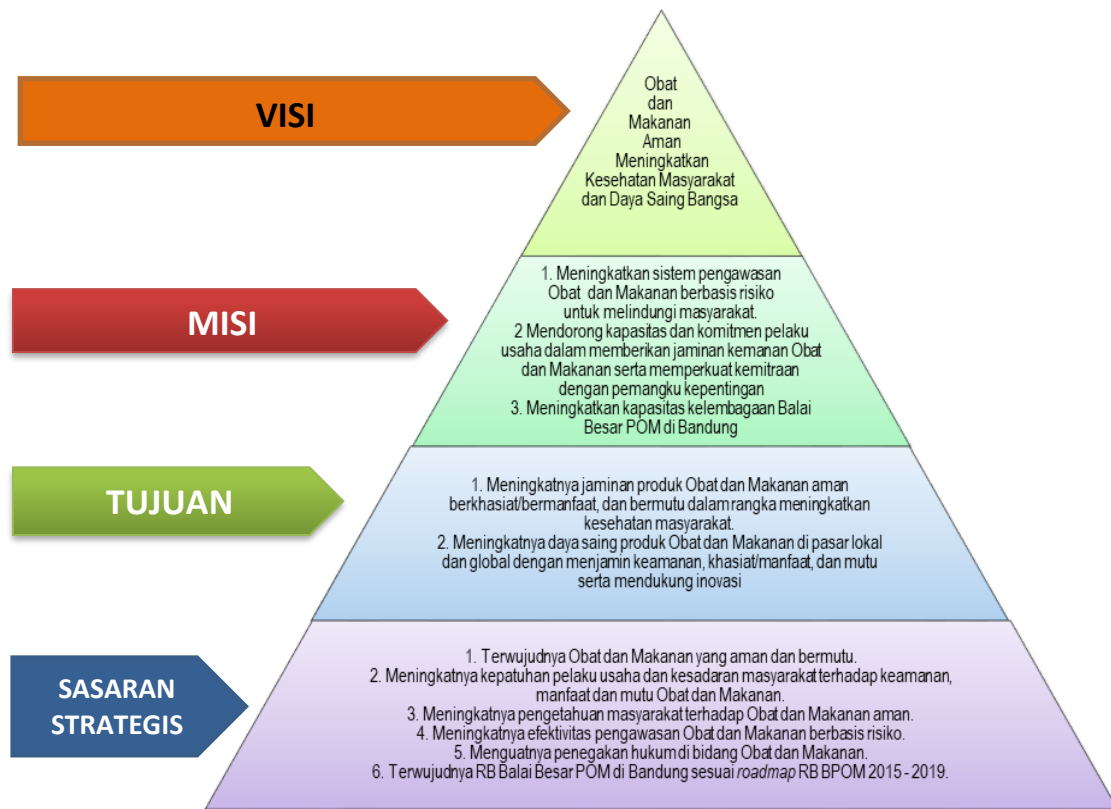


- | | |
|---|---|
| 1 Pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dilakukan secara terfragmentasi; | 1 Badan POM sebagai KOORDINATOR pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan secara <i>full spectrum</i> ; |
| 2 KETERBATASAN akses pengawasan pada Fasyankes, Pelaku Usaha Kefarmasian dan Makanan; | 2 MEMILIKI AKSES PENGAWASAN pada Fasyankes, Pelaku Usaha Kefarmasian dan Makanan; |
| 3 Tugas dan Fungsi UPT (Balai) terbatas; | 3 Penguatan UPT; |
| 4 KETERBATASAN kapasitas dan kapabilitas UPT (Balai); | 4 PENGUATAN kapasitas dan kapabilitas UPT (Balai) ->People, Process, Infrastructure; |
| 5 Orientasi kinerja terbatas pada OUTPUT. | 5 Orientasi kinerja pada <i>outcome</i> dan |
| | 6 <i>impact</i> ; |
| | 6 Penguatan penindakan dengan efek jera. |

GAMBAR 2.1

TRANSFORMASI BPOM SEBAGAI KOORDINATOR PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi ke depan sebagaimana telah dijelaskan pada Bab I, maka Balai Besar POM di Bandung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Unit Pelaksana Teknis dalam melaksanakan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Jawa Barat dituntut untuk menjamin keamanan, mutu, manfaat/khasiat sesuai standar. Untuk itu, Balai Besar POM di Bandung telah menetapkan visi, misi dan tujuan serta sasarannya.



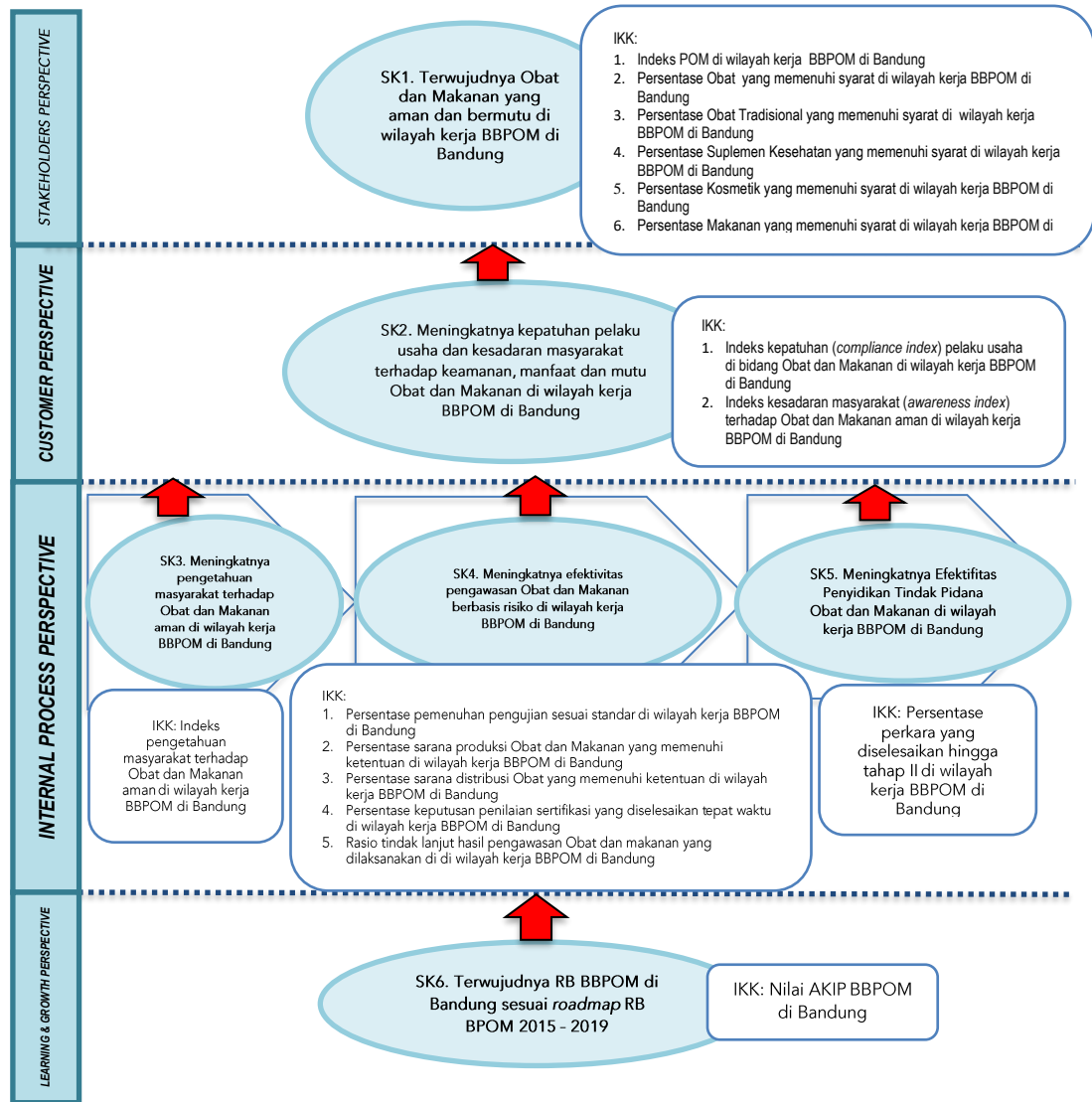
GAMBAR 2.2

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BALAI BESAR POM DI BANDUNG

2.1.1. SASARAN KEGIATAN

Sasaran kegiatan Balai Besar POM di Bandung disusun berdasarkan visi, misi dan sasaran strategis yang ingin dicapai Badan POM, dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Balai Besar POM di Bandung. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan (2015-2019) diharapkan Balai Besar POM di Bandung akan dapat mencapai sasaran kegiatan sebagaimana tergambar pada Peta Strategi Balance Score Card (BSC) Level II Balai Besar POM di Bandung sebagai berikut:

PETA STRATEGI BSC LEVEL II BALAI BESAR POM DI BANDUNG



GAMBAR 2.3

PETA STRATEGI LEVEL II BALAI BESAR POM DI BANDUNG

**SASARAN
KEGIATAN 1****TERWUJUDNYA OBAT DAN MAKANAN
YANG AMAN DAN BERMUTU DI WILAYAH
KERJA DI BBPOM DI BANDUNG**

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang diselenggarakan oleh Balai Besar POM di Bandung merupakan suatu proses yang komprehensif, mencakup pengawasan *premarket* dan *post-market*. Sistem itu terdiri dari:

1. Penilaian (*pre-market evaluation*) dilakukan sebelum produk beredar dengan memberikan rekomendasi hasil pemeriksaan sarana terkait permohonan izin edar.
2. Pengawasan setelah beredar (*post-market control*) dilakukan untuk melihat konsistensi mutu produk, keamanan dan informasi produk yang dilakukan dengan melakukan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, serta pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan dan pengawasan label/penandaan dan iklan di wilayah kerja BBPOM di Bandung.
3. Pengujian laboratorium. Hasil uji laboratorium merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan apakah produk memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, yang selanjutnya produk yang tidak memenuhi syarat ditarik dari peredaran.
4. Penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *projusticia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif atau diproses secara hukum pidana.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan ini, telah ditetapkan 6 indikator kinerja utama. Keenam indikator dengan target kinerja tahun 2018 dan cara pengukuran masing-masing indikator adalah sebagai berikut :

**70.00%**

Indikator Kinerja Utama

• INDEKS PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG

- Indeks POM dihitung menggunakan metodologi statistik dan Analytical hierarchy process (AHP) untuk pembobotan indikator kinerja pembentuk indeks.

93.50%

Indikator Kinerja Utama

• PERSENTASE OBAT YANG MEMENUHI SYARAT DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG

- %Obat MS = 100% - %Obat TMS
- % Obat TMS = (sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan atau TMK label/penandaan) dibagi total sampling x 100%

83.00%

Indikator Kinerja Utama

• PERSENTASE OBAT TRADISIONAL YANG MEMENUHI SYARAT DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG

- %Obat Tradisional MS = 100% - %Obat Tradisional TMS
- % Obat Tradisional TMS = (sampel Obat Tradisional yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan atau TMK label/penandaan) dibagi total sampling x 100%

92.00%

Indikator Kinerja Utama

• PERSENTASE KOSMETIK YANG MEMENUHI SYARAT DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG

- %Kosmetik MS = 100% - %Kosmetik TMS
- % Kosmetik TMS = (TMS ilegal + TMS rusak dan kedaluwarsa + TMS label/penandaan + TMS uji laboratorium / total sampling) x 100%

95.00%

Indikator Kinerja Utama

• PERSENTASE SUPLEMEN KESEHATAN YANG MEMENUHI SYARAT DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG

- %Suplemen Kesehatan MS = 100% - %Suplemen Kesehatan TMS
- % Suplemen Kesehatan TMS = (sampel Suplemen Kesehatan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan atau TMK label/penandaan) dibagi total sampling x 100%

89.60%

Indikator Kinerja Utama

• PERSENTASE MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG

- Persentase Makanan yang memenuhi syarat = (Makanan yang MS pada tahun berjalan dibagi Jumlah seluruh sampel Makanan yang diuji dengan parameter kritis pada tahun berjalan (n)) x 100%

SASARAN KEGIATAN 2**MENINGKATNYA KEPATUHAN DAN KEPUASAN PELAKU USAHA SERTA KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP KEAMANAN, MANFAAT DAN MUTU OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA DI BBPOM DI BANDUNG**

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat. Selain itu, dalam sub sistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan.

Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga indikator adalah sebagai berikut:

60.00%

Indikator Kinerja Utama

• INDEKS KEPATUHAN (COMPLIANCE INDEX) PELAKU USAHA DI BIDANG OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG

- Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan dihitung menggunakan metodologi statistik dan Analytical hierarchy process (AHP) untuk pembobotan indikator kinerja pembentuk indeks.
- Indeks ini dihitung berdasarkan capaian kinerja BPOM pada tahun n-1

SASARAN KEGIATAN 3**MENINGKATNYA PENGETAHUAN MASYARAKAT TERHADAP OBAT DAN MAKANAN AMAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG**

Balai Besar POM di Bandung perlu berupaya untuk selalu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan, sesuai dengan prinsip 3 (tiga) pilar pengawasan Obat dan Makanan. Untuk mencapai tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat yang tinggi, Balai Besar POM di Bandung perlu secara aktif memberikan pengetahuan kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) melalui berbagai forum dan media. Dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman, diharapkan akan mampu menimbulkan sikap dan perilaku yang mampu membentengi diri sendiri dari produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat.

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama: Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Bandung.

60.00%

Indikator Kinerja Utama

• INDEKS PENGETAHUAN MASYARAKAT TERHADAP OBAT DAN MAKANAN AMAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG

- Untuk menghitung indeks pengetahuan masyarakat dilakukan metodologi survei. Indeks ini dihitung berdasarkan capaian kinerja BPOM pada tahun n

SASARAN KEGIATAN 4**MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN BERBASIS RISIKO DI AMAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG**

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (*full spectrum*) mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan Balai Besar POM di Bandung mampu melindungi masyarakat dengan optimal.



Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan ini, telah ditetapkan 5 indikator kinerja utama. Kelima indikator dengan target kinerja tahun 2018 dan cara pengukuran masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

100.00%

Indikator Kinerja Utama

PERSENTASE PEMENUHAN PENGUJIAN SESUAI STANDAR DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG

- Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar = (Jumlah sampel yang diuji dengan parameter uji yang tercantum dalam standar dibagi sampel yang harus diuji) x 100%

33.00%

Indikator Kinerja Utama

PERSENTASE SARANA PRODUKSI OBAT YANG MEMENUHI KETENTUAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG

- Nilai Persentase = (Jumlah Sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dibagi target jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa) x 100%. *

45.00%

Indikator Kinerja Utama

PERSENTASE SARANA DISTRIBUSI OBAT YANG MEMENUHI KETENTUAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG

- Nilai Persentase: (Jumlah Sarana distribusi diperiksa yang memenuhi ketentuan dibagi jumlah sarana distribusi yang diperiksa) x 100%.

84.00%

Indikator Kinerja Utama

PERSENTASE KEPUTUSAN PENILAIAN SERTIFIKASI YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG

- Nilai Persentase: (keputusan penilaian sertifikasi pada tahun berjalan dan carry over tahun sebelumnya yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah permohonan penilaian sertifikasi pada tahun berjalan) x 100%.

40.00%

Indikator Kinerja Utama

RASIO TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN YANG DILAKSANAKAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG

- Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan
- di wilayah kerja BBPOM di Bandung = (Jumlah tindak lanjut/feedback dari pelaku usaha dan instansi terkait dibagi Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai kepada pelaku usaha dan instansi terkait)x100%

SASARAN KEGIATAN 5**MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG**

Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan Balai Besar POM di Bandung menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menyasar ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh Balai Besar POM di Bandung melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Untuk

mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya sebagai adalah Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II dengan target 50,00% pada akhir tahun 2018.

50.00%

Indikator Kinerja Utama

- **PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN HINGGA TAHAP II DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG**
- Nilai %: (jumlah perkara tahap2 tahun n dan tahun sebelumnya dibagi Total perkara ditahun n) x 100%.

SASARAN KEGIATAN 6**TERWUJUDNYA RB BALAI BESAR POM DI BANDUNG SESUAI ROADMAP RB BPOM 2015-2019**

Untuk melaksanakan tugas Balai Besar POM di Bandung, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Bandung. Selain itu, untuk mendukung sasaran kegiatan lainnya, perlu dilakukan penguatan Akuntabilitas Kinerja yang meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Balai Besar POM di Bandung telah mengimplementasikan Sistem Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan baik. Komitmen pimpinan yang sangat tinggi terhadap pelaksanaan SAKIP menjadi kekuatan penting dalam upaya penguatan akuntabilitas kinerja Balai Besar POM di Bandung. Namun, masih perlu melakukan penyempurnaan dalam penatausahaan manajemen pemerintahan (keuangan dan Barang Milik Negara) dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan mendukung terpenuhinya target sasaran strategis Badan POM.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan ini, telah ditetapkan satu indikator kinerja utama, yaitu nilai SAKIP Balai Besar POM di Bandung dari Badan POM.

78.00%

Indikator Kinerja Utama

- **NILAI SAKIP BALAI BESAR POM DI BANDUNG**
- Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BBPOM di Bandung oleh Inspektorat Utama BPOM.

2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Bandung Tahun 2018 merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian Kinerja disepakati antara pengemban tugas yaitu Kepala Balai Besar POM di Bandung dengan Kepala Badan POM RI. Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh Balai Besar POM di Bandung. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 telah disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya, yaitu setelah proses anggaran (*budgeting process*) selesai atau



setelah alokasi anggaran. Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Bandung Tahun 2018 ditetapkan pada tanggal 06 Januari 2018. Perjanjian kinerja dimanfaatkan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja, dan menilai keberhasilan organisasi.

TABEL 2.1
PERJANJIAN KINERJA BALAI BESAR POM DI BANDUNG TAHUN 2018 (OTK LAMA)

NO	SASARAN STRATEGIS/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2018
1.	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93,50%
		Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	62,54%
		Persentase Kosmetika yang memenuhi syarat	90,41%
		Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	95,00%
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	68,03%
2.	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat	82,41
		Jumlah Kabupaten/ Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	34
3.	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BBPOM di Bandung	Nilai SAKIP BBPOM di Bandung dari Badan POM	BB (75)
MENGUATNYA SISTEM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN			
1.	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk Obat dan Makanan yang beredar	Sampel Obat, Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang diuji dengan parameter kritis	3157
		Sampel Makanan yang diuji menggunakan parameter kritis	1350
2.	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	2,13%
3.	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Sarana Pelayanan Kefarmasian	9,00%
		Cakupan pemeriksaan sarana Distribusi Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan, dan Makanan	22,63%
4.	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan	Perkara di bidang penyidikan Obat dan Makanan	23
MENINGKATNYA KAPASITAS DAN KOMITMEN PELAKU USAHA, KEMITRAAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT			
1.	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	Layanan publik BB/BPOM	3500
		Komunitas yang diberdayakan	42
		Sekolah yang diintervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)	1230
MENINGKATNYA KUALITAS KAPASITAS KELEMBAGAAN BBPOM DI BANDUNG			
1.	Pengadaan sarana dan prasarana yang terkait pengawasan Obat dan Makanan	Sarana prasarana sesuai standar	87,30%
2.	Penyusunan perencanaan, penganggaran, keuangan dan	Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	9



NO	SASARAN STRATEGIS/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2018
	evaluasi yang dilaporkan tepat waktu		
Kegiatan:		Anggaran:	
Pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Bandung		Rp. 63.075.093.000,-	

Dengan adanya revisi Renstra Balai Besar POM di Bandung Tahun 2015-2019 maka dilakukan review terhadap Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Bandung Tahun 2018. Indikator kinerja pada setiap sasaran kegiatan mengacu pada dokumen Revisi Renstra Balai Besar POM di Bandung Tahun 2015-2019. Revisi terhadap Perjanjian Kinerja tahun 2019 ditetapkan pada tanggal 12 September 2018.

Perjanjian Kinerja dapat dilihat pada lampiran 2.

TABEL 2.2
PERJANJIAN KINERJA BALAI BESAR POM DI BANDUNG TAHUN 2018 (OTK LAMA DAN OTK BARU)

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
RENJA 2018 (OTK Lama)			
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	4.507
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	2,13
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	15,29
4	Meningkatnya hasil tindaklanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah Perkara di bidang Obat dan Makanan	23
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang terkait Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	85,87
6	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	9
7	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	Jumlah layanan publik	3.500
		Jumlah komunitas yang diberdayakan	42
PETA STRATEGI 2018 (OTK Baru)			
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu di Provinsi Jawa Barat	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM Bandung	70.00
		Persentase Obat yang memenuhi syarat di Provinsi Jawa Barat	93.50
		Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat di Provinsi Jawa Barat	83.00
		Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat di Provinsi Jawa Barat	92.00



NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat di Provinsi Jawa Barat	95.00
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat di Provinsi Jawa Barat	89.60
2	Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM Bandung	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang obat dan makanan di wilayah kerja BBPOM Bandung	60.00
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM Bandung	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM Bandung	60.00
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Jawa Barat	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Jawa Barat	100,00
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM Bandung	33.00
		Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM Bandung	45.00
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Jawa Barat	84.00
		Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM Bandung	40.00
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM Bandung	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM Bandung	50.00
6	Terwujudnya Reformasi Birokrasi BBPOM di Bandung sesuai dengan road map Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019	Nilai AKIP BBPOM di Bandung	78.00

Kegiatan :

Program Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia Rp. 62.106.653.000

2.3. KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR

Keberhasilan suatu sasaran kegiatan dapat diukur melalui capaian indikator sasaran kegiatan atau yang biasa disebut indikator kinerja. Seluruh Indikator Kinerja Kegiatan Balai Besar POM Di Bandung merupakan Indikator Kegiatan Utama. Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran kegiatan sesuai definisi operasional indikator yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung



persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja, dengan rumus dibawah ini:

Pengukuran **INDIKATOR POSITIF** (semakin tinggi realisasinya, semakin baik kinerjanya) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pengukuran **INDIKATOR NEGATIF** (semakin tinggi realisasinya, semakin buruk kinerjanya) yang satuannya dalam % dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{(100 - \text{Realisasi})}{(100 - \text{Target})} \times 100\%$$






Pengukuran **INDIKATOR NEGATIF** (semakin tinggi realisasinya, semakin buruk kinerjanya) yang satuannya **BUKAN DALAM %** dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk sasaran kegiatan yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, nilai pencapaian sasaran dihitung berdasarkan capaian rata-rata indikator dari sasaran. Indikator kinerja utama (IKU) diberi bobot lebih tinggi (2 kali) karena mempunyai kontribusi yang lebih besar terhadap pencapaian sasaran. Berdasarkan Revisi Renstra Balai Besar POM di Bandung tahun 2015 – 2019, seluruh indikator kinerja dari masing-masing sasaran kegiatan merupakan indikator kinerja utama.

Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja (X) yang digunakan adalah sebagai berikut:

TABEL 2.3
KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA

				
Memuaskan	Baik	Cukup	Kurang	Tidak Dapat Disimpulkan
$100\% < X \leq 125\%$	100%	$75\% \leq X < 100\%$	$X < 75\%$	$X > 125\%$



BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sesuai dengan yang tercantum di dalam Revisi Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandung tahun 2015-2019, Penetapan Kinerja tahun 2018 Balai Besar POM di Bandung memuat 6 (enam) sasaran kegiatan. Pencapaian keenam sasaran kegiatan Balai Besar POM di Bandung hingga tahun 2018 atau tahun keempat dari periode Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandung tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

TABEL 3.1
CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN TAHUN 2018

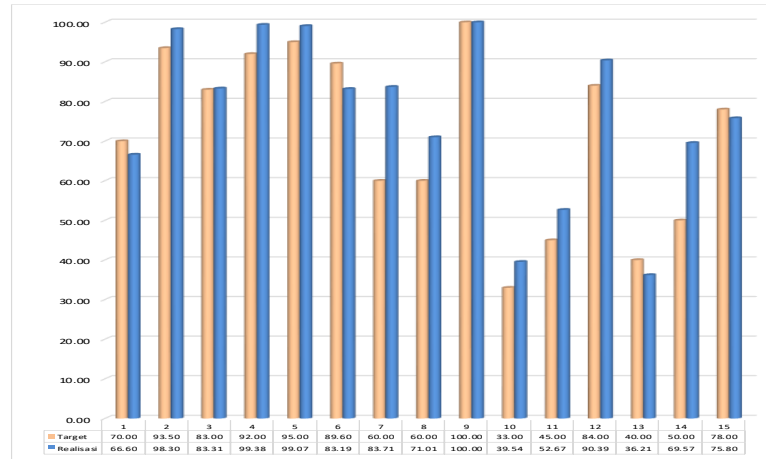
SASARAN KEGIATAN	% CAPAIAN	KRITERIA	
1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu di di Provinsi Jawa Barat	101%	Memuaskan	
2. Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM Bandung	140%	Tidak Dapat Disimpulkan	
3. Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM Bandung	118%	Memuaskan	
4. Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Jawa Barat	107%	Memuaskan	
5. Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM Bandung	139%	Tidak Dapat Disimpulkan	
6. Terwujudnya Reformasi Birokrasi BBPOM di Bandung sesuai dengan road map Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019	97%	Cukup	

Sasaran kegiatan yang ditetapkan diukur dengan 15 sasaran kinerja utama. Secara lengkap perbandingan target dan realisasi setiap indikator kinerja utama dari masing-masing sasaran kegiatan dapat dilihat pada tabel 3.2 di bawah ini :



TABEL 3.2
PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2018

Sasaran Kegiatan	No.	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu di Provinsi Jawa Barat	1.	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	70	66.6
	2.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93.5	98.3
	3.	Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	83	83.31
	4.	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	92	99.38
	5.	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	95	99.07
	6.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	89.6	83.19
2. Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM Bandung	7.	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang obat dan makanan di wilayah kerja BBPOM Bandung	60	83.71
3. Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM Bandung	8.	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM Bandung	60	71.01
4. Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Jawa Barat	9.	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar	100	100
	10.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM Bandung	33	39.54
	11.	Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM Bandung	45	52.67
	12.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja BBPOM Bandung	84	90.39
	13.	Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM Bandung	40	36.21
Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM Bandung	14.	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM Bandung	50	69.57
Terwujudnya Reformasi Birokrasi BBPOM di Bandung sesuai dengan road map Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019	15.	Nilai AKIP BBPOM di Bandung	78	75.8









GAMBAR 3.1
PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2018

Pada tahun 2018, terdapat dua pencapaian sasaran kegiatan dengan kriteria tidak dapat disimpulkan. Hal tersebut menunjukkan perlu adanya review yang mendalam untuk mengetahui penyebab tidak dapat disimpulkannya hasil pencapaian kegiatan tersebut. Selain itu, terdapat kegiatan dengan capaian dibawah target yang ditetapkan walaupun masih dalam kriteria cukup. Penjelasan mengenai kendala pencapaian dan upaya perbaikan untuk pencapaian target dapat dilihat pada penjelasan indikator kinerja di bawah ini.

3.1.1. SASARAN KEGIATAN KE-1: TERWUJUDNYA OBAT DAN MAKANAN YANG AMAN DAN BERMUTU DI PROVINSI JAWA BARAT

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 6 (enam) indikator yang seluruhnya merupakan indikator kinerja utama (IKU). Dari perhitungan ke-enam indikator tersebut, diperoleh hasil rata-rata capaian sebesar **101%** dengan kriteria **Memuaskan**. Hasil Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.3.

TABEL 3.3
CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-1 TAHUN 2018


SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KRITERIA	
Terwujudnya Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu di Provinsi Jawa Barat	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	70,00	66,6	95%	Cukup	
	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93,50	98,30	105%	Memuaskan	
	Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	83,00	83,31	100%	Baik	
	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	92,00	99,38	108%	Memuaskan	
	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	95,00	99,07	104%	Memuaskan	
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	89,60	83,19	93%	Cukup	

Penjelasan mengenai capaian indikator sasaran kegiatan kesatu, sebagai berikut:

3.1.1.1 INDEKS PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

Nilai Indeks Pengawasan Obat dan Makanan (IPOM) adalah suatu ukuran untuk menilai tingkat efektivitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Bandung yang diukur menggunakan 3 (tiga) dimensi yaitu pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha. Indeks POM dihitung menggunakan metodologi statistik dan *Analitycal Hierarchy Process* (AHP) untuk pembobotan indikator kinerja pembentuk indeks. Indeks ini dihitung berdasarkan capaian kinerja BPOM pada tahun n-1. Indikator kinerja kegiatan ini merupakan indikator kinerja yang baru ditetapkan pada tahun 2018 setelah dibentuknya SOTK baru.

TABEL 3.4
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
"INDEKS PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN" TAHUN 2018

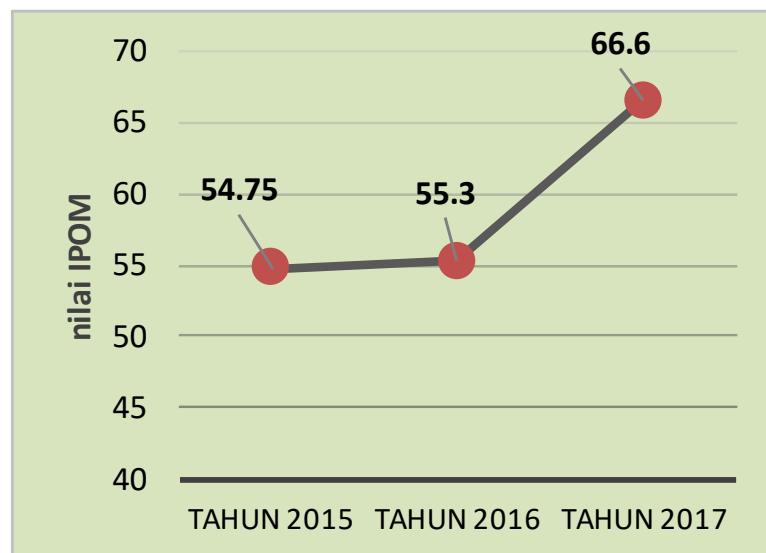
Indikator Sasaran	2018		Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)	Kriteria Penilaian	
	Target	Realisasi			
Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	70	66,6	95%	Cukup	

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja tahun 2018

Pada tahun 2018 ditetapkan nilai indeks pengawasan Obat dan Makanan sebesar 70, dan realisasi diperoleh nilai 66,6 sehingga persentase capaian adalah 95% dengan kriteria Cukup.

B. Perbandingan Realisasi dan Capaian tahun 2018 dengan tahun 2015, tahun 2016 dan tahun 2017

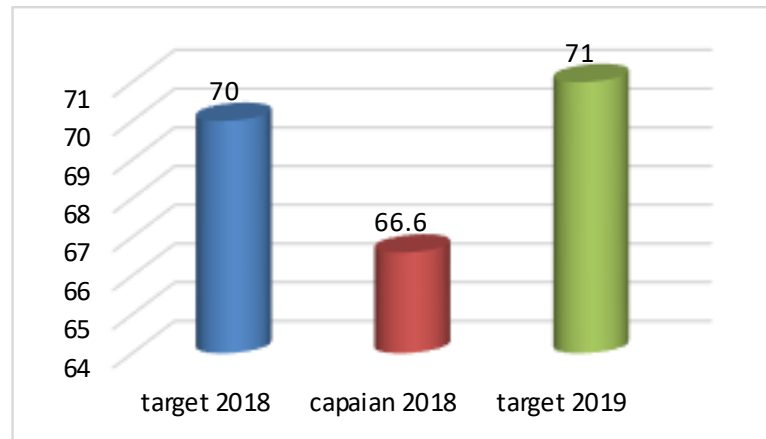
Indikator ini diukur pada tahun n-1, sehingga data yang dibandingkan adalah capaian tahun 2017 terhadap tahun 2016 dan tahun 2015. Meskipun indikator ini merupakan indikator baru, namun data nilai IPOM tahun 2015, tahun 2016 telah tersedia, sehingga kita dapat membandingkan nilai indeks pengawasan Obat dan Makanan Jawa Barat tahun 2017 terhadap tahun tahun sebelumnya. Dari gambar 3.2 terlihat adanya peningkatan yang signifikan antara tahun 2015 dengan tahun 2017.



GAMBAR 3.2
PROFIL REALISASI “INDEKS PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN”
TAHUN 2015, TAHUN 2016, DAN TAHUN 2017

C. **Perbandingan Realisasi Kinerja Hingga Tahun 2018 Dengan Target Renstra Periode Tahun 2015-2019**

Target nilai IPOM akhir tahun Renstra 2015 - 2019 adalah sebesar 71. Apabila kita hitung nilai capaian tahun 2018 (66,6) terhadap target tersebut maka persentase capaiannya adalah sebesar 94%. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar 3.3



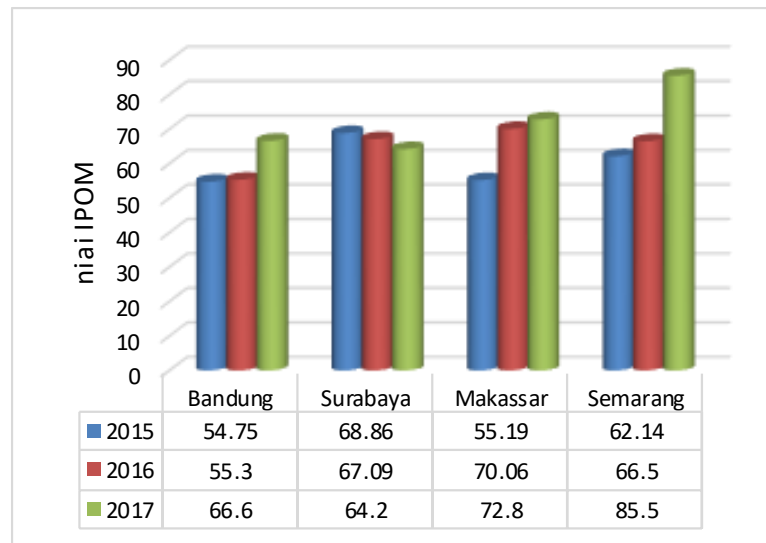
GAMBAR 3.3
PERBANDINGAN CAPAIAN TAHUN 2018 DENGAN TARGET TAHUN 2018 DAN TARGET TAHUN 2019
"INDEKS PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN"

D. **Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2018 dengan target nasional (target Badan POM)/ Balai Besar POM lain**

Target nasional nilai IPOM tahun 2018 adalah sebesar 70. Apabila kita hitung nilai capaian tahun 2018 (66,6) terhadap target tersebut maka capaiannya baru mencapai 95%. Nilai tersebut sama dengan capaian terhadap target balai tahun 2018.

Apabila dibandingkan dengan nilai IPOM provinsi lainnya, nilai yang diperoleh Balai Besar POM di Bandung paling rendah dibandingkan lainnya. Namun apabila dilihat dari profil nilai IPOM, dimulai tahun 2015 s.d tahun 2017 terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini menjadi perhatian untuk terus meningkatkan pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Jawa Barat, sehingga dapat mencapai target yang ditetapkan.

Secara terperinci, perbandingan nilai IPOM BBPOM di Bandung dibandingkan dengan provinsi lain dapat dilihat pada gambar 3.4.



GAMBAR 3.4
PERBANDINGAN TARGET DAN CAPAIAN BBPOM DI BANDUNG DENGAN BALAI BESAR POM
PROVINSI LAIN
"INDEKS PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN"

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Ketidakberhasilan dalam pencapaian kinerja sasaran ini disebabkan oleh:

- ☛ Cakupan pengawasan sarana produksi dan sarana distribusi Obat dan Makanan di wilayah Jawa Barat masih rendah pada tahun 2018 yaitu 2,25 % sarana produksi dan 15,31 % sarana distribusi Obat dan Makanan.
- ☛ Jumlah personil di Balai Besar POM di Bandung yang masih terbatas, khususnya di bidang pemeriksaan yaitu sebanyak 34 orang untuk mengawasi jumlah sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di wilayah Jawa Barat sebanyak 32.215 sarana.

Alternatif solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- ☛ Peningkatan kompetensi dan jumlah sumber daya manusia, khususnya inspektur Balai Besar POM di Bandung sehingga dapat meningkatkan cakupan pengawasan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan. Hal tersebut akan memiliki daya ungkit untuk peningkatan indeks pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Jawa Barat.

F. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya


Indeks Pengawasan Obat dan Makanan merupakan indikator yang baru diukur tahun 2018, maka belum ada rekomendasi terkait perbaikan kinerja untuk mendukung peningkatan indikator ini.

G. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.3.

3.1.1.2 PERSENTASE OBAT YANG MEMENUHI SYARAT

TABEL 3.5
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
"PERSENTASE OBAT YANG MEMENUHI SYARAT" TAHUN 2018

Indikator Sasaran	2018		Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)	Kriteria Penilaian	
	Target	Realisasi			
Persentase Obat yang memenuhi syarat	93,50%	98,30%	105%	Memuaskan	

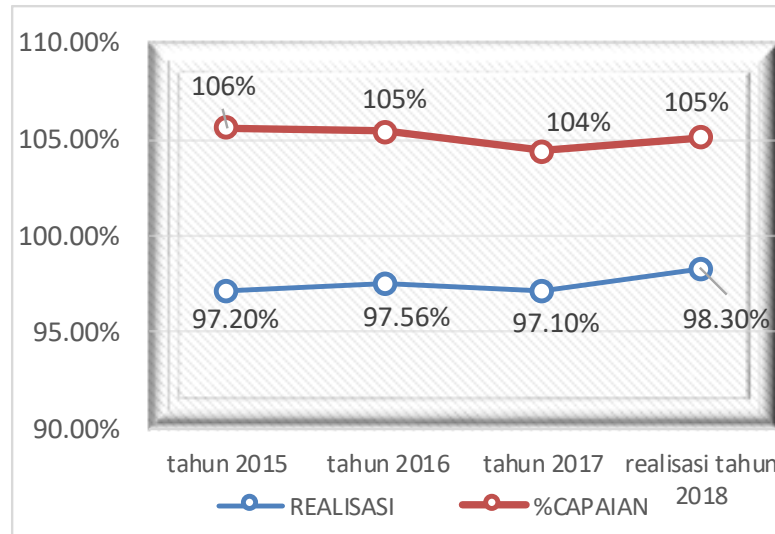
A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

Pada tahun 2018, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 93,50%. Persentase Obat yang memenuhi syarat pada tahun 2018 sebesar 98,30% dengan rincian jumlah sampel yang diuji sebanyak 999 sampel, yang tidak memenuhi syarat sebanyak 17 sampel. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar **105%** dengan kriteria **Memuaskan**.

B. Perbandingan Realisasi dan Capaian tahun 2018 dengan tahun 2015, tahun 2016 dan tahun 2017

Apabila kita membandingkan realisasi persentase Obat yang memenuhi syarat di Provinsi Jawa Barat tahun 2018 (98.30%) terhadap tahun 2015 (97,20%), tahun 2016 (97,56%) dan tahun 2017 (97.10%) terlihat adanya peningkatan tapi tidak signifikan.

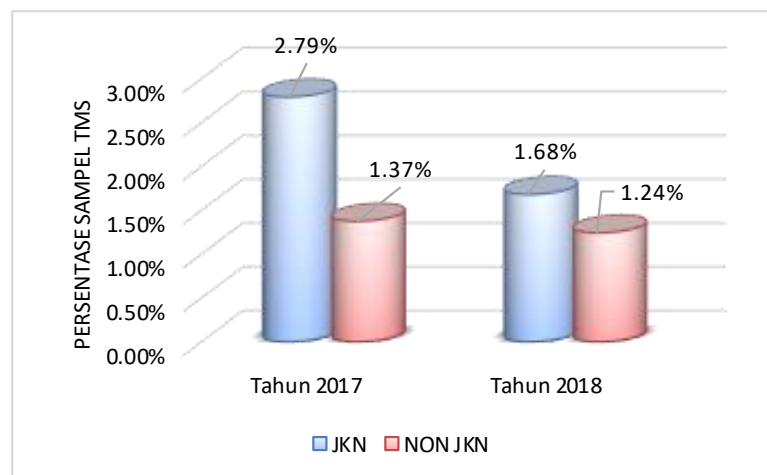
Persentase capaian kinerja selama 4 tahun tersebut rata-rata sebesar 105% dengan kriteria **memuaskan**. Hal ini dapat dilihat pada gambar 3.5.



GAMBAR 3.5
PROFIL REALISASI DAN CAPAIAN "PERSENTASE OBAT MEMENUHI SYARAT"
TAHUN 2015, TAHUN 2016, TAHUN 2017 DAN TAHUN 2018

Hasil pengujian tahun 2018, dari 999 sampel yang diuji diperoleh hasil yang tidak memenuhi syarat sebanyak 1,70% (17 sampel dari 999 sampel), mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017. Pada tahun 2017 jumlah sampel obat yang tidak memenuhi syarat sebesar 2,9% (26 sampel dari 897 sampel). Hasil pengujian yang tidak memenuhi syarat tahun 2018 diperoleh dari sampel yang berasal dari sampel Obat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebanyak 9 sampel, sisanya berasal dari sampel non-JKN (5 sampel) dan sampel kasus (2 sampel).

Sampling Secara lengkap persentase hasil pengujian sampel JKN dan Non-JKN dibandingkan terhadap total sampel obat yang TMS dapat dilihat pada gambar 3.6.



GAMBAR 3.6
PROFIL HASIL PENGUJIAN TMS SAMPEL OBAT JKN TAHUN 2017 DAN TAHUN 2018

C. **Perbandingan Realisasi Kinerja Hingga Tahun 2018 Dengan Target Renstra Periode Tahun 2015-2019**

Capaian persentase Obat yang memenuhi syarat tahun 2018 telah melampaui target akhir tahun Renstra BBPOM di Bandung yaitu sebesar 94,00%. Apabila kita menghitung nilai pencapaian sasaran ini terhadap target akhir tahun Renstra tersebut, nilai pencapaiannya telah melebihi 100% yaitu sebesar 105%.



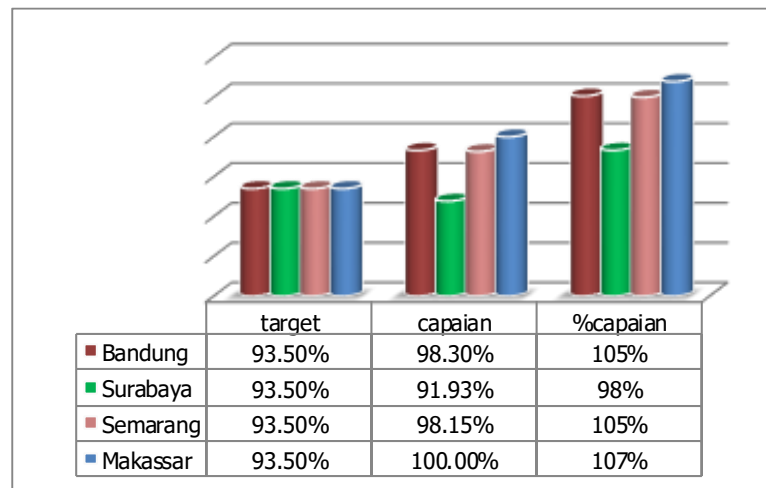
GAMBAR 3.7
PERBANDINGAN CAPAIAN TAHUN 2018 DENGAN TARGET TAHUN 2019 DAN TARGET NASIONAL TAHUN 2018 DAN TAHUN 2019
"PERSENTASE OBAT YANG MEMENUHI SYARAT"

D. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Dengan Target Nasional (Target Badan POM) /Balai Besar POM Lain**

Target persentase Obat yang memenuhi syarat tahun 2018 Balai Besar POM di Bandung telah disinkronkan dengan target Renstra Badan POM secara nasional yaitu 93,50%. Dengan demikian nilai pencapaian sasaran indikator ini bila dihitung terhadap target nasional memiliki nilai pencapaian sasaran yang sama yaitu sebesar 105%.

Apabila dibandingkan dengan Balai Besar POM provinsi lain dalam satu kluster yang memiliki beban kerja yang sama, capaian Balai Besar POM di Bandung tahun 2018 sudah sebanding dengan Balai Besar POM provinsi tersebut, bahkan dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur persentasenya lebih tinggi sebesar 7%.

Data lengkapnya dapat dilihat pada gambar 3.8.



GAMBAR 3.8
PERBANDINGAN TARGET DAN CAPAIAN BBPOM DI BANDUNG DENGAN BALAI BESAR POM
PROVINSI LAIN
"PERSENTASE OBAT YANG MEMENUHI SYARAT"

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Peningkatan pencapaian kinerja sasaran ini disebabkan oleh:

- Intensifikasi terhadap program sertifikasi Industri Farmasi meningkatkan pencapaian kesesuaian pemenuhan aspek CPOB
- Meningkatnya persentase pemenuhan CPOB pada sarana produksi. Pada tahun 2018 pemenuhan sarana produksi terhadap CPOB adalah sebesar 91,23%, sedangkan tahun 2017 sebesar 74,19%.
- Meningkatnya kemandirian industri farmasi melalui kegiatan *On Site Verification* dalam rangka Peningkatan Peran Serta Pelaku Usaha untuk Menerapkan Ketentuan yang Berlaku yang diadakan sebanyak 5 kali pada tahun 2018.
- Implementasi Peraturan Badan POM Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tata Cara Sertifikasi CDOB, yang menyatakan bahwa pemenuhan sertifikasi CDOB menjadi wajib dilaksanakan/mandatory. Hal tersebut menyebabkan meningkatnya jumlah sarana dalam hal ini Pedagang Besar Farmasi (PBF) yang memenuhi persyaratan/memenuhi kesesuaian aspek CDOB.
- Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan sosialisasi dalam rangka Program Mandatory Sertifikasi CDOB yang melibatkan pelaku usaha (khususnya PBF), semakin meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap pemenuhan aspek-aspek CDOB.

Walaupun capaian untuk indikator sasaran ini sudah meningkat, namun tetap harus dilakukan antisipasi agar tidak terjadi penurunan capaian dan meningkatkan capaiannya.

Alternatif solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- ☰ Intensifikasi pengawasan sarana produksi dan distribusi dalam pemenuhan CPOB dan CDOB.
- ☰ Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait, dalam rangka pembinaan terhadap sarana distribusi obat.
- ☰ Meningkatkan monitoring pelaksanaan *Corrective Action Preventive Action* (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan.
- ☰ Meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) serta Iklan Layanan Masyarakat (ILM).

F. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dalam rangka Program Mandatory Sertifikasi CDOB yang melibatkan pelaku usaha (khususnya PBF). Hal tersebut dilaksanakan agar semakin meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap pemenuhan aspek-aspek CDOB. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut rekomendasi perbaikan kinerja untuk meningkatkan intensitas dan kualitas sosialisasi pemahaman CDOB untuk sarana distribusi obat.

G. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.3.

3.1.1.3 PERSENTASE OBAT TRADISIONAL YANG MEMENUHI SYARAT

TABEL 3.6
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
"PERSENTASE OBAT TRADISIONAL YANG MEMENUHI SYARAT" TAHUN 2018

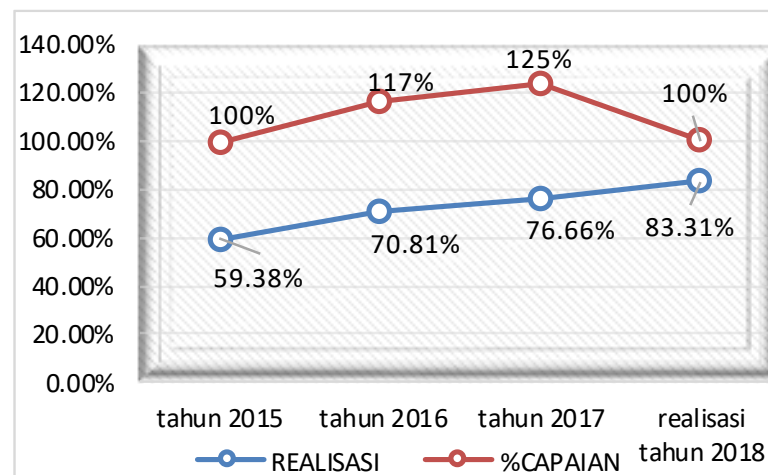
Indikator Sasaran	2018		Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)	Kriteria Penilaian	
	Target	Realisasi			
Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	83.00%	83.31%	100%	Baik	

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja tahun 2018

Pada tahun 2018, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 83.00%. Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat pada tahun 2018 sebesar 83.31%, dengan rincian jumlah sampel yang diuji sebanyak 647 sampel, yang memenuhi syarat sebanyak 539 sampel. Dengan demikian capaian indikator sasaran ini adalah sebesar **100%** dengan kriteria **Baik**.

B. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018 Dengan Tahun 2015, Tahun 2016 dan Tahun 2017

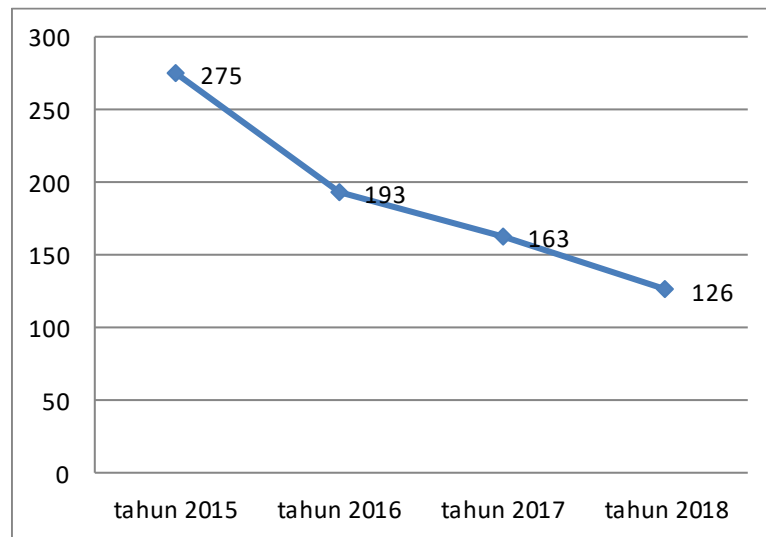
Capaian persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat di Provinsi Jawa Barat tahun 2018 (83.31%) terjadi kenaikan apabila dibandingkan terhadap tahun 2015 (59,38%), tahun 2016 (70,81%), dan tahun 2017 (76,66%). Pada gambar 3.9 terlihat tren kenaikan realisasi persentase obat tradisional yang memenuhi syarat, namun terjadi sedikit penurunan pada persentase pencapaian tahun 2018. Analisis terkait hal ini akan dibahas pada poin selanjutnya.



GAMBAR 3.9
PROFIL REALISASI DAN CAPAIAN "PERSENTASE OBAT TRADISIONAL MEMENUHI SYARAT"
TAHUN 2015, TAHUN 2016, TAHUN 2017 DAN TAHUN 2018

Pada tahun 2018, hasil pengujian Obat Tradisional yang TMS sebagian besar adalah TMS parameter angka lempeng total (ALT), yaitu 73 dari 108 sampel TMS (68%). Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi penurunan jumlah sampel Obat Tradisional TMS, hal ini dikarenakan adanya surat edaran No. HK.04.02.42.421.11.17.1628 tanggal 30 November 2017 tentang Batas Maximum Angka Lempeng Total dan Angka Kapang Khamir untuk Obat Bahan Alam dengan Bentuk Sediaan Rajangan dan Bentuk Simplisia yang diseduh dengan air panas sebelum digunakan, dimana batas kriteria penerimaan sampel untuk Angka Lempeng Total menjadi lebih besar yang sebelumnya $<1 \times 10^6$ koloni/gram menjadi $\leq 5 \times 10^7$ koloni/gram. Hal tersebut berdampak cukup signifikan terhadap penurunan jumlah sampel Obat Tradisional yang TMS.

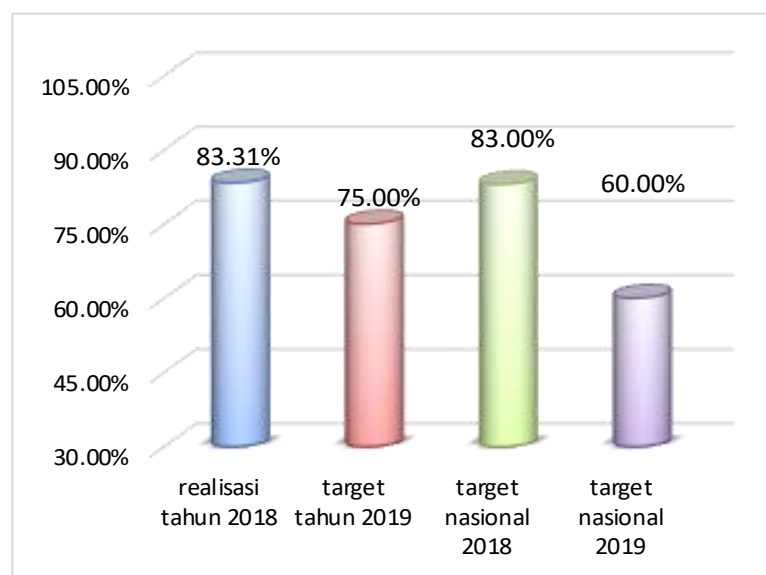
Hasil pengujian Obat Tradisional tidak memenuhi syarat secara lengkap dapat dilihat pada gambar 3.10.



GAMBAR 3.10
JUMLAH SAMPEL OBAT TRADISIONAL YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT
TAHUN 2015, TAHUN 2016, TAHUN 2017 DAN TAHUN 2018

C. Perbandingan Realisasi Kinerja hingga tahun 2018 dengan target Renstra periode tahun 2015-2019

Target persentase Obat Tradisional akhir tahun Renstra 2019 adalah sebesar 75%. Apabila kita hitung nilai capaian tahun 2018 (83,31%) terhadap target tersebut maka capaiannya telah melebihi 100% yaitu 111%. Data ini menunjukkan bahwa target akhir tahun Renstra 2015 - 2019 telah terlampaui. Namun hal ini tidak menjadikan BBPOM di Bandung menurunkan kinerjanya dalam pengawasan Obat Tradisional.

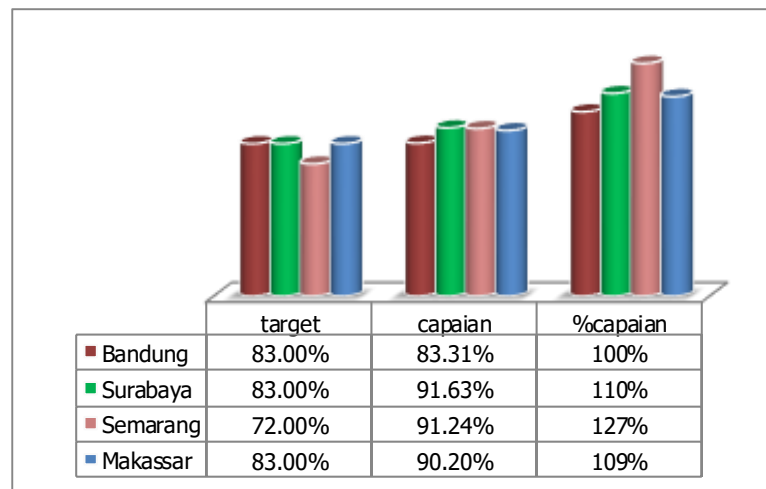


GAMBAR 3.11
PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2018 DENGAN TARGET TAHUN 2019 DAN TARGET NASIONAL TAHUN 2018 DAN TAHUN 2019 "PERSENTASE OBAT TRADISIONAL YANG MEMENUHI SYARAT"

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Dengan Target Nasional (Target Badan POM) /Balai Besar POM Lain

Target persentase Obat Tradisional tahun 2018 secara nasional adalah sebesar 83,00%. Jika kita bandingkan nilai capaian tahun 2018 Balai Besar POM di Bandung terhadap target nasional, maka nilai capaiannya adalah sebesar 100%, namun tetap harus dilakukan langkah-langkah yang komprehensif untuk meningkatkan pencapaian sasaran.

Apabila dibandingkan dengan Balai Besar POM provinsi lain yang memiliki beban kerja yang sama, Balai Besar POM di Bandung memiliki target dan capaian yang masih relatif rendah. Hal tersebut menjadi tantangan untuk lebih meningkatkan kinerjanya terkait indikator sasaran strategis ini. Data lengkapnya dapat dilihat pada gambar 3.12.



GAMBAR 3.12
PERBANDINGAN TARGET DAN CAPAIAN BALAI BESAR POM DI BANDUNG DENGAN BALAI BESAR POM PROVINSI LAIN
"PERSENTASE OBAT TRADISIONAL YANG MEMENUHI SYARAT"

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Peningkatan pencapaian kinerja sasaran ini disebabkan oleh:

- ☛ Meningkatnya penerapan/pemenuhan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) dari Industri Obat Tradisional (IOT), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) dan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT). Pada tahun 2018, persentase sarana produksi IOT/IEBA dan UKOT/UMOT yang tidak memenuhi ketentuan adalah 39,58% menurun dibandingkan pada tahun 2017, persentase IOT dan IKOT yang tidak memenuhi ketentuan sebesar 70,90%. Pada tahun 2018, ditemukan 19 sarana produksi Industri Obat Tradisional yang tidak memenuhi ketentuan dari 48 sarana yang diperiksa (IOT/IEBA : 1 sarana dan UKOT/UMOT : 18 sarana).
- ☛ Program Sertifikasi CPOTB bertahap sangat membantu pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan pemenuhan aspek CPOTB yang dibutuhkan

- ☛ Peningkatan kualitas pemberantasan produk Tanpa Izin Edar serta penerapan sanksi yang efektif, mampu menekan penyimpangan di sarana produksi obat tradisional. Terkait hal tersebut diatas, maka alternatif solusi yang harus dilakukan dalam rangka mempertahankan atau meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:
- ☛ Intensifikasi pengawasan sarana produksi dalam pemenuhan CPOTB.
- ☛ Peningkatan kegiatan sosialisasi tentang peraturan terkait Obat Tradisional kepada pelaku usaha dan masyarakat, termasuk penyebaran informasi kepada stakeholder dan masyarakat tentang adanya Public Warning obat tradisional yang diterbitkan oleh Badan POM.
- ☛ Peningkatan kerjasama dengan stakeholder terkait tindak lanjut hasil pengawasan sarana produksi dan sarana distribusi Obat Tradisional.

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.3.

3.1.1.4 PERSENTASE KOSMETIK YANG MEMENUHI SYARAT

TABEL 3.7
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
"PERSENTASE KOSMETIK YANG MEMENUHI SYARAT" TAHUN 2018

Indikator Sasaran	2018		Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)	Kriteria Penilaian	
	Target	Realisasi			
Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	92,00	99.38	108%	Memuaskan	

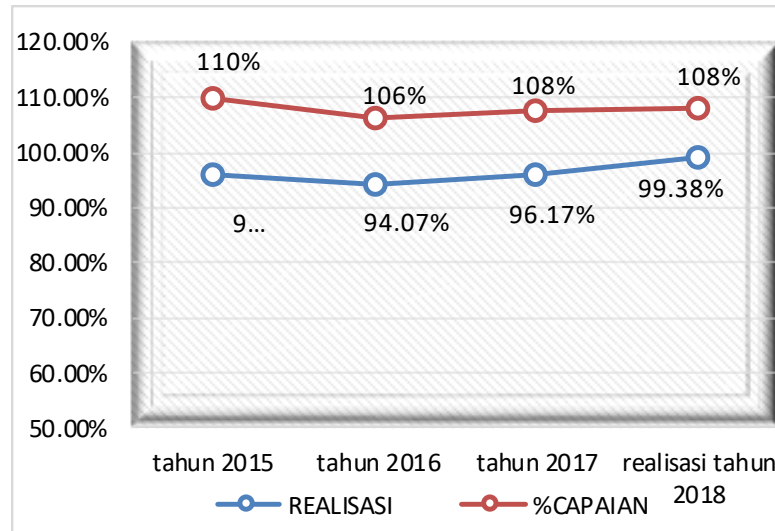
A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja tahun 2018

Pada tahun 2018, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 92,00%. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat pada tahun 2018 sebesar 99.38%, dengan rincian jumlah sampel yang diuji sebanyak 1.298 sampel, yang memenuhi syarat sebanyak 1.290 sampel. Dengan demikian capaian indikator sasaran ini adalah sebesar **108%** dengan kriteria **Memuaskan**.

B. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018 Dengan Tahun 2015, Tahun 2016 dan tahun 2017

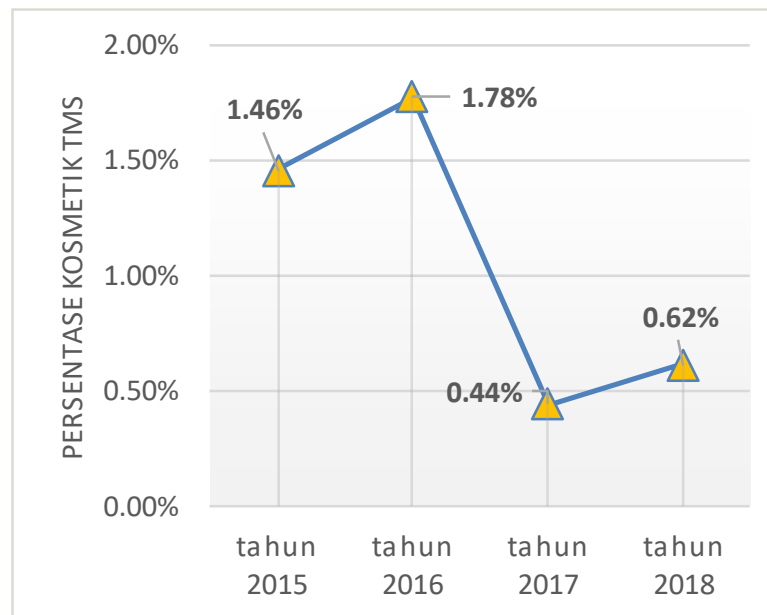
Apabila kita membandingkan capaian persentase Kosmetik yang memenuhi syarat di Provinsi Jawa Barat tahun 2018 (99.38%) terhadap tahun 2015 (95,90%), tahun 2016 (94,07%) dan tahun 2017 (96,17%), maka terjadi kenaikan capaian kosmetik yang memenuhi syarat.

Profil Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat tahun 2015 s.d tahun 2018 dapat dilihat pada gambar 3.13.



GAMBAR 3.13
 PROFIL PERSENTASE KOSMETIK YANG MEMENUHI SYARAT
 TAHUN 2015, TAHUN 2016, TAHUN 2017 DAN TAHUN 2018

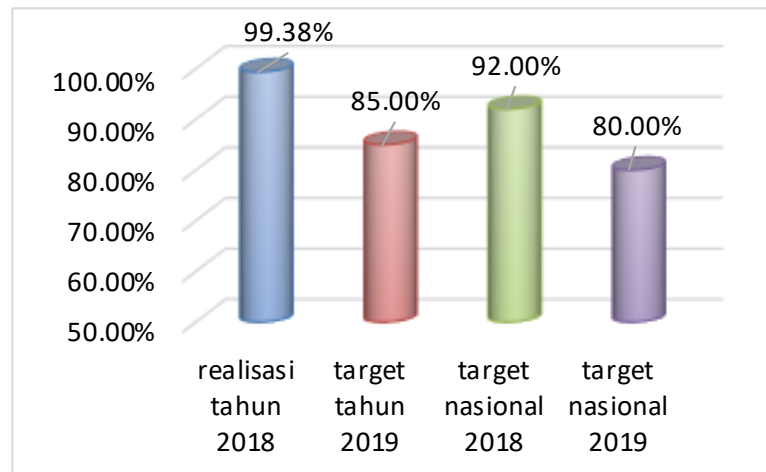
Hasil pengujian Kosmetik pada tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017 terjadi peningkatan sampel yang TMS sebesar 0,18% (tahun 2018 : 0,62%, tahun 2017 : 0,44%). Profil hasil pengujian Kosmetik tidak memenuhi syarat secara lengkap dapat dilihat pada gambar 3.14.



GAMBAR 3.14
 PROFIL PERSENTASI SAMPEL KOSMETIK YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT
 TAHUN 2015, TAHUN 2016, TAHUN 2017 DAN TAHUN 2018

C. **Perbandingan Realisasi Kinerja Hingga Tahun 2018 Dengan Target Renstra Periode Tahun 2015-2019**

Target persentase Kosmetik akhir tahun Renstra 2015 - 2019 adalah sebesar 85%. Apabila kita hitung nilai capaian tahun 2018 terhadap target tersebut maka capaiannya adalah sebesar 117%. Capaian persentase Kosmetik yang memenuhi syarat tahun 2018 telah melampaui target akhir tahun Renstra BBPOM di Bandung.

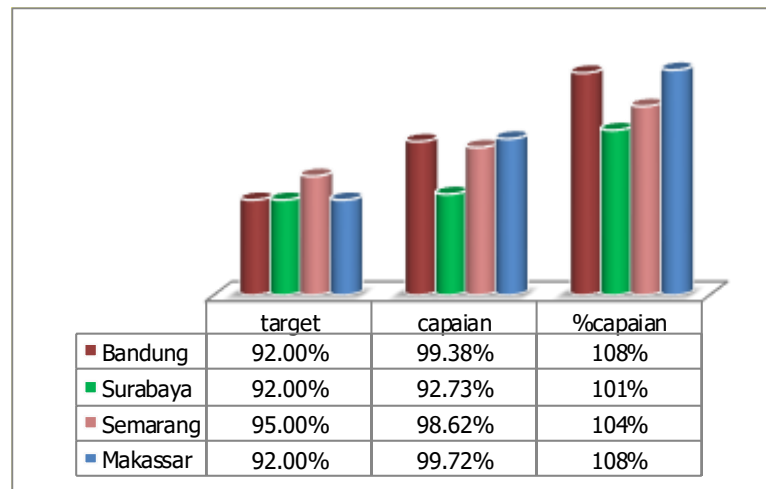


GAMBAR 3.15
PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2018 DENGAN TARGET TAHUN 2019 DAN TARGET NASIONAL TAHUN 2018 DAN TAHUN 2019
"PERSENTASE KOSMETIK YANG MEMENUHI SYARAT"

D. **Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2018 dengan target nasional (target Badan POM)/ Balai Besar POM lain**

Target persentase Kosmetik tahun 2018 secara nasional adalah sebesar 92,00%. Jika kita bandingkan nilai capaian tahun 2018 Balai Besar POM di Bandung terhadap target nasional tahun 2018, maka nilai capaiannya adalah sebesar 108% dengan kriteria memuaskan.

Apabila dibandingkan dengan capaian Balai Besar POM provinsi lain dalam satu kluster yang memiliki beban kerja yang sama, capaian sasaran kosmetik yang memenuhi syarat lebih tinggi dibandingkan BBPOM di Surabaya dan Semarang, namun memiliki capaian yang sma dibandingkan BBPOM di Makassar. Ketiga Balai tersebut mendapatkan kriteria sama yaitu memuaskan untuk persen capaiannya.



GAMBAR 3.16
PERBANDINGAN TARGET DAN CAPAIAN BBPOM DI BANDUNG DENGAN BALAI BESAR POM
PROVINSI LAIN
“PERSENTASE KOSMETIK YANG MEMENUHI SYARAT”

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Faktor-faktor yang berdampak terhadap meningkatnya pencapaian kinerja sasaran ini disebabkan oleh:

- Meningkatnya pemahaman dari produsen kosmetik terhadap peraturan terkait Kosmetik dan penerapan Cara Produksi Kosmetik yang Baik (CPKB). Pada tahun 2018, pemenuhan persyaratan CPKB dari Industri Kosmetik yang diperiksa sebesar 32,14% (18 sarana dari 56 sarana). Terjadi peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2016 sebesar 13,58% (8 sarana dari 58 sarana) dan tahun 2017 sebesar 20,37% (9 sarana dari 54 sarana).
- Program pengawasan terhadap produk Kosmetik yang beredar lebih intensif, antara lain melalui kegiatan rencana aksi penertiban kosmetika ilegal dan TMS, serta operasi gabungan daerah dan nasional.
- Peningkatan kualitas pemberantasan produk Tanpa Izin Edar serta penerapan sanksi yang efektif, mampu menekan penyimpangan di sarana produksi dan distribusi kosmetika.
- Peningkatan sosialisasi terhadap pelaku usaha UMKM yang lebih intensif berdampak meningkatkan kesesuaian sarana.

Terkait hal tersebut diatas, maka alternatif solusi yang harus dilakukan dalam rangka mempertahankan atau meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- Intensifikasi pembinaan penerapan CPKB termasuk fokus khusus penandaan kosmetik terhadap sarana produksi Kosmetik.
- Pembinaan dan penyebaran informasi terhadap sarana distribusi Kosmetik serta masyarakat tentang Kosmetik yang memenuhi ketentuan.

- Peningkatan kerjasama dengan stakeholder terkait dalam pengawasan sarana produksi dan distribusi Kosmetik.
- Penerapan sanksi, baik administratif atau pro justicia, terhadap sarana produksi dan distribusi yang memproduksi/mendistribusikan Kosmetik Tanpa Ijin Edar (TIE)/dilarang beredar.

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.3.

3.1.1.5 PERSENTASE SUPLEMEN KESEHATAN YANG MEMENUHI SYARAT

TABEL 3.8
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
"PERSENTASE SUPLEMEN KESEHATAN YANG MEMENUHI SYARAT" TAHUN 2018

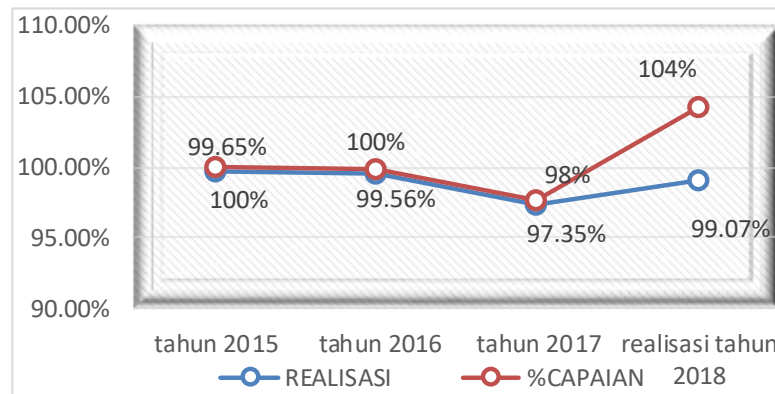
Indikator Sasaran	2018		Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)	Kriteria Penilaian	
	Target	Realisasi			
Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	95,00	99,07%	104%	Memuaskan	

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja tahun 2018

Pada tahun 2018, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 95,00%. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat pada tahun 2018 sebesar 99,07%, dengan rincian jumlah sampel yang diuji sebanyak 216 sampel, yang memenuhi syarat sebanyak 214 sampel. Dengan demikian capaian indikator sasaran ini adalah sebesar **104%** dengan kriteria **Memuaskan**.

B. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2018 dengan tahun 2015 tahun 2016 dan tahun 2017

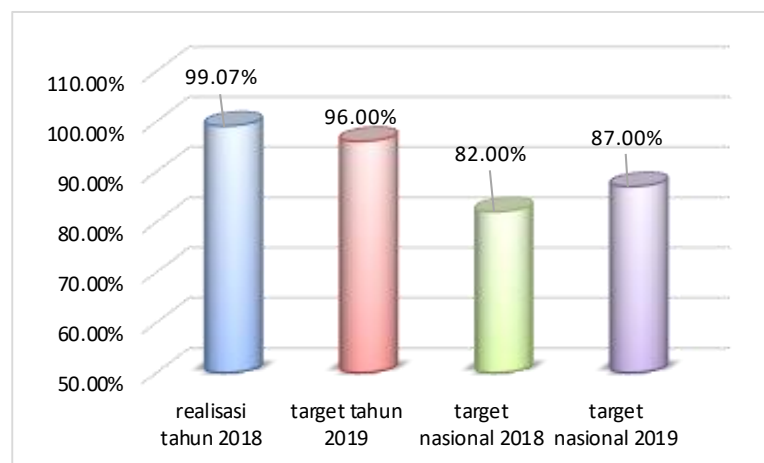
Apabila kita membandingkan capaian persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat di Provinsi Jawa Barat tahun 2018 (99,07%) terhadap tahun 2017 (97,35%), tahun 2016 (99,56%) dan tahun 2015 (99,65%), terjadi peningkatan sebesar 1,72% terhadap tahun 2017, namun masih di bawah persentase tahun 2016 dan 2015.



GAMBAR 3.17
 PROFIL PERSENTASE SUPLEMEN KESEHATAN YANG MEMENUHI SYARAT
 TAHUN 2015, TAHUN 2016, TAHUN 2017 DAN TAHUN 2018

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Hingga Tahun 2018 Dengan Target Renstra Periode Tahun 2015-2019

Target persentase Suplemen Kesehatan akhir tahun Renstra 2015 - 2019 adalah sebesar 96%. Apabila kita hitung nilai capaian tahun 2018 terhadap target tersebut maka capaiannya adalah sebesar 104%.



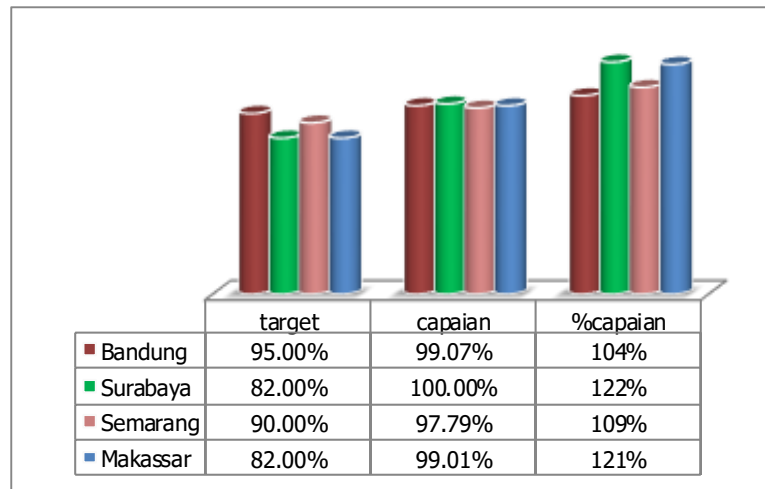
GAMBAR 3.18
 PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2018 DENGAN TARGET TAHUN 2019 DAN TARGET NASIONAL TAHUN 2018 DAN TAHUN 2019
 "PERSENTASE SUPLEMEN KESEHATAN YANG MEMENUHI SYARAT"

D. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2018 dengan target nasional (Target Badan POM)/ Balai Besar POM lain

Target persentase Suplemen Kesehatan tahun 2018 secara nasional adalah sebesar 82%. Jika kita bandingkan nilai capaian tahun 2018 Balai Besar POM di Bandung terhadap target nasional, maka nilai capaiannya sudah tinggi, yaitu sebesar 119%.

Capaian Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat pada tahun 2018 memiliki nilai capaian yang paling rendah dibandingkan 3 balai provinsi lainnya, meskipun kriterianya

memuaskan dan sama dengan balai yang lainnya. Hal tersebut menjadi faktor pendorong untuk meningkatkan kinerja Balai Besar POM di Bandung pada tahun yang akan datang. Data lengkapnya dapat dilihat pada gambar 3.19.



GAMBAR 3.19
PERBANDINGAN TARGET DAN CAPAIAN BALAI BESAR POM DI BANDUNG DENGAN BALAI BESAR POM LAIN
"PERSENTASE SUPLEMEN KESEHATAN YANG MEMENUHI SYARAT"

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Kenaikan pencapaian kinerja sasaran ini disebabkan oleh:

- ☰ Meningkatnya kepatuhan produsen Suplemen Kesehatan terhadap pedoman GMP pada tahun 2018 yaitu sebesar 42,86% (3 sarana memenuhi ketentuan dari 7 sarana yang diperiksa) dibandingkan pada tahun 2017 yaitu sebesar 33,34%.
- ☰ Produsen Suplemen Kesehatan adalah Industri Farmasi yang secara teknis sudah memiliki kesesuaian terhadap aspek pemenuhan CPOB.
- ☰ Peningkatan kualitas pemberantasan produk Tanpa Izin Edar serta penerapan sanksi yang efektif, mampu menekan penyimpangan di sarana produksi obat tradisional

Terkait hal tersebut diatas, maka alternatif solusi yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- ☰ Intensifikasi pengawasan penerapan GMP terhadap sarana produksi Suplemen Kesehatan.
- ☰ Intensifikasi pengawasan terhadap peredaran Suplemen Kesehatan Tanpa Ijin Edar (TIE) dan atau yang tercantum dalam Public Warning Badan POM.
- ☰ Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait, dalam rangka pembinaan terhadap sarana distribusi.

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.3.

3.1.1.6 PERSENTASE MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT

TABEL 3.9
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
"PERSENTASE MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT" TAHUN 2018

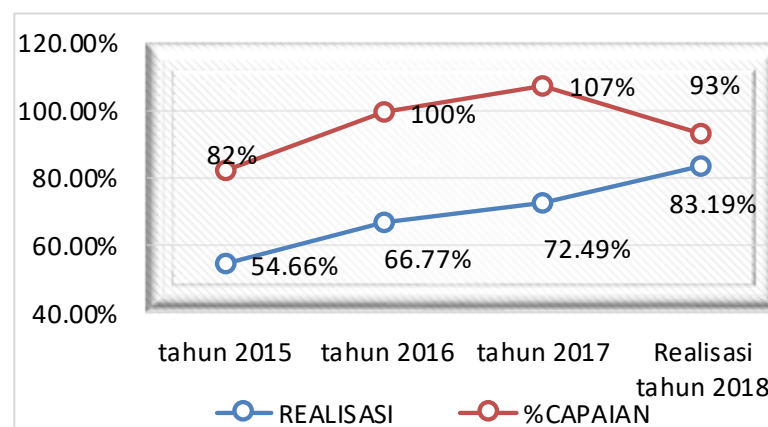
Indikator Sasaran	2018		Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)	Kriteria Penilaian
	Target	Realisasi		
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	89,60	83.19	93%	Cukup

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja tahun 2018

Pada tahun 2018, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 89,60%. Persentase Makanan yang memenuhi syarat pada tahun 2018 sebesar 83.19%, dengan rincian jumlah sampel yang diuji sebanyak 1356 sampel, yang memenuhi syarat sebanyak 1128 sampel. Dengan demikian capaian indikator sasaran ini adalah sebesar 93% dengan kriteria Cukup.

B. Perbandingan Realisasi dan Capaian tahun 2018 dengan tahun 2015, tahun 2016 dan tahun 2017

Apabila kita membandingkan capaian persentase Makanan yang memenuhi syarat di Provinsi Jawa Barat tahun 2018 (83.19%) terhadap tahun 2015 (54,66%) dan tahun 2016 (66,77%) dan tahun 2017 (72,49%) terjadi peningkatan.

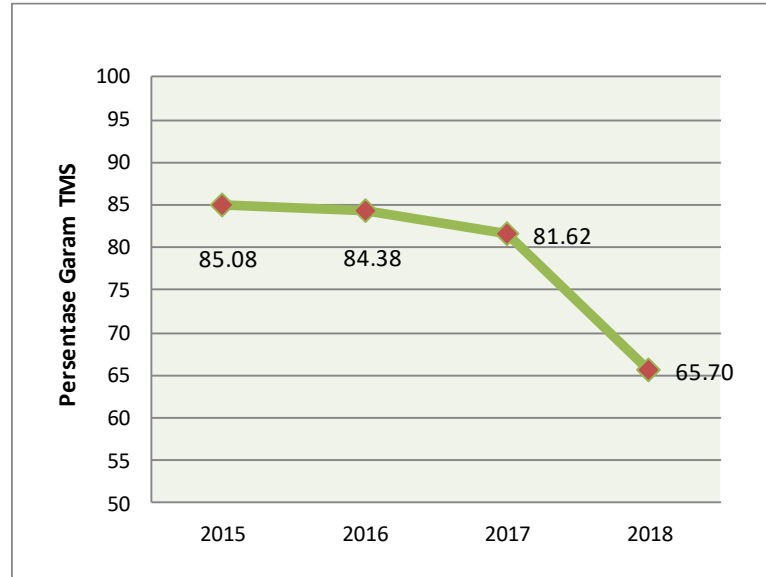


GAMBAR 3.20
PROFIL PERSENTASE MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT
TAHUN 2015, TAHUN 2016, TAHUN 2017 DAN TAHUN 2018

Sampel yang tidak memenuhi syarat sebagian besar adalah sampel yang berasal dari sampel Pangan Rutin dan sampel Fortifikasi Garam Beryodium serta tepung terigu. Hasil

pengujian garam berkontribusi sangat besar terhadap sampel pangan yang tidak memenuhi syarat. Namun tahun 2018 terjadi penurunan yang sangat signifikan dari persentase sampel garam yang TMS, dari semula 85,08% (tahun 2015) menjadi 65,70% (tahun 2018) terhadap sampel garam yang masuk.

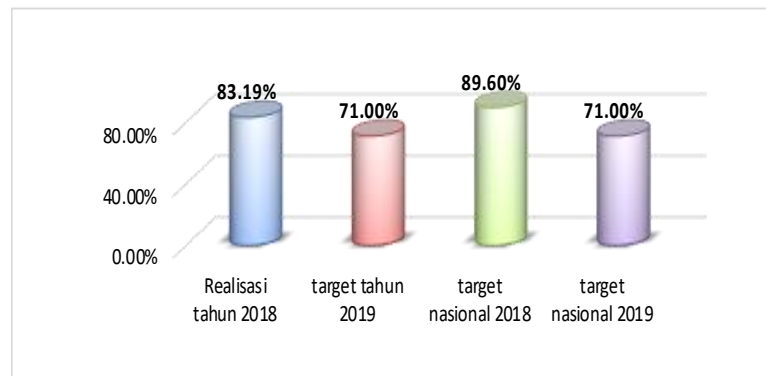
Profil hasil pengujian garam yang tidak memenuhi syarat dapat dilihat pada gambar 3.21.



GAMBAR 3.21
PROFIL HASIL PENGUJIAN GARAM YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT
TAHUN 2015, TAHUN 2016, TAHUN 2017 DAN TAHUN 2018

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Hingga Tahun 2018 Dengan Target Renstra Periode Tahun 2015-2019

Target persentase Makanan akhir tahun Renstra 2019 adalah sebesar 71,00%. Apabila kita hitung realisasi tahun 2018 (83.19%) terhadap target akhir tahun Renstra maka capaiannya mencapai 117%.

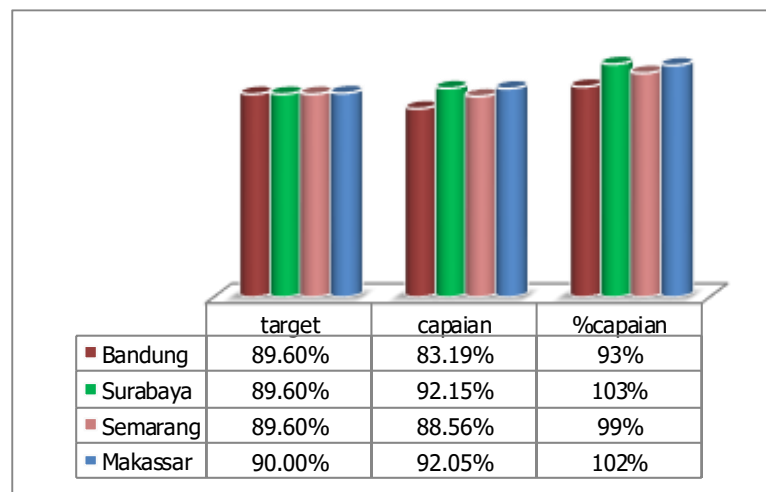


GAMBAR 3.22
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2018 DENGAN TARGET TAHUN 2019 DAN
TARGET NASIONAL TAHUN 2018 DAN TAHUN 2019
"PERSENTASE MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT"

D. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2018 dengan target nasional (target Badan POM)/ Balai Besar POM lain

Target persentase Makanan tahun 2018 secara nasional adalah sebesar 89,60%. Jika kita bandingkan realisasi tahun 2018 Balai Besar POM di Bandung (83.19%) terhadap target nasional (89,60%), maka nilai capaiannya sebesar 93%.

Jika dibandingkan dengan Balai Besar POM provinsi lain dalam kluster yang sama dengan beban kerja yang sama, capaian Balai Besar POM di Bandung masih lebih rendah dibandingkan dengan ketiga Balai Besar POM provinsi lain tersebut. Data lengkapnya dapat dilihat pada gambar 3.23.



GAMBAR 3.23
PERBANDINGAN TARGET DAN CAPAIAN BALAI BESAR POM DI BANDUNG DENGAN BALAI BESAR POM LAIN
"PERSENTASE MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT"

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Ketidakberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini disebabkan oleh:

- ☛ Pada tahun 2018, terdapat peningkatan sampel fortifikasi sebanyak 212 sampel dengan rincian 172 sampel garam beryodium, 20 sampel tepung terigu, dan 20 sampel minyak goreng dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2017 sebanyak 148 sampel.
- ☛ Pada tahun 2018, sampling produk garam dilakukan di Kabupaten Cirebon sesuai dengan Pedoman Sampling Obat dan Makanan dimana pada daerah tersebut terdapat banyak peredaran garam lokal yang belum memenuhi ketentuan terkait label dan mutu.

Terkait hal tersebut diatas, maka alternatif solusi yang harus dilakukan dalam rangka mempertahankan atau meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- ☛ Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap produk makanan yang memenuhi standar melalui penyebaran informasi yang intensif baik melalui

sosialisasi langsung kepada masyarakat atau melalui media massa baik cetak maupun elektronik.

- ☛ Meningkatkan pembinaan terhadap sarana produksi makanan terkait pemenuhan CPPOB.
- ☛ Meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap distributor dan penjual retail produk makanan mengenai Makanan yang memenuhi ketentuan.
- ☛ Peningkatan kerjasama dengan *stakeholder* terkait pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi makanan.

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.3.

PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN KEGIATAN KE-SATU

Dalam mendukung tercapainya sasaran kegiatan ke satu, yaitu Terwujudnya Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu di wilayah kerja BBPOM Bandung dilaksanakan program pengawasan Obat dan Makanan melalui kegiatan sampling dan pengujian Obat dan Makanan. Kegiatan sampling dan pengujian adalah kegiatan pengawasan *postmarket* yang merupakan salah satu bentuk pengawasan terhadap mutu obat yang beredar di masyarakat. Untuk pengawasan mutu produk yang beredar dilakukan dengan cara sampling dan pengujian. Produk yang disampling berdasarkan risiko dan keterwakilan produk yang beredar kemudian dilakukan uji laboratorium guna mengetahui apakah produk obat tersebut telah memenuhi syarat keamanan, khasiat/manfaat dan mutu.

1. Sampling Obat Yang Diuji Dengan Parameter Kritis

Pada tahun 2018, jumlah sampel Obat yang disampling sebanyak 999 sampel dan yang selesai diuji sebanyak 999 sampel. Metode sampling pada tahun 2018 sama dengan tahun 2017, yaitu metode secara acak/*random* berdasarkan kaidah statistika namun tetap mempertimbangkan justifikasi profesional dalam rangka menjamin keamanan, mutu, dan khasiat obat yang beredar dan metode sampling *purposive-targetted*. Item obat yang disampling ditentukan berdasarkan kelas terapi dengan proporsi yang telah ditentukan. Persentase sampling random tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2018 mengalami perubahan, pada tahun 2017 acak/*random* sebesar 90%, sedangkan tahun 2018 sebanyak 45%. Sampling obat JKN dilaksanakan dengan metode *purposive-targetted* sedangkan sampel non-JKN secara acak random. Sampling Obat berdasarkan kriteria JKN dan non-JKN dilaksanakan mulai tahun 2017, sehingga data perbandingan hasil pengujian sampel Obat JKN dan Non-JKN hanya menampilkan data tahun 2017 dan tahun 2018.



Pada tahun 2018, pelaksanaan sampling obat rutin tercapai 100%, yaitu sebanyak 999 sampel dari target yang ditetapkan sebesar 999 sampel. Berdasarkan Pedoman Sampling Tahun 2018, sampel yang disampling terdiri dari komoditi produk obat dan NAPZA. Sampel obat yang disampling meliputi sampel JKN sebanyak 534 sampel, sampel Non JKN sebanyak 405 sampel, sampel ruang lingkup sebanyak 20 sampel dan sampel kasus sebanyak 40 sampel.

Sampling Obat JKN terdiri dari sampling JKN Hulu sebanyak 241 sampel dan sampling JKN Hilir sebanyak 293 sampel. Pelaksanaan Sampling JKN Hulu dilakukan di 27 IFK Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Barat dan 1 IFK Provinsi Jawa Barat dengan total sebanyak 209 sampel. Selain itu, sampling JKN Hulu dilakukan di Pabrik Farmasi sebanyak 26 sampel dan PBF Pemenang e-katalog sebanyak 6 sampel. Sedangkan pelaksanaan sampling Non JKN dilaksanakan dengan metoda Acak/Random yang dilakukan pada 8 Kabupaten/Kota terpilih (Kab. Bandung Barat, Kab. Bandung, Kab. Garut, Kab. Sumedang, Kota Tasikmalaya, Kab. Cianjur, Kota Sukabumi dan Kota Bekasi) dan Ibu Kota Provinsi (Kota Bandung). Sarana untuk sampling Acak/Random dilakukan di Rumah Sakit, Puskesmas, Apotek, Klinik, dan Toko Obat.

Seluruh sampel yang disampling telah diuji sesuai dengan parameter kritis yang ditetapkan dalam pedoman sampling dan pengujian tahun 2018.

Pelaksanaan kegiatan sampling dan pengujian obat telah memenuhi target yang ditetapkan sehingga dapat mendukung pencapaian indikator kinerja presentase obat yang memenuhi syarat.

2. Sampling Obat Tradisional Yang Diuji Dengan Parameter Kritis

Jumlah sampel Obat Tradisional tahun 2018 sebanyak 647 sampel dari target yang ditetapkan sebesar 647 sampel, terdiri dari 259 sampel *surveillance*, 194 sampel *compliance*, dan 194 sampel lokal spesifik. Capaian kinerja sampling obat tradisional pada tahun 2018 adalah 100 %.

Sampel *compliance* tercapai 194 sampel (100,00%) dari target 194 sampel. Namun, terdapat target sampel yang tidak terpenuhi sebanyak satu sampel yaitu obat tradisional dengan klaim mengobati penyakit cacangan karena tidak ada di peredaran sehingga dialihkan ke klaim khasiat yang lainnya. Selain itu, jenis sampel lokal spesifik yang tidak memenuhi target prioritas sampling adalah sampel dari sarana Pengobatan Tradisional (Batra) karena jumlah sampel di setiap sarana Batra tidak mencukupi untuk pengujian sehingga dialihkan ke kelompok jenis sampel yang lainnya. Dengan dilakukannya penyesuaian terhadap target awal sehingga jumlah sampling obat tradisional dapat tercapai. Hal ini mendukung juga pencapaian indikator kinerja persentase obat tradisional yang memenuhi syarat.

3. **Sampling Kosmetika Yang Diuji Dengan Parameter Kritis**

Target sampel kosmetika pada tahun 2018 sebesar 1.295 sampel dengan realisasinya sebanyak 1.298 sampel dengan rincian sampel surveillance sebanyak 650 sampel dari target 650 sampel (100,00%), sampel compliance sebanyak 257 sampel dari target 257 sampel (100,00%) dan sampel lokal spesifik sebanyak 391 sampel dari target 388 sampel (100,77%). Capaian kinerja sampling kosmetika pada tahun 2018 sebesar 100,23 %. Sampel lokal spesifik melebihi target karena terdapat kelebihan sampel kasus kosmetik pada akhir Desember tahun 2018. Namun hal tersebut tidak berdampak terhadap capaian indikator kinerja kosmetika yang memenuhi syarat.

4. **Sampling Suplemen Kesehatan Yang Diuji Dengan Parameter Kritis**

Dari 216 sampel suplemen kesehatan yang direncanakan sebagai target sampling pada tahun 2018, telah terealisasi sebanyak 216 sampel terdiri dari *surveillance* sebanyak 86 sampel (100,00%) dari target 86 sampel, sampel *compliance* sebanyak 65 sampel (100,00%) dari target 65 sampel dan sampel lokal spesifik sebanyak 65 sampel (100,00%) dari target 65 sampel. Pencapaian kinerja sampling suplemen kesehatan pada tahun 2018 sebesar 100%. Pada tahun 2018 terdapat sampel *compliance* yang tidak memenuhi target yaitu bentuk sediaan kapsul. Hal ini disebabkan oleh merk produk di pasaran terbatas, dan ketersediaan jumlah tidak mencukupi untuk pengujian dan dialihkan ke sediaan tablet. Dengan penyesuaian tersebut maka target pencapaian sampling suplemen kesehatan dapat tercapai sehingga menunjang indikator kinerja persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat.

5. **Sampling Makanan Yang Diuji Dengan Parameter Kritis**

Pada tahun 2018, realisasi sampel makanan sebanyak 1.356 sampel dari target yang ditetapkan sebesar 1.350 sampel. Capaian kinerja sampling makanan yang diuji dengan parameter kritis adalah 100,44%. Sampel makanan yang disampling terdiri dari sampel fortifikasi pangan sebanyak 212 sampel (100%) dengan rincian sampel garam beryodium sebanyak 172 sampel, tepung terigu sebanyak 20 sampel, minyak goreng sebanyak 20 sampel, sampel Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) rutin dilakukan sebanyak 16 sampel (100%) yang dilaksanakan di 4 SD di Kota Bandung, sampel pangan untuk uji DNA babi sebanyak 9 sampel yang proses pengujiannya dilakukan oleh Balai Besar POM di Banda Aceh, dan sampel kemasan pangan terdiri sampel melamin dan keramik sebanyak 3 sampel.

Pada tahun 2018, sampling fortifikasi produk garam dilakukan di Kabupaten Cirebon sesuai dengan Pedoman Sampling Obat dan Makanan dimana pada daerah tersebut terdapat banyak peredaran garam lokal yang belum memenuhi ketentuan terkait label

dan mutu. Hal tersebut berdampak terhadap pencapaian indikator presentase makanan yang memenuhi syarat.

3.1.2 SASARAN KEGIATAN KE-2: MENINGKATNYA KEPATUHAN PELAKU USAHA DAN KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP KEAMANAN, MANFAAT DAN MUTU OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BALAI BESAR/BALAI POM DI BANDUNG

Kepatuhan merupakan suatu bentuk keberterimaan dalam melaksanakan berbagai aktivitas yang bersifat profit/non profit sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan Obat dan Makanan. Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu obat dan makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung merupakan salah satu indikator kegiatan dalam mendukung program pengawasan Obat dan Makanan. Keberhasilan sasaran kegiatan ini untuk tahun 2018 diukur dari satu indikator yaitu Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan. Indeks kepatuhan dihitung menggunakan metodologi statistik dan *Analitycal Hierarchy Process* (AHP) untuk pembobotan indikator kinerja pembentuk indeks. Hasil capaian dapat dilihat pada tabel 3.10

TABEL 3.10
CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-2 TAHUN 2018

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA	
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar/Balai POM di Bandung	Indeks Kepatuhan (<i>Compliance Index</i>) Pelaku Usaha Di Bidang Obat Dan Makanan Di Wilayah Kerja BBPOM Bandung	60	83,71	140	Tidak Dapat Disimpulkan	

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja tahun 2018

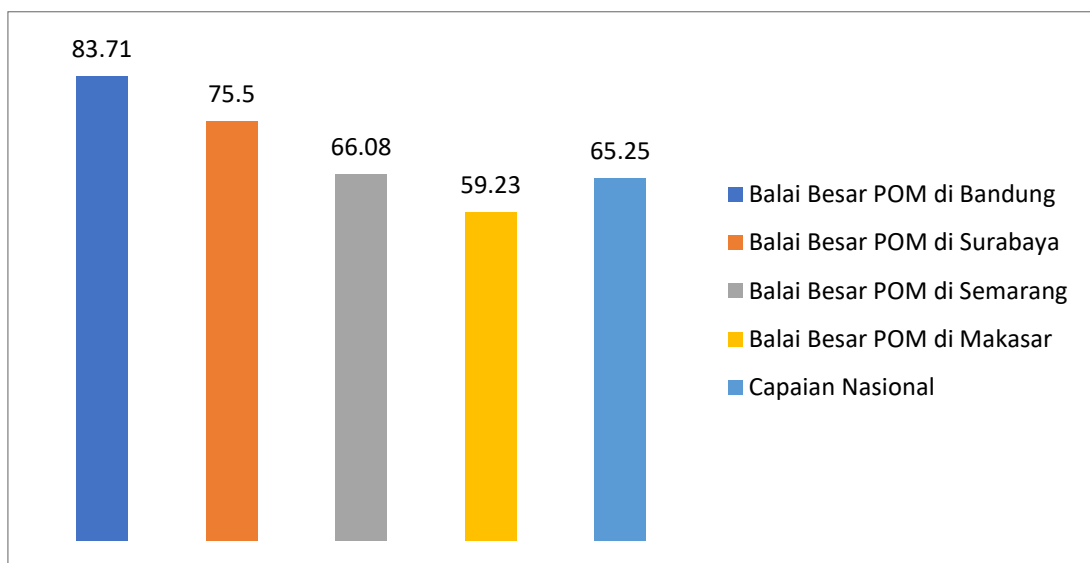
Pada tahun 2018 ditetapkan nilai indeks Kepatuhan (*Compliance Index*) Pelaku Usaha di Bidang Obat dan Makanan sebesar 60, dan realisasi diperoleh nilai 83,71 sehingga persentase capaian adalah 140%. dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan. Indikator kinerja kegiatan ini merupakan indikator kinerja yang baru ditetapkan pada tahun 2018 setelah dibentuknya SOTK baru, sehingga tidak bisa dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Hingga Tahun 2018 Dengan Target Renstra Periode Tahun 2015-2019

Target Kepatuhan (*Compliance Index*) Pelaku Usaha di Bidang Obat dan Makanan nilai akhir tahun Renstra 2019 adalah sebesar 61. Apabila kita hitung nilai capaian tahun 2018 (83,71) terhadap target tersebut maka capaiannya telah melebihi target akhir tahun Renstra 2019 yaitu 137%. Data ini menunjukkan bahwa target akhir tahun Renstra 2019 telah terlampaui sehingga diperlukan penyesuaian kembali terhadap target di tahun 2019.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2018 dengan target nasional (target Badan POM)/ Balai Besar POM lain

Target nasional nilai Kepatuhan (*Compliance Index*) Pelaku Usaha di Bidang Obat dan Makanan tahun 2018 adalah sebesar 65,25%. Apabila kita hitung nilai capaian tahun 2018 (83,71%) terhadap target tersebut maka capaiannya telah melebihi dari target nasional sebesar 128%. Selain itu, capaian Balai Besar POM di Bandung diatas dari capaian Balai Besar POM Provinsi Lainnya.



GAMBAR 3.24
PERBANDINGAN CAPAIAN BBPOM DI BANDUNG DENGAN BBPOM LAIN DAN CAPAIAN NASIONAL
"INDEKS KEPATUHAN PELAKU USAHA DI BIDANG OBAT DAN MAKANAN "

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Faktor-faktor yang berdampak terhadap pencapaian kinerja sasaran ini yang melebihi dari target tahun 2018 disebabkan oleh:

- ☰ Meningkatnya pemahaman dari produsen obat dan makanan tahun 2018 dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2018, pemenuhan persyaratan Cara Produksi Obat dan Makanan yang Baik dari sarana produksi Obat dan Makanan yang diperiksa sebesar 39,54%. Terjadi peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2017 sebesar 26,17%.
- ☰ Meningkatnya jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan pada tahun 2018 dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2018, pemenuhan persyaratan Cara Produksi Obat dan Makanan yang Baik dari sarana produksi Obat dan Makanan yang diperiksa sebesar 61,09%. Terjadi peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2017 sebesar 60,91%.

E. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

Indeks Pengawasan Obat dan Makanan merupakan indikator yang baru diukur tahun 2018, maka belum ada rekomendasi terkait perbaikan kinerja untuk mendukung peningkatan indikator ini.

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.3.

PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN KEGIATAN KE-DUA

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan peningkatan kompetensi dan pemahaman pelaku usaha melalui workshop, bimbingan teknis atau sosialisasi. Terkait hal ini, pada tahun 2018 BBPOM di Bandung melaksanakan 2 kegiatan Bimbingan Teknis Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik Bagi Pelaku Usaha dan Bimbingan Teknis Tata Cara Pendaftaran *e-Registration* Pangan Bagi Para Pelaku Usaha Pangan.

1. Pelayanan Prima dan Bimbingan Teknis *e-Registration* Pangan Olahan

Pelayanan Prima dan Bimbingan Teknis *e-Registration* Pangan Olahan dihadiri oleh 50 sarana produksi pangan yang sedang dalam proses pendaftaran, baik proses penyelesaian perbaikan hasil pemeriksaan sarana maupun proses *e-registrasi*. Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman para pelaku usaha mengenai tata cara pendaftaran pangan olahan melalui registrasi *online e-registration*. Adapun materi yang

diberikan pada kegiatan ini adalah Pendaftaran Pangan Olahan, Pelabelan Pangan, Bahan Tambahan Pangan, Informasi Nilai Gizi, Tata Cara *e-Registration* dan materi dari lintas sektor terkait Izin Industri. Untuk lebih meningkatkan pemahaman para pelaku usaha yang hadir di acara ini juga dilakukan simulasi tata cara e-registrasi pangan, sehingga diharapkan dengan adanya praktik langsung dapat lebih memudahkan para peserta dalam memahami tata cara pendaftaran. Selain itu, di hari kedua diadakan pelayanan langsung e-registrasi pangan, dimana para pelaku usaha yang statusnya masih dalam proses e-registrasi dapat langsung melakukan penginputan data dan dapat berkonsultasi langsung dengan para evaluator. Dari kegiatan ini diharapkan ada pelaku usaha pangan yang permohonan registrasinya disetujui dan mendapatkan nomor izin edar.

2. Bimbingan Teknis Cara Produksi Pangan Yang Baik Bagi Pelaku Usaha


Bimbingan Teknis Cara Produksi Pangan Yang Baik Bagi Pelaku Usaha diikuti oleh 60 sarana produksi pangan. Materi yang diberikan pada bimtek ini adalah Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik, Pendaftaran Pangan Olahan, Label Pangan dan Tata Cara Pembuatan SOP. Sarana produksi yang diundang adalah sarana yang masih belum menyelesaikan perbaikan/tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana. Pada acara ini juga dilakukan konsultasi langsung (*help desk*) dengan petugas yang melakukan pemeriksaan terkait temuan-temuan yang harus diperbaiki oleh masing-masing peserta, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman para pelaku usaha terkait perbaikan/tindak lanjut yang harus dilakukan dan pada akhirnya mereka dapat melanjutkan proses pendaftaran untuk mendapatkan izin edar.

3.1.3 SASARAN KEGIATAN KE-3: MENINGKATNYA PENGETAHUAN MASYARAKAT TERHADAP OBAT DAN MAKANAN AMAN DI WILAYAH KERJA BBPOM BANDUNG

Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Bandung diukur dengan metodologi survei terhadap pelaksanaan KIE yang telah dilakukan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat. Dari hasil survei diukur indeks pengetahuan masyarakat terhadap obat dan makanan aman berdasarkan capaian kinerja BPOM pada tahun n.

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari satu indikator dengan hasil capaian dapat dilihat pada tabel 3.11.

TABEL 3.11
CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-3 TAHUN 2018

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat Terhadap Obat Dan Makanan Aman Di Wilayah Kerja Bbpom Bandung	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM Bandung	60	71,01	118%	Memuaskan 

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja tahun 2018

Pada tahun 2018 ditetapkan nilai indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman sebesar 60, dan realisasi diperoleh nilai 71,01 sehingga persentase capaian adalah 118% dengan kriteria **Memuaskan**.

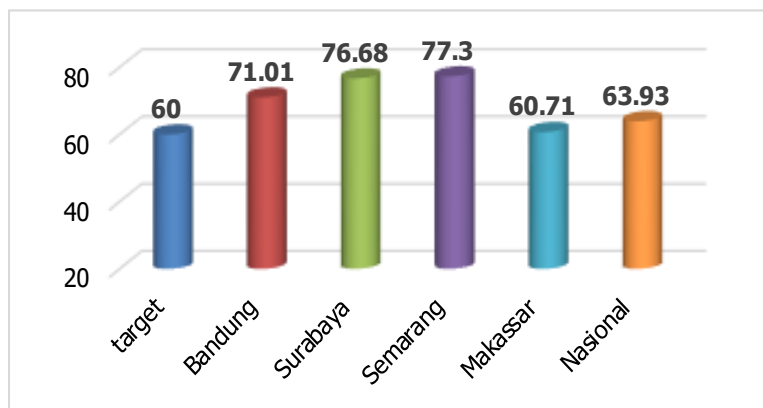
Indikator kinerja kegiatan ini merupakan indikator kinerja yang baru ditetapkan pada tahun 2018 setelah dibentuknya SOTK baru, sehingga tidak bisa dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Hingga Tahun 2018 Dengan Target Renstra Periode Tahun 2015-2019

Target nilai indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman akhir tahun Renstra 2019 adalah sebesar 61. Apabila kita hitung nilai capaian tahun 2018 (71,01) terhadap target tersebut maka capaiannya telah melebihi target akhir renstra yaitu 116%. Data ini menunjukkan bahwa target akhir tahun Renstra 2019 telah terlampaui.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2018 dengan target nasional (target Badan POM)/ Balai Besar POM lain

Target nasional nilai Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Obat dan Makanan Aman tahun 2018 adalah sebesar 60. Apabila kita hitung nilai capaian tahun 2018 (71,01) terhadap target tersebut maka capaiannya telah melebihi target yang ditetapkan yaitu 118%. Data ini menunjukkan bahwa target akhir tahun Renstra 2019 telah terlampaui. Secara lengkap perbandingan capaian Balai Besar POM di Bandung dibandingkan dengan capaian balai provinsi lain dan target nasional digambarkan dalam Gambar 3.25



GAMBAR 3.25
PERBANDINGAN TARGET DAN CAPAIAN
“INDEKS PENGETAHUAN MASYARAKAT TERHADAP OBAT DAN MAKANAN AMAN DI
WILAYAH KERJA BBPOM BANDUNG”

Secara rinci hasil survei untuk masing-masing komoditi digambarkan dalam tabel 3.12

TABEL 3.12
INDEKS PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

Provinsi	Indeks Pengetahuan	Komoditas				
		Obat	Obat Tradisional	Kosmetik	Suplemen	Pangan
Jawa Barat	71,01	75,18	75,13	62,47	66,73	65,22
Jawa Tengah	77,3	82,74	72,08	66,27	75,93	77,55
Jawa Timur	76,68	71,44	87,64	68,09	82,45	87,43
Sulawesi Selatan	60,71	55,18	64,33	62,83	65,77	69,38
TOTAL NASIONAL	63,93	68,65	63	56,7	64,75	64,2

Indeks pengetahuan di Provinsi Jawa Barat (71,01) lebih kecil 91,9% dibandingkan Provinsi Jawa Tengah (77,3) dan 92,6% dibandingkan Provinsi Jawa Timur (76,68), 117% dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan (60,71), 111,1% dibandingkan dengan total nasional (63,93) dan 118% dibandingkan dengan target nasional (60).

Indeks pengetahuan masyarakat di Jawa Barat tentang Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen dan Pangan dari tabel diatas terlihat bahwa nilainya lebih kecil dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur tetapi dibandingkan secara Nasional, Provinsi Jawa Barat nilainya lebih tinggi pada semua komoditi.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dari hasil survei terdapat hubungan antara tingkat pendidikan dengan indeks pengetahuan sehingga untuk meningkatkan indeks pengetahuan masyarakat maka tingkat pendidikan masyarakat Jawa Barat harus ditingkatkan lagi yaitu pendidikan minimal 9 tahun bahkan minimal sampai SMA harus terus digalakan sehingga tidak ada



lagi masyarakat yang tidak tamat SD atau buta huruf. Secara Nasional penduduk di Regional Jawa, penduduknya lebih banyak yang tingkat pendidikannya tinggi dibanding dengan regional lainnya (Sumatra, Kalimantan, Bali-Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku-Papua) sehingga nilai indeksnya paling tinggi.

Tingkat usia juga mempengaruhi nilai indeks pengetahuan masyarakat. Masyarakat dalam tingkat usia produktif lebih aktif berkomunikasi dan bersosialisasi sehingga dipacu untuk meningkatkan pengetahuannya. Secara Nasional penduduk di regional Jawa usia produktif lebih banyak dibandingkan regional lainnya sehingga nilainya lebih tinggi.

Berbagai fasilitas media baik media cetak maupun elektronik lebih banyak tersedia di regional Jawa untuk mengakses berbagai informasi dibandingkan dengan regional lainnya. Dari survei didapat hasil bahwa informasi banyak didapat dari media TV sehingga untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat lebih efektif melalui media TV selain melalui penyuluhan secara langsung, melalui media cetak dan media sosial.

Meningkatkan layanan informasi tentang Obat dan Makanan kepada masyarakat melalui media elektronik, media cetak, *talkshow*, media sosial dan secara langsung. Anggaran layanan informasi melalui media elektronik dan media cetak lebih ditingkatkan karena jangkauan TV, radio dan media cetak lebih luas sehingga paparan informasi tentang Obat dan Makanan kepada masyarakat lebih sering dan materi yang disampaikan dibuat lebih sederhana sehingga mudah dicerna dan dapat diaplikasikan oleh masyarakat.

E. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

Dari hasil rekomendasi tahun lalu, evaluasi yang dapat disampaikan sebagai berikut :

- ☰ Tokoh masyarakat anggota DPR RI Komisi IX yang bekerjasama dengan Balai Besar POM di Bandung semakin banyak sehingga jumlah KIE yang dilakukan meningkat
- ☰ Advokasi dan Koordinasi lintas sektor baik dengan Pemerintah Kabupaten/Kota maupun dengan pusat semakin sering dilakukan sehingga memperlancar dalam pelaksanaan kegiatan KIE.
- ☰ Pemahaman yang lebih baik bahwa pengawasan Obat dan Makanan harus dilakukan secara bersama-sama dan terintegrasi agar lebih efektif dan efisien. Misalnya bahan berbahaya yang disalahgunakan pada pangan, pengawasannya bukan semata tanggung jawab Badan POM tetapi juga merupakan tanggung jawab instansi lain yang mengawasi komponen bahan baku, bahan pembantu/penolong dalam hal pengadaan, produksi dan atau distribusinya di wilayah masing-masing.
- ☰ Permintaan sebagai narasumber dari lintas sektor semakin meningkat, Advokasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah di tingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi lebih gencar lagi sehingga semakin banyak lagi satuan kerja perangkat daerah

(SKPD) atau organisasi masyarakat yang berkomitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan sesuai Inpres No. 03 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan.

- ☛ Program-program yang akan dilaksanakan di daerah tersebut sebelum dilaksanakan maka diupayakan agar dibuat MoU.
- ☛ Bersinergi dengan Bappeda Kabupaten/ Kota maupun Propinsi sehingga program-program yang berkaitan dengan pengawasan Obat dan Makanan lebih ditingkatkan

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.3.

PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN KEGIATAN KE-TIGA

Kegiatan dalam sasaran kegiatan yang mendukung Meningkatnya Indeks Pengetahuan Masyarakat terhadap Obat dan Makanan Aman adalah berupa kegiatan layanan informasi, Komunitas yang diberdayakan dan Sekolah yang diintervensi PJAS. Jenis layanan Informasi antara lain: Penyebaran Informasi, Sosialisasi, Pameran, Penyuluhan, *Talkshow*, Wawancara, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) secara langsung maupun melalui media sosial, televisi, radio, artikel di surat kabar, media online, atau media lainnya.

TABEL 3.13
KEGIATAN MENDUKUNG MENINGKATNYA INDEKS PENGETAHUAN MASYARAKAT TERHADAP OBAT DAN MAKANAN AMAN

JENIS LAYANAN	TARGET	REALISASI	%	KETERANGAN
1. Layanan Informasi	1300	1362	105	Memuaskan
2. Komunitas yang Diberdayakan	42	42	100	Baik
3. Sekolah yang diintervensi PJAS	1230	1230	100	Baik

1. Layanan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan

Kegiatan pada layanan Informasi secara keseluruhan berjumlah 1362 layanan, dengan perincian sebagai berikut :

TABEL 3.14
LAYANAN INFORMASI TAHUN 2018

No	Layanan Infomasi	Jumlah Layanan
1	ULPK (Informasi, Pengaduan)	1183
2	Sosialisasi dlm rangka toksikovigilan	1
3	Penyebaran Informasi	7
4	Pameran	9
5	Penyuluhan atas permintaan	100



No	Layanan Infomasi	Jumlah Layanan
7	KIE GNPOPA	21
8	KIE Germas Sapa	21
9	KIE OTKos	20
TOTAL		1.362

Pada tahun 2018, perencanaan kegiatan layanan informasi sebanyak 1300 layanan, namun realisasinya sebanyak 1.362 layanan. Apabila kita hitung persentase capaian, maka capaian kinerjanya adalah sebesar 105% kriteria **memuaskan**.

2. Komunitas yang diberdayakan

Pada tahun 2018, komunitas yang diberdayakan terdiri dari intervensi kepada 5 desa di daerah Kabupaten Subang dan dua pasar yaitu Pasar Cariu di Kabupaten Bogor dan Pasar Atas di Kota Cimahi. sehingga total kumulatif komunitas yang diberdayakan sampai dengan tahun 2018 adalah 42 komunitas. Secara rinci dapat dilihat pada table berikut ini:

TABEL 3.15
RINCIAN KOMUNITAS YANG DIBERDAYAKAN

Kegiatan/ Tahun	2014	2015	2016	2017	2018
GKPD	14	19	24	29	34
Pasar	3	3	3	6	8
Total (kumulatif)	17	22	27	35	42

2.1. Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD)

Program Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD) mengedepankan pemberdayaan masyarakat desa untuk dapat secara mandiri menjaga kesehatan dan melindungi diri dan keluarganya dari risiko pangan yang tidak aman. Kegiatan ini merupakan kegiatan *New Initiative* yang dimulai tahun 2014 sampai tahun 2019. Sasaran desa untuk tahun 2018 ini adalah 5 Desa di Kabupaten Subang, yaitu desa Gandasoli, desa Cicadas, desa Pagaden, desa Pasirbungur dan desa Patimban. Hasil dari GKPD terpilih satu desa (desa Gandasoli) untuk diikuti sertakan dalam lomba Desa PAMAN tingkat nasional.

2.2. Gerakan Pasar Aman Bahan Berbahaya (PABB)

Penyuluhan kepada Komunitas Pasar dan Kampanye Pasar Aman dari Bahan Berbahaya dilaksanakan September 2018 di pasar Cariu Kabupaten Bogor dan Pasar Atas Cimahi, Kota Cimahi. Tujuan kegiatan ini kondisi pasar yang bersih, aman, nyaman, dan sehat yang terwujud melalui kerjasama seluruh *stakeholder* terkait dalam menyediakan bahan pangan yang aman dan bergizi bagi masyarakat.

Pada 2018 telah dilaksanakan tahap Monitoring dan Evaluasi program Pasar Aman Bahan Berbahaya pada pasar Cariu Kabupaten Bogor, pasar Pasalaran Kabupaten Cirebon, pasar Palimanan Kabupaten Cirebon, pasar Baru Karang Ampel Kabupaten Indramayu, pasar Pancasila Kota Tasikmalaya, pasar Tanjungsari kabupaten Sumedang,

dan pasar Cihapit Kota Bandung, petugas pengelola pasar yang telah dilatih melalui Bimtek diberdayakan untuk melakukan pengambilan contoh dan pengujian cepat menggunakan test kit. Dengan demikian dapat diperoleh data hasil pengawasan di setiap pasar tersebut sebagai bahan untuk evaluasi dan tindak lanjut implementasi program. Setiap pasar diberi satu paket test kit, rompi, pembelian untuk 100 sampel, serta honor 2 orang petugas pasar. Data hasil pengujian dilaporkan langsung ke Badan POM untuk dievaluasi.

3. Sekolah yang diintervensi PJAS

Program Intervensi Keamanan PJAS merupakan bagian dari GERMAS diharapkan dapat terus berlangsung dan terus digulirkan ke wilayah dan jangkauan yang lebih luas. Gerakan Konsumsi Pangan Aman melalui Kantin Sekolah diharapkan dapat berdampak pada penurunan persentase PJAS yang TMS, peningkatan perlindungan hak anak untuk memperoleh pangan sekolah yang aman dan untuk memperoleh informasi keamanan pangan, serta adanya perubahan perilaku siswa orangtua siswa, guru, pedagang pangan, dan pengelola kantin. Program Pangan Jajanan Anak Sekolah bertujuan Meningkatkan keamanan, mutu dan gizi PJAS lingkungan sekolah, Terwujudnya budaya keamanan pangan masyarakat di Indonesia melalui komunitas sekolah dan Pemberdayaan komunitas sekolah untuk memperkuat sistem manajemen keamanan pangan sekolah.

Tahun 2018 program dilaksanakan terhadap 1.230 sekolah pada tingkat Sekolah Dasar, Sekolah menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas dari 7 (tujuh) Kabupaten/ Kota yaitu Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Indramayu, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Bandung .






TABEL 3.16
TARGET DAN REALISASI SEKOLAH YANG DIINTERVENSI PJAS

Target/ Realisasi	Sekolah/ Madrasah yang diintervensi				Jumlah Sekolah yang diaudit & Mobling				Jumlah Sekolah yang mendapat PBKPKS			
	SD/ MI	SMP/ MTs	SMA/ MA	Jml	SD/ MI	SMP/ MTs	SMA/ MA	Jml	SD/ MI	SMP/ MTs	SMA/ MA	Jml
Target	782	262	186	1230	22	7	6	35	16	5	4	25
Realisasi	901	218	111	1230	21	7	6	34	16	7	6	29

3.1.4 SASARAN KEGIATAN KE-4: MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN BERBASIS RISIKO DI PROVINSI JAWA BARAT

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 5 (lima) indikator yang seluruhnya merupakan indikator kinerja utama (IKU). Dari perhitungan keenam indikator tersebut, diperoleh hasil rata-rata capaian sebesar **107%** dengan kriteria **Memuaskan**. Hasil Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.16

TABEL 3.17
CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-4 TAHUN 2018

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA	
Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Jawa Barat	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar	100	100	100	Baik	
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM Bandung	33,00	39,54	120%	Memuaskan	
	Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM Bandung	45,00	52,67	117%	Memuaskan	
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja BBPOM Bandung	84,00	90,39	108%	Memuaskan	
	Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM Bandung	40,00	36,21	91%	Cukup	

3.1.4.1 PERSENTASE PEMENUHAN PENGUJIAN SESUAI STANDAR

TABEL 3.18
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
"PERSENTASE PEMENUHAN PENGUJIAN SESUAI STANDAR" TAHUN 2018

Indikator Sasaran	2018		Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)	Kriteria Penilaian	
	Target	Realisasi			
Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar	100	100	100	Baik	

Indikator kinerja ke-satu dari Sasaran Kegiatan Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja BBPOM Bandung yaitu Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar. Pengujian laboratorium merupakan tulang punggung pengawasan yang dilaksanakan oleh BBPOM di Bandung dalam rangka mengawal kebijakan pengawasan Obat dan Makanan. Efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja BBPOM Bandung diukur dengan indikator persentase pemenuhan pengujian sesuai standar. Standar yang digunakan adalah pedoman sampling yang diterbitkan oleh BPOM, melalui Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor HK.04.1.1.21.05.18.2908 Tahun 2018 tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat Dan Makanan Tahun Anggaran 2018. Cara pengukuran capaian indikator ini adalah jumlah sampel Obat dan Makanan yang diuji sesuai standar pada tahun 2018 dibandingkan dengan jumlah sampel Obat dan Makanan yang disampling pada tahun 2018.

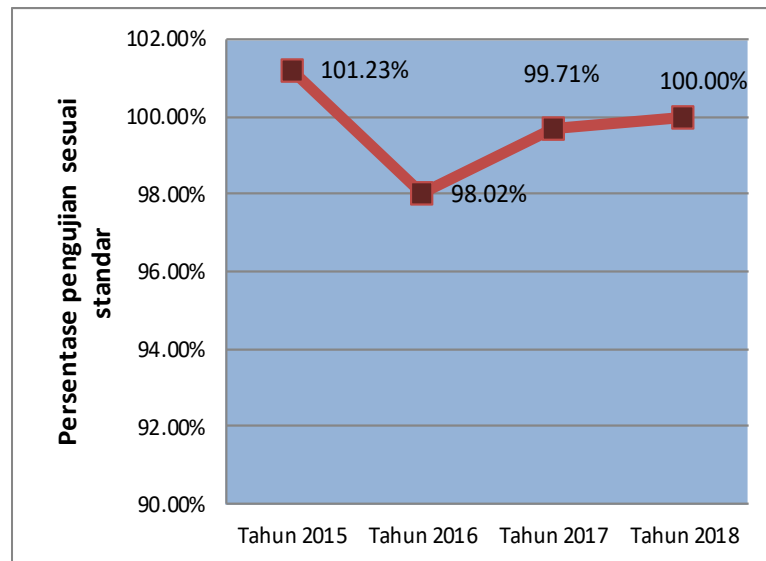
A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja tahun 2018

Pada tahun 2018, target sampel yang diuji sesuai standar adalah 100%. Dari 4507 sampel yang ditargetkan disampling dan diuji, terealisasi sebanyak 4516 sampel dan seluruhnya diuji sesuai standar yang ditetapkan, sehingga capaian untuk kinerja sasaran ini adalah sebesar 100% dengan kriteria Baik.

B. Perbandingan Realisasi dan Capaian tahun 2018 dengan tahun 2015, tahun 2016 dan tahun 2017

Apabila kita bandingkan, jumlah sampel yang disampling dan diuji tahun 2018 (4516 sampel) dengan tahun 2015 (4800 sampel), tahun 2016 (4500 sampel), dan tahun 2017 (4507 sampel) terlihat ada sedikit penurunan jumlah pengujian. Namun apabila dihitung berdasarkan kriteria pengujian sesuai standar, terdapat sedikit perbedaan. Pada tahun 2015 semua sampel dapat dipenuhi keseluruhan parameter ujinya, sedangkan pada tahun 2016 dan tahun 2017 masing-masing ada 89 sampel dan 13 sampel yang tidak dapat dipenuhi keseluruhan parameter ujinya, yaitu uji cemaran logam berat (merkuri dan timbal dalam sediaan pewarna rambut, cat kuku, sediaan perawatan kulit muka), uji cemaran kloramfenikol dalam madu serta uji asam folat dalam tepung terigu (tahun

2016) dan uji disolusi digoksin tablet dan uji cemaran kloramfenikol dalam olahan udang (tahun 2017).



GAMBAR 3.26
HASIL PENGUJIAN SAMPEL SESUAI STANDAR TAHUN 2015, TAHUN 2016, TAHUN 2017, DAN TAHUN 2018

Pada tahun 2015 jumlah sampel Obat dan Makanan yang diuji mencapai 4800 sampel, namun pada tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018 terjadi sedikit penurunan menjadi sekitar 4500 sampel. Hal tersebut sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan dan alokasi anggaran yang diterima oleh Balai Besar POM di Bandung. Apabila kita membandingkan persentasi capaian kinerja, selama 4 tahun Renstra 2015 – 2019, diperoleh hasil capaian yang sama yaitu 100%. Hal tersebut menunjukkan bahwa indikator sasaran persentasi sampel yang diuji sesuai standar dapat dipenuhi dengan kriteria **BAIK**.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Hingga Tahun 2018 Dengan Target Renstra Periode Tahun 2015-2019

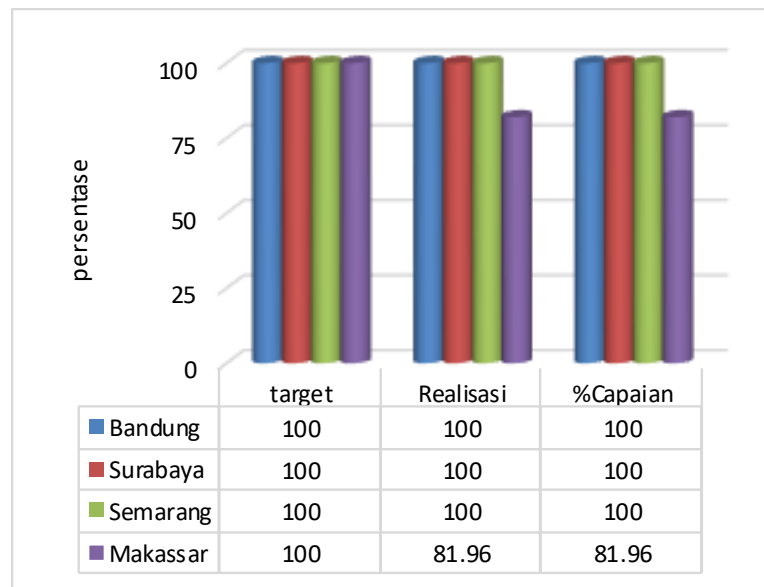
Target persentase Hasil Pengujian Sampel Sesuai Standar akhir tahun Renstra 2015-2019 adalah sebesar 100,00%. Apabila kita hitung realisasi tahun 2018 (100%) terhadap target akhir tahun Renstra maka capaiannya mencapai 100%. Data ini menunjukkan bahwa target akhir tahun Renstra 2019 telah tercapai.

D. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2018 dengan target nasional (target Badan POM)/ Balai Besar POM lain

Target persentase Hasil Pengujian Sampel Sesuai Standar tahun 2018 secara nasional adalah sebesar 100,00%. Jika kita bandingkan realisasi tahun 2018 Balai Besar POM di

Bandung (100,20%) terhadap target nasional (100,00%), maka nilai capaiannya sebesar 100,20%.

Jika dibandingkan dengan Balai Besar POM provinsi lain dalam satu kluster, capaian Balai Besar POM di Bandung sebanding dengan Balai Besar POM provinsi lain tersebut. Data lengkapnya dapat dilihat pada gambar 3.27.



GAMBAR 3.27
PERBANDINGAN HASIL PENGUJIAN SAMPEL SESUAI STANDAR TAHUN 2018 DENGAN
PROVINSI LAIN

E. **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini disebabkan karena pada tahun 2018 keseluruhan sampel yang masuk ke laboratorium telah diuji sesuai standar sesuai pedoman sampling yang diterbitkan oleh BPOM, melalui Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor HK.04.1.1.21.05.18.2908 Tahun 2018 tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat Dan Makanan Tahun Anggaran 2018. Sampel tahun 2017 yang semula belum bisa diuji sesuai standar (untuk parameter uji cemaran kloramfenikol pada udang dan olahannya), sudah bisa diuji pada tahun 2018.

F. **Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.3.

3.1.4.2 PRESENTASI SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI KETENTUAN

TABEL 3.19
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
"PERSENTASE SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI KETENTUAN" TAHUN 2018

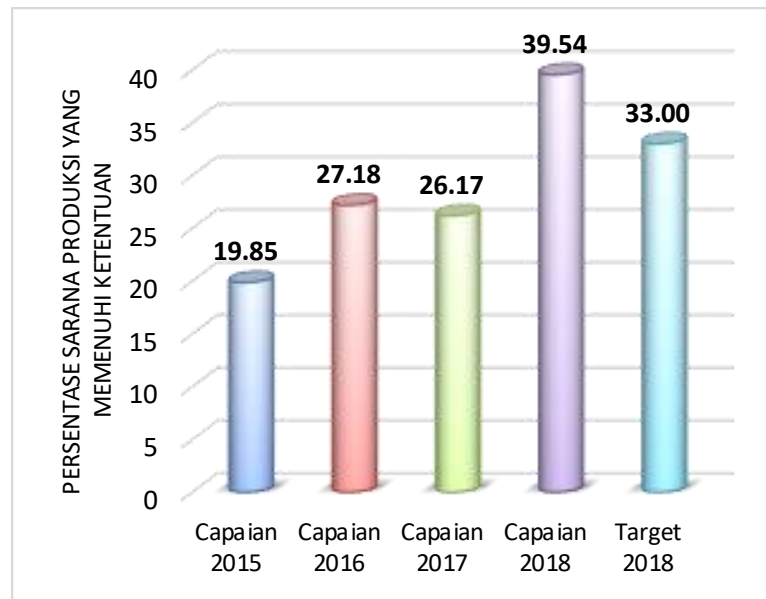
Indikator Sasaran	2018		Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)	Kriteria Penilaian	
	Target	Realisasi			
Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	33,00	39,54	120%	Memuaskan	

Indikator kinerja kedua dari Sasaran Kegiatan Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja BBPOM Bandung yaitu Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Bandung. Indikator tersebut diukur berdasarkan jumlah sarana produksi Obat dan Makanan prioritas yang memenuhi ketentuan dibandingkan dengan jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan untuk diperiksa. Sarana produksi Obat dan Makanan yang diperiksa meliputi sarana industri Farmasi, Industri Obat Tradisional (IOT), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Industri Kosmetik, Industri Pangan olahan MD, Industri Pangan Rumah Tangga, dan Industri Suplemen Kesehatan. Sarana produksi yang diperiksa ditetapkan berdasarkan kriteria Pedoman Pengawasan Sarana Produksi Obat dan Makanan.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja tahun 2018

Pada tahun 2018, jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diperiksa sebanyak 392 sarana dengan jumlah sarana produksi yang memenuhi ketentuan sebanyak 155 sarana. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sebesar 39,54%, sedangkan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja sebesar 33,00%. Dengan demikian capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut sebesar **120%** dengan kriteria **Memuaskan**.

B. Perbandingan Realisasi dan Capaian tahun 2018 dengan tahun 2015, tahun 2016 dan tahun 2017

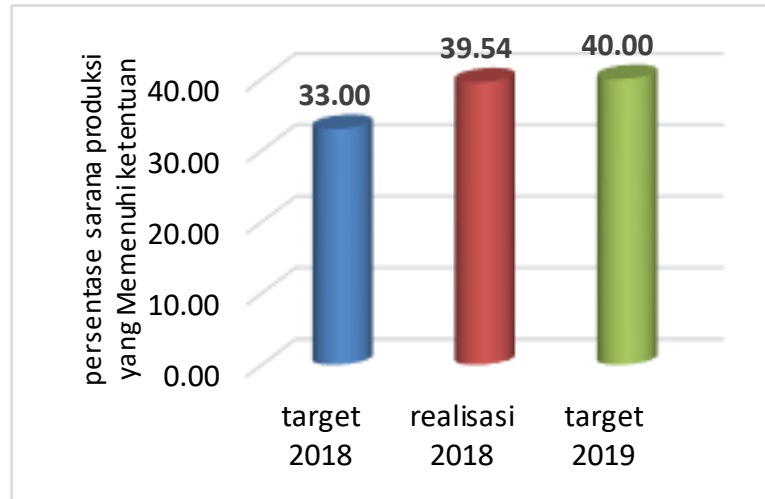


GAMBAR 3.28
PERBANDINGAN CAPAIAN TAHUN 2015, TAHUN 2016, TAHUN 2017, TAHUN 2018 DAN TAHUN 2018
"PERSENTASE SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI KETENTUAN"

Apabila kita membandingkan realisasi persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di Provinsi Jawa Barat tahun 2018 (39,54%) terhadap tahun 2015 (19,85%), tahun 2016 (27,18%) dan tahun 2017 (26,17%) terlihat adanya peningkatan yang signifikan di tahun 2018.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Hingga Tahun 2018 Dengan Target Renstra Periode Tahun 2015-2019

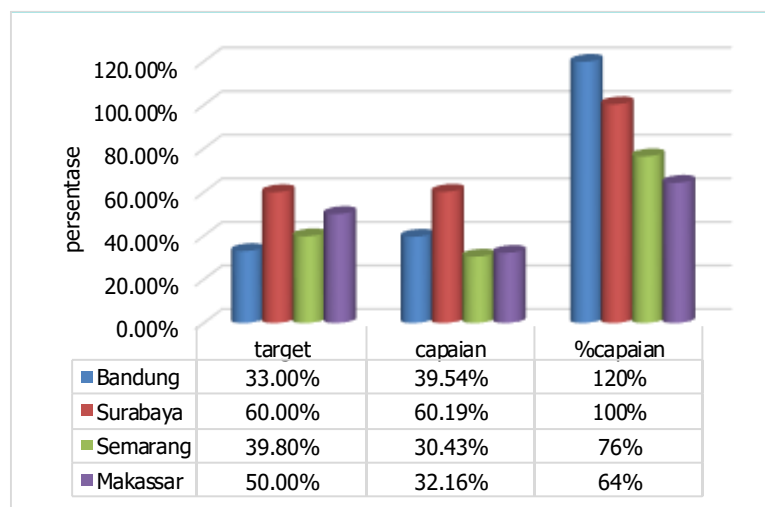
Jika dibandingkan dengan target Renstra tahun 2015-2019 bahwa realisasi kinerja pada tahun 2018 (39,54%) telah melebihi target akhir tahun Renstra (40,00%) dengan nilai capaian terhadap target akhir Renstra sebesar 99% sehingga kinerja pada tahun 2018 dapat dipertahankan di tahun berikutnya.



GAMBAR 3.29
PERBANDINGAN CAPAIAN TAHUN 2018 DAN TARGET TAHUN 2018 DAN TAHUN 2019
“PERSENTASE SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI KETENTUAN”

D. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2018 dengan target nasional (target Badan POM)/ Balai Besar POM lain

Apabila dibandingkan capaian dengan Balai Besar POM provinsi lain yang memiliki beban kerja yang sama, hasilnya sebagai berikut:



GAMBAR 3.30
PERBANDINGAN CAPAIAN PERSENTASE SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI KETENTUAN
ANTAR BALAI BESAR POM DI BANDUNG DENGAN BALAI BESAR POM PROVINSI LAIN

Dari data di atas terlihat adanya perbedaan target awal yang ditetapkan pada tahun 2018. Persentase capaian Bandung dan Surabaya adalah memuaskan ‘Memuaskan’, namun kedua Balai yang lain adalah kurang. Realisasi persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandung masih tertinggal dibandingkan Balai Besar POM Surabaya sehingga perlu adanya



strategi untuk meningkatkan indikator kinerja tersebut. Diperlukan penguatan pengawasan Obat dan Makanan serta komitmen dan kemandirian dari pelaku usaha sehingga dapat memenuhi setiap aspek dari cara pembuatan Obat dan Makanan yang baik.

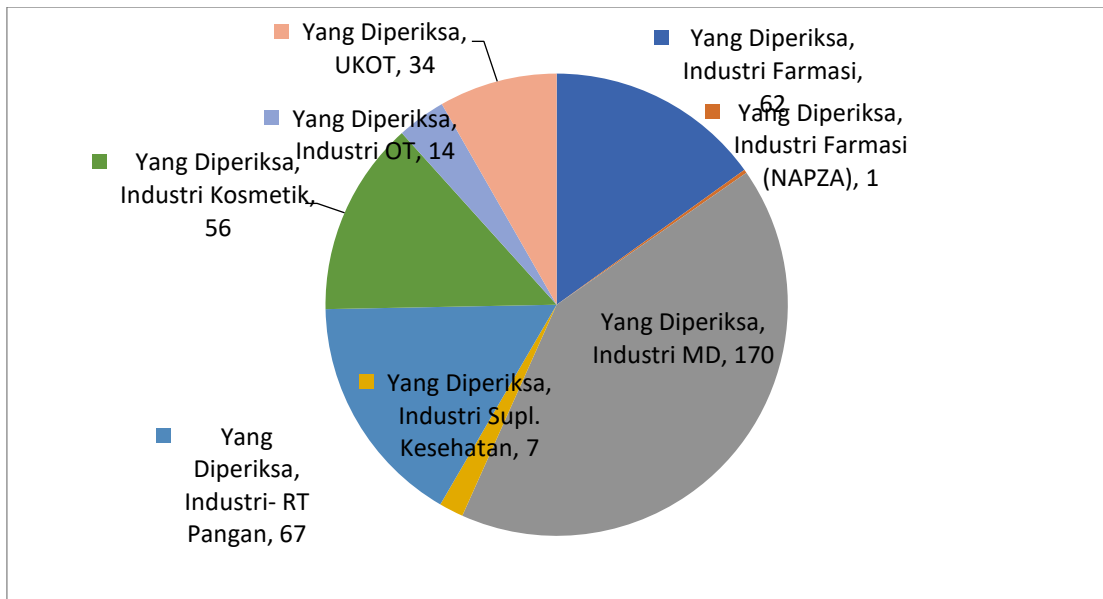
E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Pencapaian pada tahun 2018 melebihi target yang ditetapkan. Hal tersebut disebabkan oleh:

- ☰ Perubahan kriteria “tidak memenuhi ketentuan” pada hasil pemeriksaan industri kosmetika dan obat tradisional. Hasil pemeriksaan dinyatakan “tidak memenuhi ketentuan” apabila kategori temuan berupa kritical atau 5 (lima) mayor.
- ☰ Efektifnya kegiatan yang dilakukan oleh Badan POM dalam meningkatkan kemandirian industri Obat dan Makanan, salah satunya melalui kegiatan *On Site Verification* dalam rangka peningkatan peran serta pelaku usaha untuk menerapkan ketentuan yang berlaku
- ☰ Pemahaman pelaku usaha mengenai cara produksi obat dan makanan yang semakin baik.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam mempertahankan/meningkatkan capaian kinerja, antara lain:

- ☰ Meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan inspeksi dan hasil tindak lanjut pengawasan.
- ☰ Meningkatkan kompetensi SDM Inspektur BBPOM di Bandung mengenai cara produksi obat dan makanan yang baik untuk semua komoditi yang diawasi.
- ☰ Kegiatan Pelatihan bagi Inspektur yang rutin dilakukan setiap tahun, antara lain: Bimtek CPOTB Dasar, Pelatihan Nasional Food Inspektur Tingkat Muda, Workshop Akselerasi Inspektur CPOB Senior, dan Pelatihan CPOB untuk Produk Darah.
- ☰ Penguatan kerjasama dengan pelaku usaha dan stake holder melalui pertemuan, diantaranya: Pertemuan Peningkatan Daya Saing Industri Farmasi dan Kemandirian Bahan Baku Obat dan Diseminasi Kebijakan Teknis Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor.



GAMBAR 3.31
PROFIL JUMLAH PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN

F. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

Berbagai upaya perbaikan yang telah dilakukan dalam mencapai kinerja sesuai tindak lanjut yang direncanakan tahun sebelumnya, antara lain meningkatkan kompetensi inspektur dengan mengikuti pelatihan Cara Produksi Obat dan Makanan yang Baik dan melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan inspeksi terhadap perencanaan yang dibuat pada awal tahun.

G. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.3.

3.1.4.3 PRESENTASI SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI KETENTUAN

TABEL 3.20
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
"PERSENTASE SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI KETENTUAN" TAHUN 2018

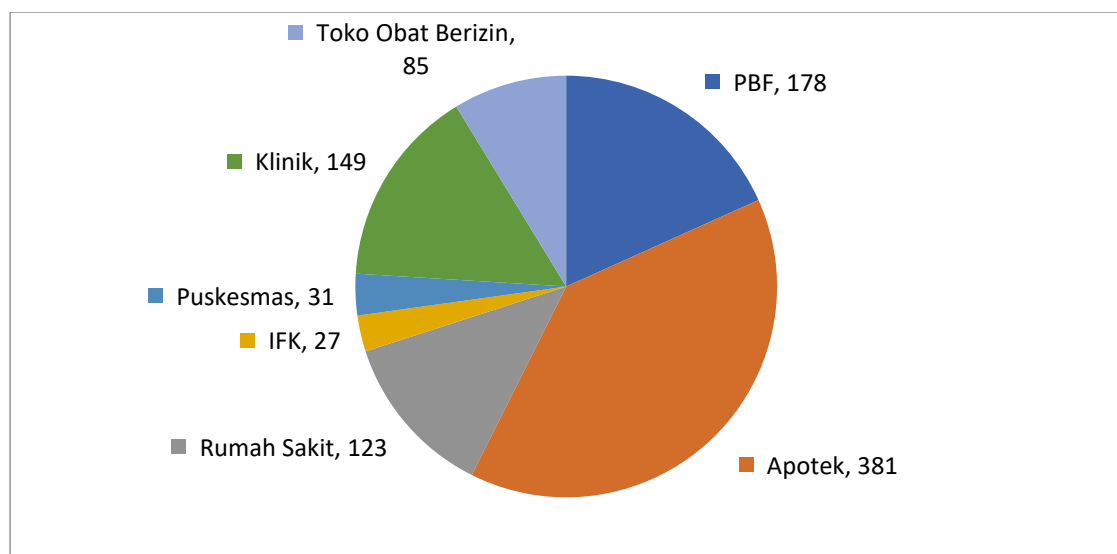
Indikator Sasaran	2018		Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)	Kriteria Penilaian	
	Target	Realisasi			
Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	45,00	52,67	117%	Memuaskan	

Indikator tersebut diukur berdasarkan jumlah sarana distribusi Obat prioritas yang memenuhi ketentuan dibandingkan dengan jumlah sarana distribusi Obat yang diprioritaskan untuk diperiksa. Sarana distribusi Obat terdiri atas: sarana distribusi Obat (Pedagang Besar Farmasi dan Instalasi Farmasi Pemerintah) serta sarana Pelayanan Kefarmasian (Apotek, Toko Obat Berizin, Klinik, Instalasi Farmasi Rumah Sakit dan Puskesmas).

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja tahun 2018

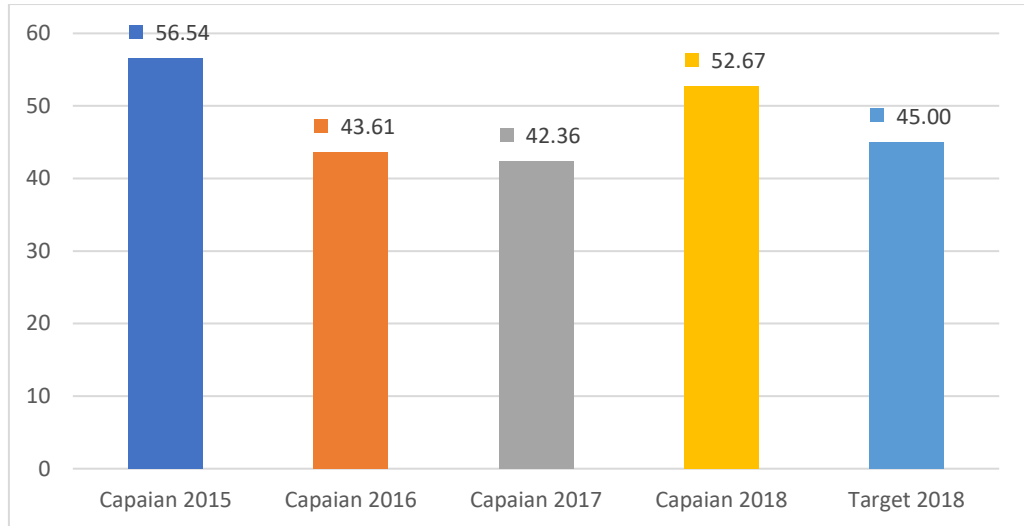
Pada tahun 2018, jumlah sarana distribusi Obat yang diperiksa sebanyak 974 sarana dengan jumlah sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan sebanyak 513 sarana. Maka persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan sebesar 52,67%, sedangkan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja sebesar 45,00%. Dengan demikian capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut sebesar **117%** dengan kriteria **Memuaskan**.

B. Perbandingan Realisasi dan Capaian tahun 2018 dengan tahun 2015, tahun 2016 dan tahun 2017



GAMBAR 3.32
PROFIL JUMLAH PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT

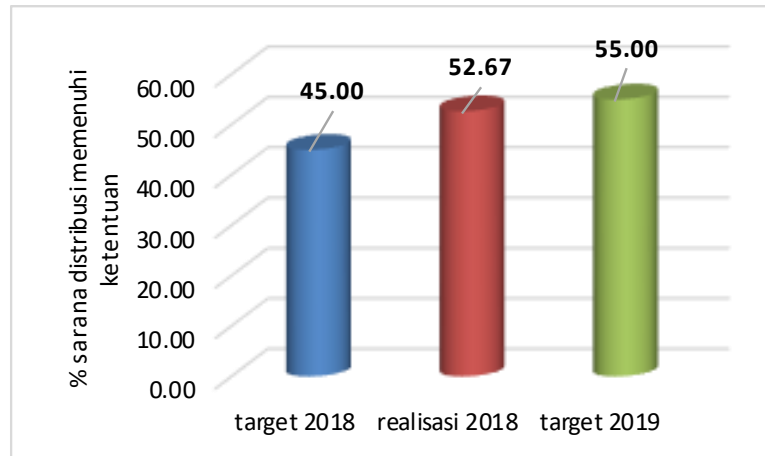
Apabila kita membandingkan realisasi persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di Provinsi Jawa Barat tahun 2018 (52,67%) terhadap tahun 2015 (56,54%), tahun 2016 (43,61%) dan tahun 2017 (42,36%) terlihat adanya peningkatan kembali di tahun 2018.



GAMBAR 3.33
PERBANDINGAN CAPAIAN TAHUN 2015, TAHUN 2016, TAHUN 2017, TAHUN 2018 DAN
TARGET TAHUN 2018
"PERSENTASE SARANA DISTRIBUSI OBAT YANG MEMENUHI KETENTUAN"

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Hingga Tahun 2018 Dengan Target Renstra Periode Tahun 2015-2019

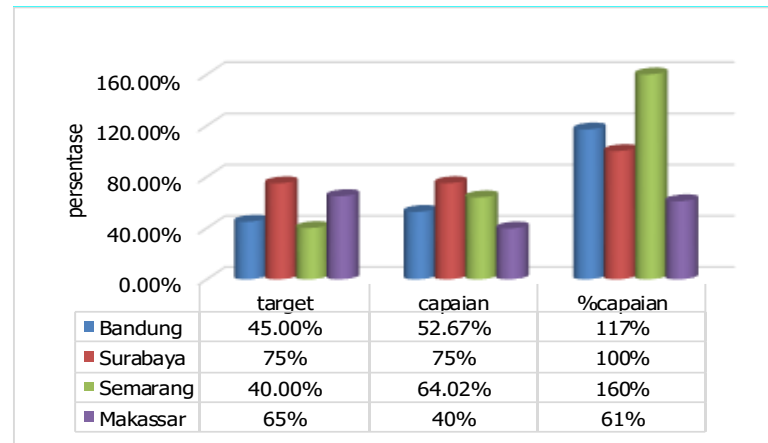
Jika dibandingkan dengan target Renstra tahun 2015-2019 bahwa realisasi kinerja pada tahun 2018 (52,67%) telah melebihi target akhir tahun Renstra (55,00%) dengan nilai capaian terhadap target akhir Renstra sebesar 96% sehingga kinerja pada tahun 2019 perlu ditingkatkan.



GAMBAR 3.34
PERBANDINGAN TARGET DAN CAPAIAN TAHUN 2018 DAN TARGET TAHUN 2019
SARANA DISTRIBUSI YANG MEMENUHI KETENTUAN

D. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2018 dengan target nasional (target Badan POM)/ Balai Besar POM lain

Apabila dibandingkan capaian dengan Balai Besar POM provinsi lain yang memiliki beban kerja yang sama, hasilnya sebagai berikut:



GAMBAR 3.35
PERBANDINGAN CAPAIAN PERSENTASE SARANA DISTRIBUSI OBAT YANG MEMENUHI KETENTUAN ANTAR BALAI BESAR POM DI BANDUNG DENGAN BALAI BESAR POM PROVINSI LAIN

Dari data di atas terlihat adanya perbedaan target awal yang ditetapkan pada tahun 2018 oleh masing-masing Balai Besar POM. Jika dilihat realisasi persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Bandung masih dibawah realisasi dari BBPOM di Semarang dan BBPOM di Surabaya sehingga perlu adanya strategi untuk meningkatkan indikator kinerja tersebut. Diperlukan penguatan pengawasan Obat dan Makanan serta kerjasama dengan lintas sektor, salah satunya dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota untuk melakukan pembinaan kepada sarana distribusi Obat yang efektif sehingga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan yang berlaku.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Nilai capaian tahun 2018 melebihi target yang ditetapkan dikarenakan adanya hal berikut:

- ☛ Peningkatan pemahaman dari para pelaku usaha untuk memenuhi regulasi yang berlaku.
- ☛ Implementasi Perka Badan POM no. 25 tahun 2017 mengenai mandatori sertifikasi CDOB bagi PBF sehingga mendorong Pedagang Besar Farmasi untuk menerapkan pedoman CDOB di tahun 2018 ini.

- ☛ Kerjasama yang baik antar lintas sektor yang terus dibina serta didukung dengan adanya Inpres nomor 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan sehingga fungsi pengawasan di tahun 2018 dapat berjalan lebih baik.

F. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

Berbagai upaya perbaikan yang telah dilakukan dalam mencapai kinerja sesuai tindak lanjut yang direncanakan tahun sebelumnya, antara lain meningkatkan kompetensi inspektur dengan mengikuti pelatihan terkait pemeriksaan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian dan melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan inspeksi terhadap perencanaan yang dibuat pada awal tahun.

G. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.3.

3.1.4.4 PERSENTASE KEPUTUSAN PENILAIAN SERTIFIKASI YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU DI WILAYAH KERJA BBPOM BANDUNG

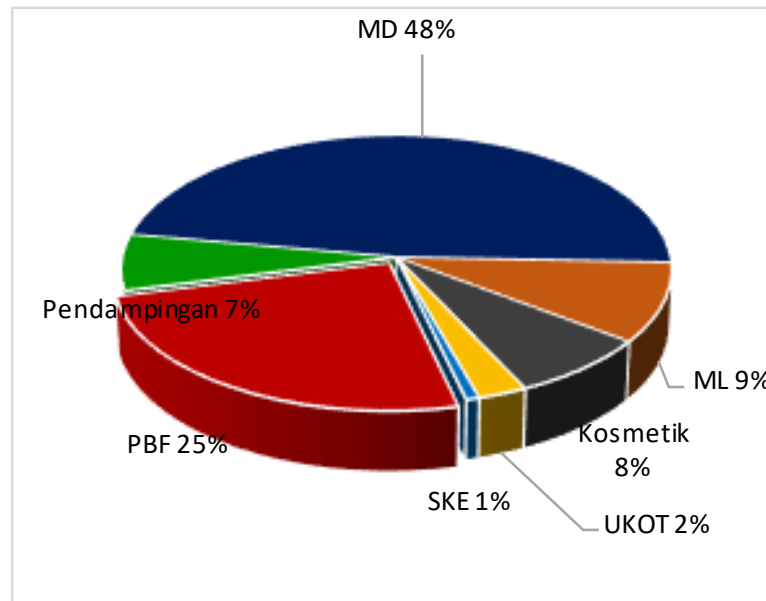
TABEL 3.21
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
"PERSENTASE KEPUTUSAN PENILAIAN SERTIFIKASI YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU"
TAHUN 2018

Indikator Sasaran	2018		Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)	Kriteria Penilaian	
	Target	Realisasi			
Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu	84,00	90,39	108%	Memuaskan	

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja tahun 2018

Indikator kinerja ketiga dari Sasaran kegiatan Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja BBPOM Bandung yaitu Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu. Indikator tersebut diukur berdasarkan jumlah surat hasil pemeriksaan sarana yang diselesaikan sesuai dengan *time line* dibandingkan dengan jumlah sarana produksi dan distribusi obat dan makanan yang telah diperiksa dalam rangka sertifikasi. Sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa meliputi sarana Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Industri Kosmetik, Industri Pangan olahan MD, Industri Pangan Rumah Tangga,

PBF dan Gudang Improtir Pangan. Sarana produksi dan distribusi yang diperiksa ditetapkan berdasarkan berkas permohonan pemeriksaan sarana yang masuk.



GAMBAR 3.36
PERSENTASI PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN

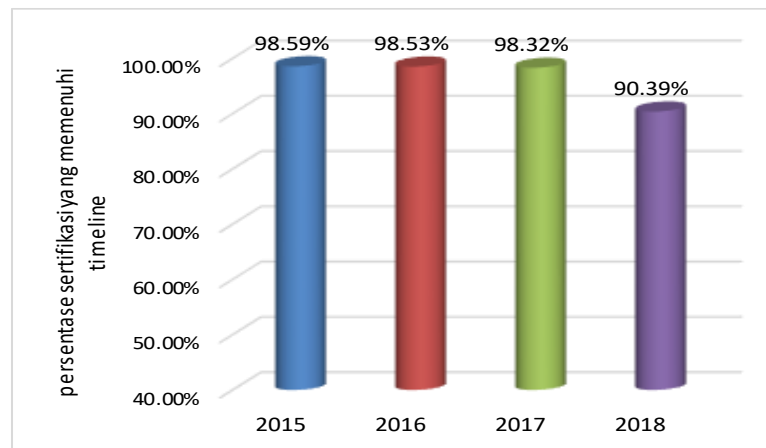
Pada tahun 2018, jumlah sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa sebanyak 416 sarana dengan jumlah surat hasil pemeriksaan sarana yang dikeluarkan oleh Balai Besar POM di Bandung sebanyak 388 sarana sedangkan 28 sarana yang merupakan pendampingan/pemeriksaan bersama dengan tim pusat mendapatkan surat hasil pemeriksaan sarana yang dikeluarkan oleh pusat (BPOM). Dari 388 sarana yang diperiksa, jumlah surat hasil pemeriksaan sarana yang diselesaikan memenuhi *time line* adalah sebanyak 379 keputusan.

Sedangkan untuk penerbitan SKE, dari 1.657 rekomendasi ekspor (SKE) yang diterbitkan, Surat Keterangan Ekspor yang diselesaikan memenuhi *time line* adalah sebanyak 1.377 rekomendasi. Maka persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu adalah sebesar 90,39%, sedangkan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja sebesar 84,00%, sehingga capaian yang didapat adalah **108 %** dengan kriteria **Memuaskan**.

B. Perbandingan Realisasi dan Capaian tahun 2018 dengan tahun 2015, tahun 2016 dan tahun 2017

Presentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2018 adalah sebesar 90,39%, terjadi penurunan sebesar 8,23% jika dibandingkan tahun

2015, (98,50%), penurunan sebesar 8,26% terhadap tahun 2016 (98,53%) dan penurunan sebesar 8,06% jika dibandingkan dengan tahun 2017 (98,32%).



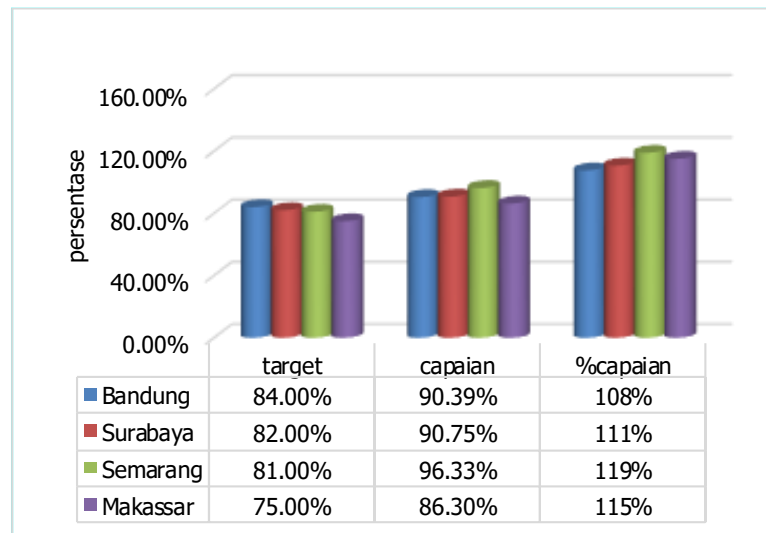
GAMBAR 3.37
PERBANDINGAN CAPAIAN TAHUN 2015, TAHUN 2016, TAHUN 2017, TAHUN 2018 DAN
TARGET TAHUN 2018
“PERSENTASE KEPUTUSAN PENILAIAN SERTIFIKASI YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU”

C. **Perbandingan Realisasi Kinerja Hingga Tahun 2018 Dengan Target Renstra Periode Tahun 2015-2019**

Jika dibandingkan dengan target Renstra tahun 2015-2019 bahwa realisasi kinerja pada tahun 2018 (90,39%) telah melebihi target akhir tahun Renstra dengan nilai capaian terhadap target akhir Renstra sebesar 85% sehingga kinerja pada tahun 2018 dapat dipertahankan di tahun berikutnya.

D. **Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2018 dengan target nasional (target Badan POM)/ Balai Besar POM lain**

Apabila dibandingkan capaian dengan Balai Besar POM provinsi lain yang memiliki beban kerja yang sama, hasilnya sebagai berikut:



GAMBAR 3.38
PERBANDINGAN CAPAIAN PERSENTASE KEPUTUSAN PENILAIAN SERTIFIKASI YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU ANTAR BALAI BESAR POM DI BANDUNG DENGAN BALAI BESAR POM PROVINSI LAIN

Jika dibandingkan dengan target Balai Besar POM di Surabaya, Balai Besar POM di Semarang dan Balai POM di Makasar tahun 2019, realisasi presentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2018 (90,39%) hampir menyamai target akhir tahun Renstra Balai Besar POM di Surabaya (82%) dengan realisasi sebesar 90,75 %, lebih rendah dibandingkan dengan realisasi Balai Besar POM di Semarang sebesar 96,33% (dengan target 81,00%) dan lebih tinggi dibandingkan realisasi Balai Besar POM Makasar sebesar 86,30% (dengan target 75,00%), dengan capaian keempatnya meraih kriteria yang sama yaitu Memuaskan. Meskipun persentase capaian keempat Balai tersebut ‘Memuaskan’, namun realisasi keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Balai Besar POM di Bandung masih sedikit tertinggal dibandingkan Balai Besar POM provinsi lain sehingga perlu adanya strategi untuk meningkatkan indikator kinerja tersebut. Diperlukan penguatan kompetensi para petugas sertifikasi, salah satunya dengan adanya pelatihan, bimtek, sosialisasi dan workshop untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan komitmen petugas dalam menyelesaikan hasil penilaian sertifikasi yang akan diterbitkan dalam rangka pemeriksaan sarana dan penerbitkan SKE/SKI, serta kepada sarana produksi/distribusi obat dan makanan sehingga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan yang berlaku.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Nilai capaian penerbitan hasil pemeriksaan sarana tahun 2018 melebihi target yang ditetapkan dikarenakan adanya hal berikut:



- 🏛️ peningkatan pemahaman dari para petugas mengenai cara produksi yang baik untuk pangan olahan, kosmetik dan obat tradisional serta mengenai cara distribusi obat yang baik.

Sedangkan nilai capaian penerbitan Surat Keterangan Ekspor tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dikarenakan adanya hal berikut:

- 🏛️ Baru diberlakukannya sistem *on line* untuk pengajuan dan penerbitan Surat Keterangan Ekspor, yang mana di awal pemberlakuannya sistem belum berjalan secara stabil sehingga sering terjadi keterlambatan dalam penyelesaiannya.
- 🏛️ Belum optimalnya kemampuan petugas dalam menyelesaikan evaluasi dan penerbitan SKE.
- 🏛️ Kurangnya pemahan dari para pelaku usaha terkait persyaratan yang diperlukan untuk memenuhi regulasi yang berlaku.

Terkait hal tersebut diatas, maka alternatif solusi yang harus dilakukan dalam rangka mempertahankan atau meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- 🏛️ Meningkatkan kompetensi petugas melalui pelatihan, workshop atau bimtek mengenai CPPOB, CPOTB, CPKB dan CDOB.
- 🏛️ Meningkatkan kompetensi evaluator SKE.
- 🏛️ Meningkatkan pemahaman pelaku usaha dalam hal regulasi ekspor.
- 🏛️ Meningkatkan monitoring pelaksanaan *Corrective Action Preventive Action* (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan.

F. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

Berbagai upaya perbaikan yang telah dilakukan dalam mencapai kinerja sesuai tindak lanjut yang direncanakan tahun sebelumnya, antara lain meningkatkan kompetensi petugas dengan mengikuti pelatihan terkait pemeriksaan sarana baik sarana produksi maupun distribusi obat dan makanan dan melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan sertifikasi terhadap perencanaan yang dibuat pada awal tahun.

G. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.3.

3.1.4.5 RASIO TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN YANG DILAKSANAKAN DI WILAYAH KERJA BBPOM BANDUNG

TABEL 3.22
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
"PERSENTASE RASIO TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN YANG DILAKSANAKAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG" TAHUN 2018

Indikator Sasaran	2018		Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)	Kriteria Penilaian	
	Target	Realisasi			
Rasio Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan Yang Dilaksanakan	40	36.21	91	Cukup	

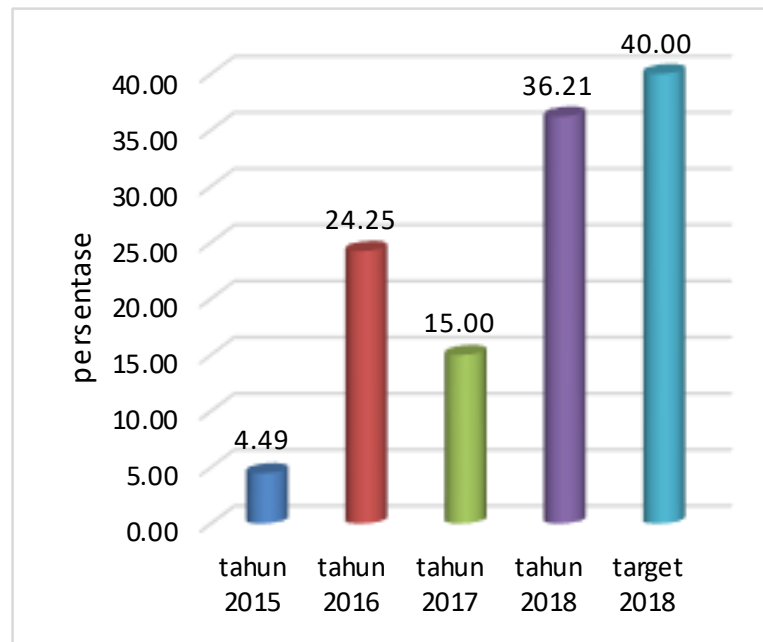
Pencapaian sasaran kegiatan tersebut di atas diukur dengan satu indikator, yaitu: rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan. Perolehan nilai rasio tindak lanjut hasil pengawasan dilakukan dengan cara menghitung jumlah tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan Instansi terkait (Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota setempat dan Kementerian Kesehatan) dibandingkan dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Balai Besar POM di Bandung.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja tahun 2018

Pada tahun 2018, jumlah tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang diberikan oleh Balai Besar POM di Bandung kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota di wilayah Jawa Barat dan Kementerian Kesehatan melalui Badan POM sejumlah 58 rekomendasi, sedangkan yang telah ditindaklanjuti oleh Dinas Kesehatan setempat terkait dan Kementerian Kesehatan sejumlah 21 rekomendasi. Dengan demikian capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut sebesar 36,21%. Apabila dibandingkan dengan target pada tahun 2018 sebesar 40,00%, maka capaian kinerja sasaran kegiatan ini sebesar 91%, dengan kriteria Cukup.

B. Perbandingan Realisasi dan Capaian tahun 2018 dengan tahun 2015, tahun 2016 dan tahun 2017

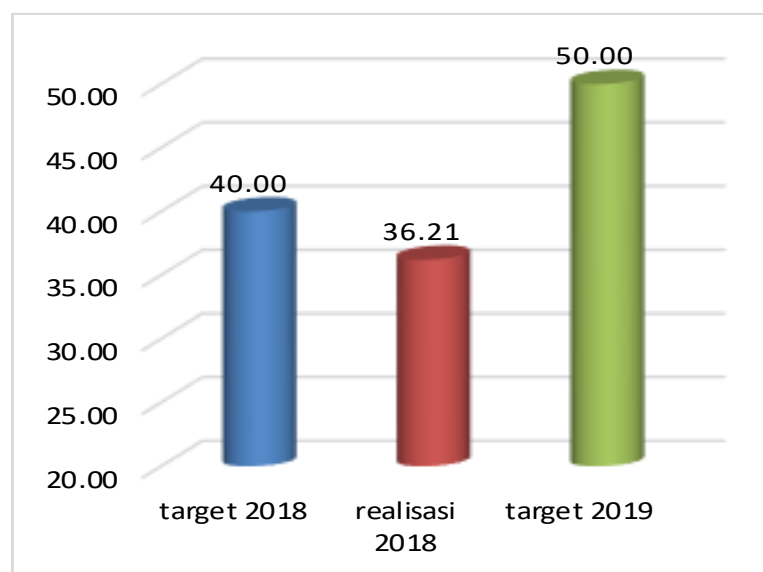
Apabila kita membandingkan realisasi persentase Rasio Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan Yang Dilaksanakan tahun 2018 (36,21%) terhadap tahun 2015 (4,49%), tahun 2016 (24,15%) dan tahun 2017 (15,00%) terlihat adanya peningkatan yang signifikan di tahun 2018.



GAMBAR 3.39
PERBANDINGAN CAPAIAN TAHUN 2015, TAHUN 2016, TAHUN 2017, TAHUN 2018 DAN
TARGET TAHUN 2018
"RASIO TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN YANG DILAKSANAKAN"

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Hingga Tahun 2018 Dengan Target Renstra Periode Tahun 2015-2019

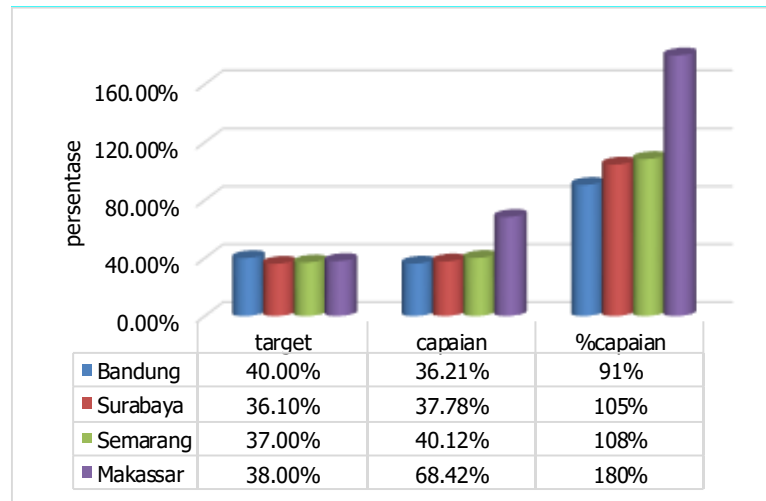
Jika dibandingkan dengan target Renstra tahun 2015-2019 bahwa realisasi kinerja pada tahun 2018 (36,21%) masih belum mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2018 (40,00%) dan target akhir tahun Renstra (50,00%) dengan nilai capaian terhadap target akhir Renstra sebesar 72% sehingga perlu peningkatan kerjasama yang lebih efektif dengan lintas sektor di tahun 2019.



GAMBAR 3.40
PERBANDINGAN CAPAIAN TAHUN 2018 DAN TARGET TAHUN 2018 DAN TAHUN 2019
"RASIO TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN YANG DILAKSANAKAN"

D. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2018 dengan target nasional (target Badan POM)/ Balai Besar POM lain

Apabila dibandingkan capaian dengan Balai Besar POM provinsi lain dalam satu kluster yang memiliki beban kerja yang sama, hasilnya sebagai berikut:



GAMBAR 3.41

PERBANDINGAN CAPAIAN PERSENTASE SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI KETENTUAN ANTAR BALAI BESAR POM DI BANDUNG DENGAN BALAI BESAR POM PROVINSI LAIN

Dari data di atas terlihat target awal yang ditetapkan pada tahun 2018 relatif sama untuk setiap Balai Besar POM di Bandung. Dengan realisasi rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandung berada dibawah Balai Besar POM Lainnya sehingga perlu adanya strategi untuk meningkatkan indikator kinerja tersebut. Diperlukan kerjasama dengan pemangku kepentingan melalui pertemuan lintas sektor yang lebih erat, salah satunya dengan Pimpinan Daerah sehingga koordinasi di tingkat bawah dapat berjalan dengan lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Pencapaian pada tahun 2018 belum dapat memenuhi target yang ditetapkan. Hal tersebut disebabkan oleh:

- ☛ Respon dari Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota di Jawa Barat yang masih kurang terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan gudang farmasi dan puskesmas yang tidak memenuhi ketentuan. Hanya 2 Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota dari 27 Kabupaten/ Kota yang melakukan tindak lanjut dari rekomendasi hasil pemeriksaan Balai Besar POM di Bandung yaitu Dinkes Kota Bandung dan Dinkes Kabupaten Indramayu.



- ☸ Belum terdapat kegiatan yang spesifik untuk menunjang pencapaian indikator kinerja rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan. Pada tahun 2018, sub kegiatan yang menunjang indikator kinerja diatas adalah Penguatan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan Bersama Pimpinan Daerah yang dilaksanakan sebanyak 1 kali.
- ☸ Kurangnya monitoring terhadap rekomendasi yang belum ditindaklanjuti oleh instansi terkait pada tahun berjalan.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan capaian kinerja, antara lain:

- ☸ Meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan inspeksi dan hasil tindak lanjut pengawasan.
- ☸ Dengan masih rendahnya capaian rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan, maka pada tahun 2019 direncanakan kegiatan spesifik yang menunjang pencapaian kinerja tersebut melalui output kegiatan Keputusan Hasil Pengawasan Obat dan Makanan yang Ditindak Lanjuti dengan target sebanyak 50 Keputusan.
- ☸ Melakukan pertemuan intensif dengan pemangku kepentingan melalui Kegiatan Penguatan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan Bersama Pimpinan Daerah dan Pertemuan Lintas Sektor dalam rangka Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan.

F. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

Berbagai upaya perbaikan yang telah dilakukan dalam mencapai kinerja sesuai tindak lanjut yang direncanakan tahun sebelumnya, antara lain melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota setempat saat kegiatan pengawasan Obat dan Makanan serta melakukan monitoring terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan yang telah diterbitkan sebelumnya. Namun, tanpa komitmen yang baik dengan lintas sektor kegiatan ini tidak dapat berjalan dengan baik sehingga perlu adanya MoU dengan seluruh lintas sektor yang terlibat sesuai amanat Inpres nomor 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan.

G. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.3.



PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN KEGIATAN KE-EMPAT

Dalam mendukung terlaksananya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Jawa Barat, maka Balai Besar POM di Bandung melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Dukungan Teknis Manajemen Laboratorium

Laboratorium pengujian adalah salah satu unit yang paling menentukan dalam pengambilan kebijakan karena hasil pengujian dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan (*Scientific base*) sehingga efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis resiko dapat dilaksanakan. Terdapat lima komponen utama yang menentukan hasil pengujian, yaitu alat uji/alat ukur, personel, metode, bahan baku pembanding dan bahan/reagen. Untuk itu kegiatan yang dilaksanakan sebagai dukungan dalam proses pengawasan adalah Pelatihan Personel; Kalibrasi/Verifikasi Alat Laboratorium; Jaminan Mutu Hasil Pengujian (Uji kolaborasi, Uji Profisiensi); Validasi/Verifikasi Metode Analisis; Akreditasi Laboratorium.

Disamping hal tersebut perlu adanya forum diskusi teknis pengujian dan forum diskusi manajemen sistem jejaring pengujian sebagai sarana komunikasi antar penyelia dan Kepala Bidang di lingkungan Badan POM. Pertemuan ini sangat diperlukan untuk membahas dan mencari solusi atau membuat keputusan secara bersama-sama, baik hal yang dapat dijadikan standar acuan, berkaitan dengan kegiatan pengujian di laboratorium maupun program ke deputian dalam membuat kebijakan pengawasan produk obat, narkotika, obat tradisional, kosmetik dan pangan. Karena itu pertemuan ini sangat bermanfaat dalam menciptakan kondisi yang kondusif, menambah wawasan/pengetahuan, dan meningkatkan kerjasama yang efektif dan efisien diantara unit kerja Badan POM dalam menjalankan fungsi pengawasannya sehingga pengawasan dapat berjalan secara efektif.

2. Pengadaan Alat Laboratorium

Laboratorium pengujian merupakan salah satu sub sistem operasi POM yang mempunyai peran sangat strategis, termasuk untuk mendeteksi mutu dan keamanan produk-produk yang beredar di masyarakat, *law enforcement* maupun untuk sertifikasi mutu dalam rangka mendukung ekspor. Prioritas yang perlu dilakukan untuk memperkuat kemampuan laboratorium disamping kecukupan peralatan fungsional laboratorium juga diperlukan suku cadang peralatan laboratorium, glassware, perlengkapan kerja laboratorium yang memadai. Selain itu, dalam rangka mendukung terlaksananya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja BBPOM Bandung maka Laboratorium Balai Besar POM di Bandung harus handal dengan dilengkapi oleh alat laboratorium yang lengkap, sehingga seluruh parameter

kritis yang ditetapkan dalam standar dapat diuji. Pada tahun 2017, terdapat parameter uji yang tidak dapat dilakukan karena tidak adanya peralatan uji, yaitu uji cemaran kloramfenikol pada sampel udang dan olahannya menggunakan peralatan nitrogen evaporator. Terkait hal di atas, maka pada tahun 2018 telah dilaksanakan pengadaan alat laboratorium termasuk di dalamnya alat nitrogen evaporator, sehingga pada tahun 2018, seluruh parameter kritis dapat dilaksanakan. Secara lengkap, alat laboratorium yang diadakan tahun 2018 sebanyak 27 unit dapat dilihat pada tabel 3.23.

TABEL 3.23
PENGADAAN ALAT LABORATORIUM TAHUN 2018

No	Nama Alat	Jumlah	
1	Vacuum Pump	1	UNIT
2	Analytical Balance + Meja	1	UNIT
3	Digital thermometer dual input	7	Unit
4	Dip Chamber	1	UNIT
5	Dissolution Tester	1	UNIT
6	GCMS	1	UNIT
7	Hotplate + Stirer	1	UNIT
8	Liquid Particle Counter	1	UNIT
9	Mikroskop	1	UNIT
10	Mobile Portable Food Contamination on Test Kit	1	UNIT
11	Refrigerator	1	UNIT
12	Hotplate for extraction	2	UNIT
13	Immunoaffinity column rack	1	UNIT
14	Mikropipet series 1 set	1	UNIT
15	Mikropipet series 20 -200 uL	1	UNIT
16	Pipet Filler	2	UNIT
17	Refrigerated centrifuge	1	UNIT
18	Showcase	1	UNIT
19	UV Cabinet	1	UNIT

3. Pengawasan Sarana Produksi Obat Dan Makanan

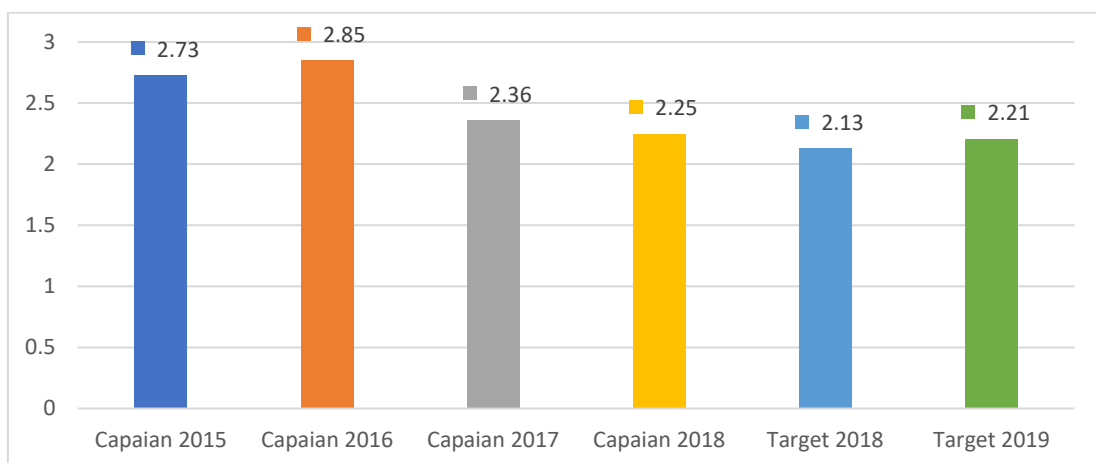
Pengawasan Sarana Produksi Obat dan Makanan dilaksanakan secara rutin oleh Balai Besar POM di Bandung. Sarana produksi Obat dan Makanan adalah jumlah sarana industri Farmasi, Industri Obat Tradisional (IOT), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Industri Kosmetik, Industri Pangan olahan MD, Industri Rumah Tangga-Pangan, Industri Suplemen Kesehatan dan Industri Miras. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan, maka sarana produksi yang diperiksa ditetapkan berdasarkan kriteria Pedoman Pengawasan Sarana Produksi Obat dan Makanan.

Pada Renja Lama, salah satu indikator yang diukur dalam mendukung kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan adalah prosentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan. Indikator ini dihitung berdasarkan jumlah sarana produksi

Obat dan Makanan yang diperiksa dibandingkan dengan jumlah sarana produksi yang terdapat di wilayah Provinsi Jawa Barat.

Pada tahun 2018, jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diperiksa sebanyak 411 sarana, dengan 19 sarana merupakan pemeriksaan dalam rangka sertifikasi/resertifikasi CPOB, dari 18.246 sarana produksi Obat dan Makanan yang terdapat di wilayah Provinsi Jawa Barat. Persentase cakupan pengawasan produksi sarana Obat dan Makanan sebesar 2,25%, sedangkan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja sebesar 2,13%.

Dengan demikian capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut sebesar 106%. Peningkatan capaian tahun 2018 dari tahun 2017 dikarenakan terdapat penyesuaian target awal pada tahun 2018 dari tahun sebelumnya yaitu dari 2,36 % menjadi 2,13 %. Hal tersebut dikarenakan karena target jumlah sarana yang diperiksa pada tahun 2018 sama dengan tahun 2017, namun terdapat peningkatan jumlah sarana produksi obat dan makanan yang berada di wilayah Jawa Barat sehingga diperlukan penyesuaian target di awal tahun 2018. Perbandingan capaian tahun 2018 terhadap tahun sebelumnya dan target akhir Renstra (tahun 2019) dapat dilihat pada gambar 3.42.



GAMBAR 3.42

PERBANDINGAN CAPAIAN TAHUN 2015, 2016, 2017, 2018 TERHADAP TARGET TAHUN 2018 DAN 2019
"PERSENTASE CAKUPAN PENGAWASAN SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN"

4. Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Sarana Pelayanan Kefarmasian

Pengawasan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian dilaksanakan dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan. Sarana distribusi Obat dan sarana pelayanan kefarmasian terdiri atas: Pedagang Besar Farmasi, Instalasi Farmasi Pemerintah dan sarana Pelayanan Kefarmasian (Apotek, Toko Obat Berizin, Klinik, Instalasi Farmasi Rumah Sakit dan Puskesmas). Salah satu indikator pengawasan Obat dan Makanan adalah presentase cakupan pengawasan sarana distribusi obat dan sarana

elayanan kefarmasian dengan perhitungan jumlah sarana distribusi Obat dan sarana pelayanan kefarmasian yang diperiksa dibandingkan dengan jumlah sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian yang terdaftar di instansi terkait di Provinsi Jawa Barat.

Pada tahun 2018, jumlah sarana distribusi Obat dan sarana pelayanan kefarmasian yang diperiksa sebanyak 974 sarana, dan jumlah sarana distribusi yang terdaftar di instansi terkait di Provinsi Jawa Barat sebanyak 9.401 sarana. Maka persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan sarana pelayanan kefarmasian sebesar 10,36%, sedangkan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja sebesar 9,00%.

Dengan demikian capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut sebesar 115%. Nilai capaian tahun 2018 melebihi target yang ditetapkan dikarenakan meningkatnya pengawasan sarana distribusi Obat, khususnya PBF dalam rangka pelaksanaan mandatory CDOB.

5. Pengawasan Sarana Distribusi Obat Tradisional, Kosmetika, Suplemen Kesehatan dan Makanan

Pencapaian sasaran kegiatan tersebut diukur berdasarkan jumlah sarana distribusi Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang diperiksa dibandingkan dengan jumlah sarana distribusi yang terdaftar di instansi terkait di Provinsi Jawa Barat. Sarana distribusi tersebut terdiri atas klinik kecantikan, spa, salon, pengobatan tradisional, toko jamu, depot jamu, stokis MLM, Toko Modern (Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket), Toko Grosir, Toko Tradisional (Toko P & D dan Kios), Importir (termasuk Importir terdaftar bahan berbahaya), distributor dan pengecer yang memiliki SIUP-B2, baik perusahaan induk maupun perusahaan cabang.

Pada tahun 2018, jumlah sarana distribusi Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang diperiksa sebanyak 1.164 sarana dari 4.568 sarana distribusi yang terdapat di wilayah Provinsi Jawa Barat. Persentase cakupan pengawasan produksi sarana Obat dan Makanan sebesar 25,48%. sedangkan target yang telah ditetapkan sebesar 22,63%. Dengan demikian capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut sebesar 113%.

6. Penerbitan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Sarana dalam rangka Sertifikasi dan Surat Keterangan Ekspor/Impor

Kegiatan sertifikasi yang dilaksanakan meliputi pemeriksaan sarana dan penerbitan Surat Keterangan Ekspor/Impor. Sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa meliputi sarana Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Industri Kosmetik, Industri Pangan olahan MD, Industri Rumah Tangga Pangan, PBF dan Gudang Importir Pangan. Sarana produksi dan distribusi yang diperiksa ditetapkan berdasarkan berkas permohonan pemeriksaan sarana yang masuk. Pada rencana kinerja (Renja) lama, salah



satu capaian sasaran kegiatan yang diukur dalam mendukung layanan publik salah satunya yaitu jumlah layanan sertifikasi, yang merupakan angka kumulatif dari jumlah sarana produksi/distribusi yang diaudit dan jumlah rekomendasi ekspor/impor (SKE/SKI) yang diterbitkan. Adapun audit sertifikasi yang dilaksanakan pada tahun 2018 adalah sebanyak 416 layanan, meningkat sebesar 180,08% dibandingkan tahun 2015 (231 layanan), meningkat sebesar 116,52% dibandingkan dengan tahun 2016 (357 layanan) dan mengalami penurunan yaitu 96,97% dibandingkan dengan tahun 2017 (429 layanan), namun tetap melebihi dari target yang telah ditetapkan dengan capaian sebesar 118 %.

Jumlah SKE/SKI yang diterbitkan pada tahun 2018 sebanyak 1.657 layanan jika dibandingkan dengan tahun 2015 naik sebesar 291,72% (568 layanan), naik sebesar 252,20% (657 layanan) dibandingkan tahun 2016 dan naik sebesar 108,29% dibandingkan dengan tahun 2017 (1.447 layanan).

Sedangkan pada renja baru, indikator yang diukur adalah prosentase cakupan keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu. Indikator ini dihitung berdasarkan jumlah surat hasil pemeriksaan sarana dan Surat Keterangan Ekspor yang diselesaikan sesuai dengan *time line* dibandingkan dengan jumlah sarana produksi/distribusi obat dan makanan yang telah diperiksa dalam rangka sertifikasi dan berkas permohonan SKE. Pada tahun 2018, persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu adalah sebesar 90,39%, sedangkan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja sebesar 84,00%, sehingga capaian yang didapat adalah **108 %**. Nilai capaian tahun 2018 melebihi target yang ditetapkan dikarenakan meningkatnya kompetensi dan pemahaman petugas serta ditetapkannya *time line* yang terukur di dalam SOP makro dan mikro terkait penerbitan rekomendasi.

7. Pelatihan Petugas Sertifikasi untuk Meningkatkan Kompetensi SDM


Pelatihan bagi petugas sertifikasi yang rutin dilakukan setiap tahun untuk setiap komoditi yang menjadi objek pemeriksaan/audit. Kegiatan Pelatihan bagi petugas yang rutin dilakukan setiap tahun, antara lain: Pelatihan bagi Evaluator E-Registrasi Pangan, Pelatihan Nasional Food Inspector Tk. Dasar dan Food Inspector Tk. Muda, Bimbingan Teknis bagi Evaluator Denah Bangunan untuk Industri Kosmetik, Pelatihan Inspektur CPOTB, Training Inspektur CDOB Junior dan Senior, serta Sosialisasi SKE/SKI dan Sosialisasi Sertifikasi CDOB.

3.1.5 SASARAN KEGIATAN KE-5: MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BBPOM BANDUNG

Pencapaian sasaran kegiatan tersebut di atas diukur dengan satu indikator, yaitu: Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM di Bandung. Perkara adalah kasus yang ditindak lanjuti secara pro justicia berdasarkan hasil gelar perkara. Sedangkan tahap II adalah perkara yang telah diselesaikan hingga tahap penyerahan tersangka dan barang bukti.

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari satu indikator dengan hasil capaian dapat dilihat pada tabel 3.24.

TABEL 3.24
CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-5 TAHUN 2018
"PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN HINGGA TAHAP II DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG"

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM Bandung	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM Bandung	50	69,60%	139%	Tidak Dapat Disimpulkan 

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja tahun 2018

Pada tahun 2018, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 50,00%. Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM di Bandung pada tahun 2018 sebesar 69,60% dengan rincian jumlah perkara yang diselesaikan hingga tahap II pada tahun 2018 dan tahun sebelumnya sebanyak 16 perkara. Sedangkan perkara tahun 2018 sebanyak 23 perkara. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 139% dengan kriteria tidak dapat disimpulkan.

B. Perbandingan Realisasi dan Capaian tahun 2018 dengan tahun 2015, tahun 2016 dan tahun 2017

Apabila kita membandingkan realisasi kinerja persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II tahun 2015 (63,60%), tahun 2016 (83,30%), tahun 2017 (66,70%) dan

tahun 2018 (69,60%), terlihat adanya penurunan yang signifikan. Hal ini dapat dilihat pada gambar 3.25.

TABEL 3.25
PERBANDINGAN PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN HINGGA TAHAP II
DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG
TAHUN 2015, 2016, 2017 DAN 2018

No	Uraian	Perkara Tahap II Tahun n dan Tahun sebelumnya	Perkara Tahun n	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1	Tahun 2015	14	22	63,60%	127%
2	Tahun 2016	20	24	83,30%	167%
3	Tahun 2017	16	24	66,70%	133%
4	Tahun 2018	16	23	69,60%	139%

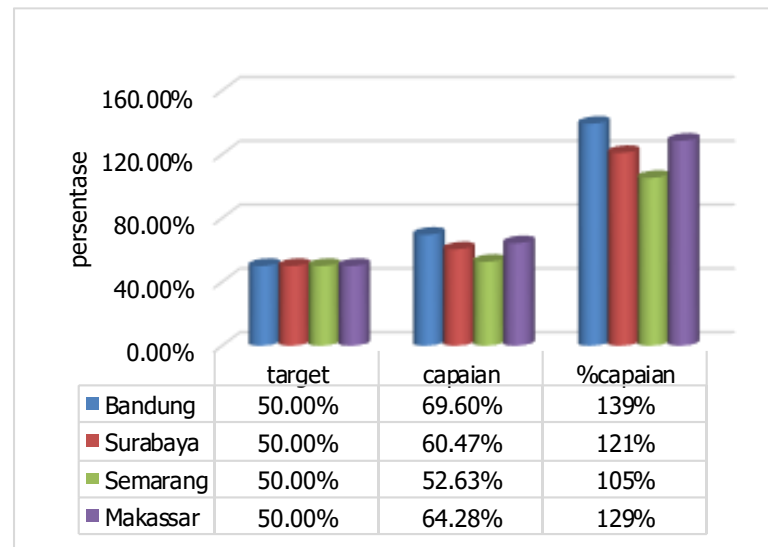
C. Perbandingan Realisasi Kinerja Hingga Tahun 2018 Dengan Target Renstra Periode Tahun 2015-2019

Realisasi Kinerja persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM di Bandung pada tahun 2018 telah memenuhi target akhir tahun Renstra BBPOM di Bandung yaitu sebesar 50,00%. Apabila kita menghitung nilai pencapaian sasaran ini terhadap target akhir tahun Renstra tersebut, nilai pencapaiannya sebesar **139%**.

D. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2018 dengan target nasional (target Badan POM)/ Balai Besar POM lain

Target persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM di Bandung tahun 2018 Balai Besar POM di Bandung telah disinkronkan dengan target Renstra Badan POM secara nasional yaitu 45,00%. Dengan demikian nilai pencapaian sasaran indikator ini bila dihitung terhadap target nasional memiliki nilai pencapaian sasaran sebesar yaitu sebesar **154,70%**.

Apabila dibandingkan dengan Balai Besar POM provinsi lain yang memiliki beban kerja yang sama, capaian kinerja Balai Besar POM di Bandung tahun 2018 lebih besar dari Balai Besar POM provinsi tersebut. Persentase capaian kinerja Balai Besar POM di Bandung **139%** sedangkan Balai Besar POM provinsi lain sebesar **121%**, **105%** dan **129%**. Data lengkapnya dapat dilihat pada gambar 3.43.



GAMBAR 3.43
PERBANDINGAN PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN HINGGA TAHAP II
DI WILAYAH KERJA BALAI BESAR POM DI BANDUNG
DENGAN BALAI BESAR POM LAIN
TAHUN 2018

Capaian kinerja Balai Besar POM di Bandung dengan Balai Besar POM di Surabaya tidak dapat dibandingkan, karena cara perhitungannya berbeda. Perkara yang diselesaikan hingga tahap II tahun 2018 dan tahun sebelumnya di wilayah kerja Balai Besar POM di Surabaya sebanyak 26 perkara, sedangkan perkara tahun 2018 hanya sebanyak 22 perkara, jika dihitung dengan definisi operasional yang telah ditetapkan maka capaian kinerja >200%. Sehingga khusus untuk Balai Besar POM yang jumlah perkara yang diselesaikan hingga tahap II sama dengan atau yang melebihi jumlah perkara tahun 2018 maka jumlah perkara yang dihitung adalah perkara tahun 2018 dan tahun sebelumnya, sebagaimana yang terjadi di Balai Besar POM di Surabaya.

Realisasi kinerja Balai Besar POM di Bandung lebih besar dibandingkan realisasi kinerja Balai Besar POM di Semarang dan Balai Besar POM di Makassar, karena Perkara yang diselesaikan hingga tahap II tahun 2018 dan tahun sebelumnya serta Perkara tahun 2018 yang ditangani Balai Besar POM di Bandung lebih besar dari Balai Besar POM Provinsi tersebut sehingga realisasi kinerja Balai Besar POM di Bandung sebesar 69,60% melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 50% serta melebihi realisasi kinerja Balai Besar POM Provinsi tersebut sebesar 52,63% dan 64,28%.

Capaian kinerja Balai Besar POM di Bandung dan Balai Besar POM di Makassar >125% dengan kriteria tidak dapat disimpulkan, sehingga tidak dapat dianalisis karena target yang terlalu rendah, karenanya perlu adanya penyesuaian target untuk tahun berikutnya.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan dalam pencapaian kinerja sasaran ini disebabkan oleh:

- ☛ Perencanaan penyidikan yang berkesinambungan dimulai dari investigasi awal, operasi penindakan dan proses pemberkasan disertai pengendalian, monitoring, dan evaluasi. Namun, perlu perbaikan khususnya dalam perencanaan pelaksanaan operasi penindakan yang dilakukan secara rutin maupun nasional. Pada tahun 2018, sebagian besar laporan kejadiannya setelah bulan Juni tahun 2018 sebesar 60%, sebagai berikut:

TABEL 3.26
PERINCIAN KASUS BERDASARKAN LAPORAN KEJADIAN TAHUN 2018

NO	Laporan Kejadian (Bulan)	Jumlah Kasus		
		Projustitia	Projustitia Tindak Pidana Ringan	Non Projustitia
1	Januari	1	-	-
2	Februari	3	-	-
3	Maret	2	-	2
4	April	-	-	-
5	Mei	2	-	-
6	Juni	-	-	2
7	Juli	3	-	1
8	Agustus	2	1	-
9	September	1	-	-
10	Oktober	3	-	1
11	November	1	-	-
12	Desember	5	-	-
	TOTAL	23	1	6

Akibatnya perkara tahun 2018 yang diselesaikan hingga tahap II hanya sebanyak 2 perkara dari 23 perkara yang ditangani, hal ini berkontribusi terhadap rendahnya perkara yang diselesaikan hingga tahap II yang hanya sebanyak 16 perkara, yaitu tahun 2016 sebanyak 7 perkara, tahun 2017 sebanyak 7 perkara dan tahun 2018 sebanyak 2 perkara.

- ☛ Adanya jaringan informasi yang dibina dan dapat dipercaya serta kebenaran informasinya dapat dipastikan pada saat melaksanakan kegiatan investigasi awal. Namun dengan adanya mutasi beberapa Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang telah memiliki jaringan informasi ke unit kerja lain dapat menurunkan jumlah jaringan informasi yang dibina dan dapat dipercaya yang pada akhirnya juga dapat menurunkan jumlah target operasi yang dapat ditindaklanjuti dengan penindakan.
- ☛ Operasi penindakan yang dilakukan secara rutin, selain itu dilakukan pula operasi penindakan yang dilakukan secara nasional dan tentatif, yaitu:



- 1) Operasi Gabungan Nasional terhadap pelanggaran di Bidang Obat dan Makanan, sebanyak 3 (empat) kasus, dengan tindak lanjut 1 (satu) kasus *Pro-Justitia* dan 2 (dua) kasus *NonPro-Justitia*;
- 2) Operasi Terpadu Pemberantasan Carnophen dan Obat-obat Tertentu (OOT) lainnya terhadap pelanggaran di Bidang Kesehatan, sebanyak 3 (tiga) kasus, dengan tindak lanjut 3 (tiga) kasus *Pro-Justitia*;
- 3) Operation OPSON VII tahun 2018 terhadap pelanggaran di Bidang Pangan, sebanyak 2 (dua) kasus, dengan tindak lanjut 1 (satu) kasus *Pro-Justitia* dan 1 (satu) kasus *Non Pro-Justitia*.

Namun dengan adanya perubahan modus operandi kejahatan di bidang Obat dan Makanan yang semakin berkembang antara lain : maraknya penjualan produk ilegal secara *on line*, banyaknya *footloose* sarana produksi dan sarana distribusi, jam operasional yang tidak menentu. Hal ini mengakibatkan banyaknya operasi penindakan yang dilakukan tidak berhasil karena sarana pindah, tutup dan tidak menemukan alat bukti yang cukup, untuk itu perlu perbaikan dalam hal strategi, teknis dan taktik dalam pelaksanaan operasi penindakan.

- ☰ Kualitas SDM terkait penyidikan Obat dan Makanan bertambah melalui pendidikan dan pelatihan, antara lain : Pertemuan Koordinasi PPNS di Pekanbaru, Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor Penegakan Hukum Tindak Pidana Obat dan Makanan di Bogor, Pertemuan Perkuatan Mekanisme Operasi Penyidikan Obat dan Makanan di Bogor, Diklat PPNS Badan POM di Bogor, Diklat Intelijen di Soreang, Bimbingan Teknis dan Koordinasi Lintas Sektor dalam Rangka Penegakan Hukum di Bidang Obat dan Makanan di Bandung, In House Training Intelijen di Sorong, Pelatihan Penanganan Tindak Pidana Terpadu di Bidang Obat dan Makanan di Jakarta, dan Pelatihan Intelijen Lanjutan di Semarang.
- ☰ Meningkatnya koordinasi lintas sektor terutama dengan *Criminal Justice System*, baik melalui pertemuan lintas sektor, pelatihan peningkatan kompetensi, konsultasi penyelesaian berkas perkara dan koordinasi informal lainnya. Namun perlu upaya percepatan penyerahan tahap II terhadap perkara yang ditangani sebagaimana yang dilakukan pada tahun 2016 dengan meningkatkan koordinasi lintas sektor terutama dengan Korwas PPNS Polda Jabar dan Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara, dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi terhadap penyerahan tahap II terhadap perkara. Pada tahun 2016, perkara yang diselesaikan hingga tahap II sebanyak 20 perkara.

F. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya



Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan capaian kinerja, antara lain:

- ☰ Menyusun Plan Of Action (POA) Kegiatan Penindakan di semester awal tahun 2019 sebanyak 60%. Selain itu, meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penindakan dan tindaklanjutnya secara berkesinambungan.
- ☰ Memantapkan jaringan pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Wilayah Indonesia, tidak hanya di Provinsi Jawa Barat untuk mendukung pengungkapan jaringan kejahatan di Bidang Obat dan Makanan yang terorganisasi baik di dalam negeri dan luar negeri.
- ☰ Meningkatkan koordinasi dengan Korwas PPNS Polda Jabar dan Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara terkait penyelesaian berkas perkara serta upaya percepatan penyerahan tahap II terhadap perkara yang ditangani.
- ☰ Meningkatkan kompetensi PPNS mengenai *cybercrime* serta pembentukan dan pembinaan jaringan serta menambah jumlah PPNS di Bidang Penindakan karena adanya beberapa PPNS yang akan memasuki masa pensiun untuk beberapa tahun ke depan.

G. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.3.

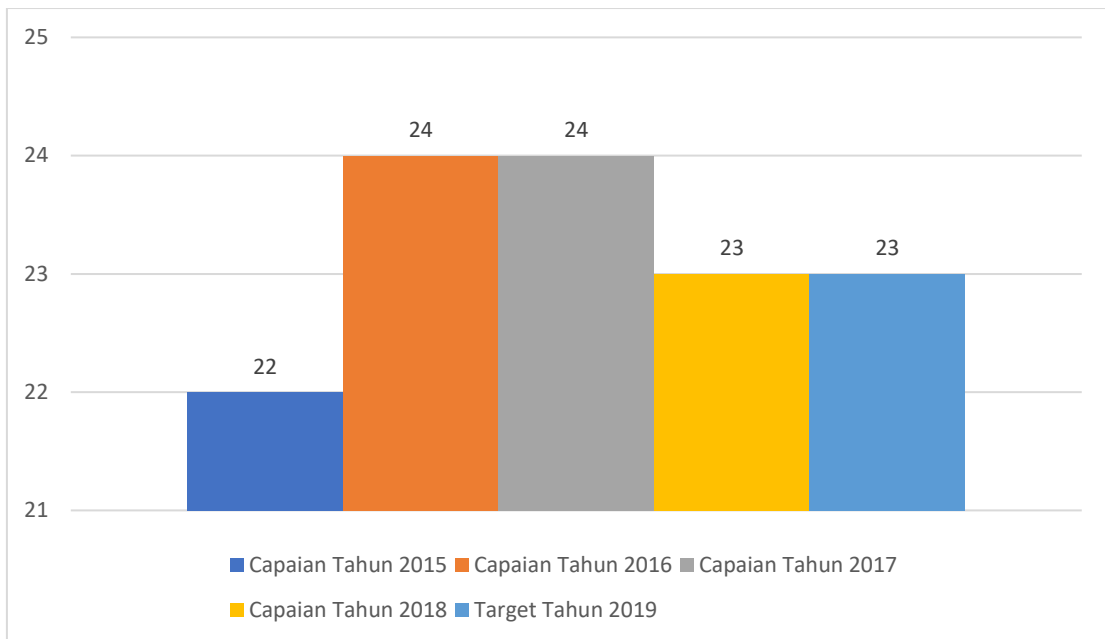
PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN KEGIATAN KE-LIMA

Dalam mendukung tercapainya sasaran kegiatan ke lima, yaitu : "Meningkatnya Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Bandung" dilaksanakan program pengawasan Obat dan Makanan melalui 2 (dua) kegiatan yaitu : (1) Penyidikan obat dan makanan; dan (2) Dukungan Teknis Investigasi Awal dan Penyidikan di Bidang Obat dan Makanan. Kedua kegiatan tersebut merupakan salah satu fungsi Balai Besar POM di Bandung sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan POM, yaitu: Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

1. Penyidikan obat dan makanan

Pada tahun 2018, jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan sebanyak 23 perkara, sedangkan target yang telah ditetapkan sebesar 23 perkara. Perkara adalah kasus yang ditindak lanjuti secara pro justicia berdasarkan hasil gelar perkara. Sedangkan jumlah

perkara yang dihitung adalah perkara yang telah diterbitkan SPDP-nya kepada Kejaksaan melalui Korwas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).



GAMBAR 3.44
PERBANDINGAN JUMLAH PERKARA
TAHUN 2015, TAHUN 2016, TAHUN 2017, TAHUN 2018 DAN TARGET 2019

Kegiatan tersebut diatas didukung dengan kegiatan investigasi awal terhadap adanya dugaan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan dari informasi yang datang dari masyarakat, temuan hasil pemeriksaan, pengaduan masyarakat melalui Bidang Informasi dan Komunikasi Balai Besar POM di Bandung, berdasarkan surat dari Badan POM RI, pengembangan kasus yang ditangani, serta penelusuran melalui media *online*. Kegiatan investigasi awal yang dilakukan pada tahun 2018 terhadap 79 sarana, namun hanya 30 sarana yang terindikasi melakukan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan. Terhadap 30 sarana tersebut, ditindaklanjuti dengan kegiatan penindakan dengan output kasus pelanggaran di Bidang Obat dan Makanan sebanyak 30 kasus, terdiri dari 23 kasus Pro-justitia, 1 kasus Pro-justitia Tindak Pidana Ringan dan 4 kasus Non-justitia.

TABEL 3.27
HASIL PENYIDIKAN KASUS TINDAK PIDANA DI BIDANG OBAT DAN MAKANAN
BALAI BESAR POM DI BANDUNG TAHUN 2018

No	Jenis Produk	Jumlah Kasus	Tindak lanjut			Nilai Taksiran Sitaan			
			Non-Justitia	Pro Justitia	Pro Justitia (Tipiring)	Non-Justitia (Rp)	Pro Justitia (Rp)	Pro Justitia (Tipiring) (Rp)	Total (Rp)
1	Obat	10	1	8	1	15.964.380,00	512.130.245,00	43.136.357,00	571.230.982,00
2	Obat Tradisional	5	1	4	-	20.831.000,00	936.244.500,00	-	957.075.500,00
3	Kosmetik	10	2	8	-	605.670.300,00	5.928.434.600,00	-	6.533.266.900,00
4	Suplemen Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Pangan	4	1	3	-	154.505.000,00	113.180.000,00	-	267.685.000,00
TOTAL		29	5	23	1	796.970.680,00	7.489.989.345,00	43.136.357,00	8.330.096.382,00

TABEL 3.28
TINDAK LANJUT PERKARA PRO-JUSTITIA DI BIDANG OBAT DAN MAKANAN
BALAI BESAR POM DI BANDUNG TAHUN 2018

No	Jenis Produk	Jumlah Perkara	Tindak lanjut					
			SPDP	Penyerahan Tahap I	P 18/P 19	P 21	Penyerahan Tahap II	Putusan Pengadilan
1	Obat	8	3	5	-	-	-	-
2	Obat Tradisional	4	1	-	1	1	1	-
3	Kosmetik	8	5	2	-	-	1	-
4	Suplemen Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-
5	Pangan	3	2	-	1	-	-	-
Total		23	11	7	2	1	2	0

2. Dukungan Teknis Investigasi Awal dan Penyidikan

Pada tahun 2018, laporan dukungan teknis investigasi awal dan penyidikan sebanyak 1 laporan, sedangkan target yang telah ditetapkan sebesar 1 laporan.

Dukungan teknis investigasi awal dan penyidikan merupakan kegiatan untuk menunjang kegiatan Penyidikan Obat dan Makanan meliputi :

2.1. Peningkatan Kompetensi SDM

Tujuan kegiatan ini untuk mewujudkan SDM khususnya PPNS yang memiliki kompetensi kinerja yang tinggi dalam menjalankan tugas dan jabatan secara professional. Pada tahun 2018, pelatihan yang diselenggarakan oleh Balai Besar POM di Bandung dan Badan POM, yaitu : Pertemuan Koordinasi PPNS di Pekanbaru, Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor Penegakan Hukum Tindak Pidana Obat dan Makanan di Bogor, Pertemuan Perkuatan Mekanisme Operasi Penyidikan Obat dan Makanan di Bogor, Diklat PPNS Badan POM di Bogor, Diklat Intelijen di Soreang, Bimbingan Teknis dan Koordinasi Lintas Sektor dalam Rangka Penegakan Hukum di Bidang Obat dan Makanan di Bandung, In House Training Intelijen di Sorong, Pelatihan Penanganan Tindak Pidana Terpadu di Bidang Obat dan Makanan di Jakarta, dan Pelatihan Intelijen Lanjutan di Semarang.

2.2. Pemusnahan Barang Bukti

Tujuan kegiatan ini untuk mencegah kemungkinan beredarnya kembali barang sitaan dan barang hasil pengawasan yang terbukti dapat membahayakan kesehatan, maka dilakukan pemusnahan. Pada tahun 2018 Balai Besar POM di Bandung telah melakukan pemusnahan dengan nilai keekonomian sebesar Rp. 8.106.134.588,-. Barang sitaan dan barang hasil pengawasan yang dimusnahkan berupa produk pangan dan sediaan farmasi (obat, kosmetik, dan obat tradisional) yang dilarang beredar karena mengandung bahan berbahaya maupun tidak memiliki ijin edar.

3.1.6 SASARAN KEGIATAN KE-6: TERWUJUDNYA REFORMASI BIROKRASI BBPOM DI BANDUNG SESUAI DENGAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI BPOM 2015-2019

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari satu indikator dengan hasil capaian dapat dilihat pada tabel 3.3.

TABEL 3.29
CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-6 TAHUN 2018
"TERWUJUDNYA REFORMASI BIROKRASI BBPOM DI BANDUNG SESUAI DENGAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI BPOM 2015-2019"

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA	
Terwujudnya Reformasi Birokrasi BBPOM di Bandung sesuai dengan road map Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019	Nilai AKIP BBPOM di Bandung	78	75.8	97%	Cukup	

Pencapaian sasaran kegiatan ke-6 di atas diukur dengan satu indikator, yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Balai Besar POM di Bandung. Indikator AKIP tersebut dihitung melalui penilaian evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Balai Besar POM di Bandung yang dilakukan oleh Inspektorat Badan POM RI. Penilaian dilakukan terhadap laporan kinerja tahun n-1 dan mencakup beberapa komponen, yaitu : perencanaan kinerja (30%), pengukuran (25%), pelaporan (15%), evaluasi internal (10%) dan capaian kinerja (20%).

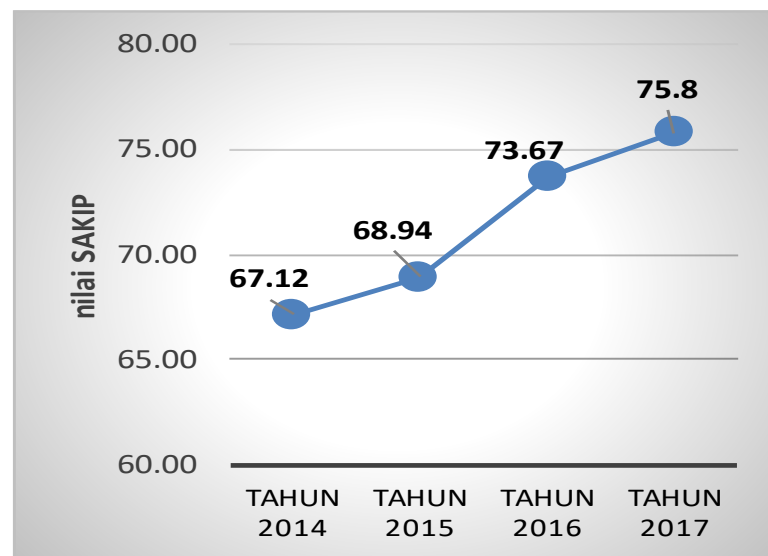
A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja tahun 2018

Pada tahun 2018, nilai SAKIP Balai Besar POM di Bandung adalah 75,8. Target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja adalah 78. Dengan demikian pada tahun 2018 capaian kinerja sasaran strategis ke-6 ini adalah sebesar **97%** dengan kriteria **Cukup**.

B. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2018 dengan tahun 2015, tahun 2016, dan tahun 2017

Pada tahun 2018, capaian indikator sasaran kinerja sasaran ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dengan kenaikan sebesar 2.13. Dari hasil evaluasi Inspektorat Badan POM RI terhadap SAKIP Balai Besar POM di Bandung, terlihat terjadi peningkatan pada komponen pelaporan (+2.2) dan evaluasi internal (+1.02), sedangkan pada komponen perencanaan, pengukuran dan capaian mengalami penurunan.

Secara lengkap profil kenaikan nilai SAKIP dapat dilihat pada gambar 3.45.



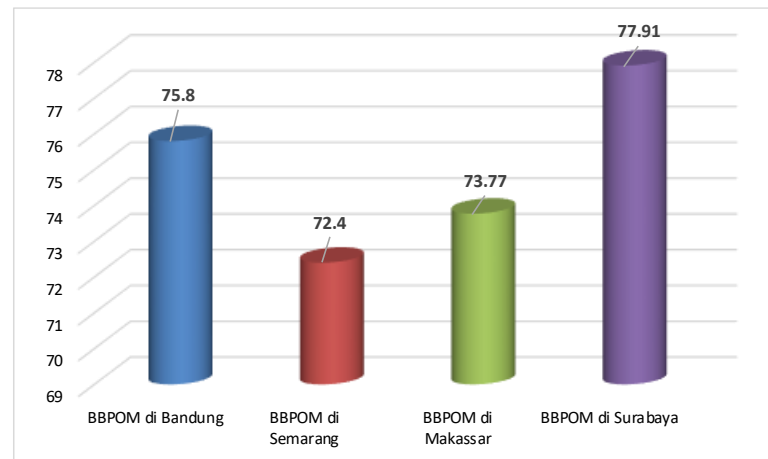
GAMBAR 3.45
PROFIL NILAI SAKIP TAHUN 2014, TAHUN 2015, TAHUN 2016 DAN TAHUN 2017

C. Perbandingan Realisasi Kinerja hingga tahun 2018 dengan target Renstra periode tahun 2015-2019

Jika dibandingkan terhadap target jangka menengah yaitu target yang terdapat dalam Renstra Balai Besar POM di Bandung tahun 2015-2019 sebesar 81, maka capaiannya adalah 94%.

D. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2017 dengan Balai POM lain

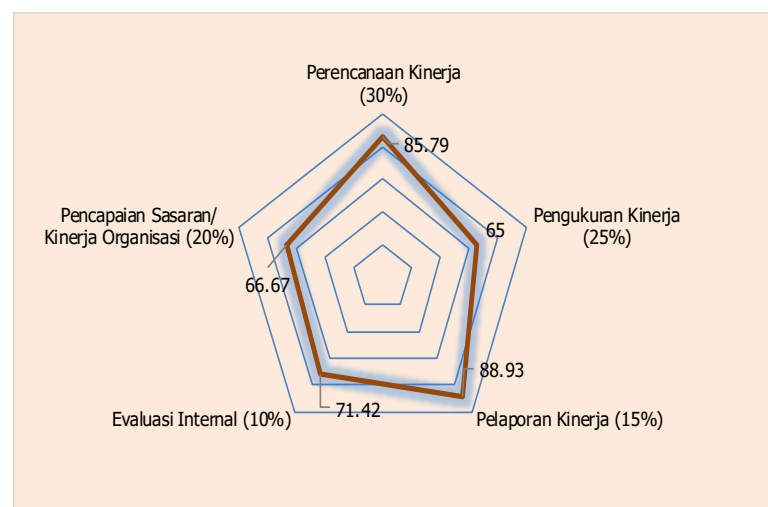
Jika dibandingkan dengan Balai Besar POM di Surabaya yang memiliki beban kerja yang sama, nilai SAKIP yang diperoleh Balai Besar POM di Bandung lebih rendah 2,11. Untuk itu, Balai Besar POM di Bandung perlu melakukan perbaikan dan peningkatan dalam penerapan SAKIP sehingga implementasi SAKIP menjadi lebih baik. Namun, demikian perolehan nilai SAKIP Balai Besar POM di Bandung lebih tinggi 3,4 jika dibandingkan dengan nilai Balai Besar POM di Semarang dan 2.03 jika dibandingkan dengan nilai Balai Besar POM di Makassar.



GAMBAR 3.46
PERBANDINGAN NILAI SAKIP BBPOM DI BANDUNG DENGAN BBPOM LAINNYA

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dari hasil evaluasi yang disampaikan oleh inspektorat, komponen yang memiliki nilai masih rendah adalah komponen pengukuran kinerja dan pencapaian capaian. Untuk itu, harus dilakukan upaya untuk meningkatkan capaian komponen tersebut. Secara lengkap hasil penilaian SAKIP dapat dilihat pada gambar 3.47.



GAMBAR 3.47
HASIL PENILAIAN AKIP BALAI BESAR POM DI BANDUNG

Dari hasil evaluasi inspektorat terhadap SAKIP BBPOM di Bandung, beberapa hal yang menjadi perhatian adalah sebagai berikut:

- Pada pengukuran kinerja masih belum optimal karena belum adanya prosedur formal terkait pengumpulan dan pengukuran data kinerja yang sistematis dan mampu telusur.



- ☛ Belum memanfaatkan hasil evaluasi internal tahun sebelumnya untuk peningkatan kinerja tahun berikutnya.

Hal ini Dengan demikian maka perlu tindakan perbaikan terkait untuk meningkatkan capaian komponen yang masih rendah tersebut, antara lain sebagai berikut:

- ☛ Peningkatan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan SAKIP di lingkungan Balai Besar POM di Bandung melalui pembuatan SOP terkait mekanisme pengumpulan data dan monitoring capaian kinerja dan cara pengukuran kinerja.
- ☛ Menindaklanjuti evaluasi program dan mengkomunikasikan hasil evaluasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- ☛ Peningkatan budaya kinerja melalui pemanfaatan hasil evaluasi internal.

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.3.

PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN KEGIATAN KE-ENAM

Dalam menunjang sasaran strategis ke-6 ini dilakukan kegiatan diantaranya pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar dan penyusunan, perencanaan, penganggaran, keuangan, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu.

1. PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA

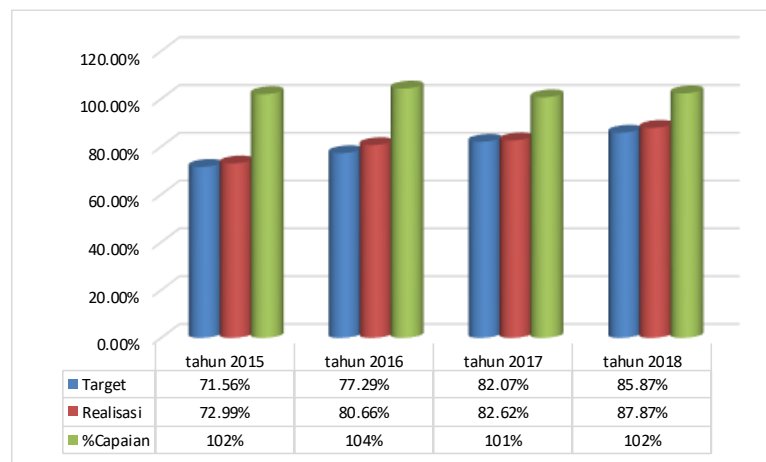
Pencapaian sasaran kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana yang terkait pengawasan Obat dan Makanan diukur dengan satu indikator yaitu: persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar. Standar yang dimaksud adalah standar sarana prasarana kerja dan standar alat laboratorium. Indikator tersebut diukur berdasarkan sarana dan prasarana serta alat laboratorium yang dimiliki. Pemenuhan sarana dan prasarana kerja dihitung dari sarana dan prasarana kerja yang dimiliki sesuai laporan BMN dalam keadaan baik dan rusak ringan dibandingkan dengan standar yang ditetapkan. Standar sarana dan prasarana kerja meliputi standar luas bangunan, meubelair dan alat pengolahan data (APD). Untuk meubelair dihitung dari inventarisasi pemenuhan kursi dan meja. Sedangkan standar alat laboratorium dihitung dari jumlah dan jenis alat laboratorium utama sesuai Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor 04.1.71.07.14.4437 tahun 2014 tentang Standar Minimal Peralatan Laboratorium Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM.

Pada tahun 2018, persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar sebesar 87.87%. sedangkan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja 87,3%. Dengan demikian capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut sebesar **102%**, dengan kriteria **Memuaskan**.

TABEL 3.30
PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA BALAI BESAR POM DI BANDUNG TAHUN 2018

JENIS SARANA PRASARANA		STANDAR	YANG DIMILIKI	% PEMENUHAN
Sarana dan prasarana Kerja (A)				
1	Luas Bangunan	7.115 m ²	5.686	79,92%
2	Meja	300 unit	265	88,33%
3	Kursi	900 unit	1001	111,22%
4	Alat Pengolah Data	227 unit	200	88,11%
RATA-RATA				91,89%
Alat Laboratorium (B)				
1	Alat Laboratorium Utama	100%	83,84	80,94%
RATA-RATA (A dan B)				87.87%

Pemenuhan sarana dan prasarana Balai Besar POM di Bandung meningkat setiap tahunnya dapat dilihat dari grafik sebagai berikut:



GAMBAR 3.48
PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI PEMENUHAN SARANA PRASARANA TAHUN 2015, TAHUN 2016, TAHUN 2017, DAN TAHUN 2018

Peningkatan pencapaian sasaran kegiatan tersebut disebabkan oleh beberapa hal diantaranya:

- ☪ Terdapat penambahan luas Gedung dan Bangunan berupa bangunan gedung kantor permanen yang digunakan sebagai Gudang vaksin dan dipinjam pakai oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Surat Perjanjian Pinjam Pakai Gedung Bangunan Nomor PR.07.06.103.12.18.5105A tanggal 28 Desember 2018.
- ☪ Peningkatan anggaran belanja modal.
- ☪ Proses pengadaan Alat Pengolah Data (APD), Perlengkapan Perkantoran, dan Alat Laboratorium Utama dapat dilaksanakan seluruhnya (100,00%).



Berbagai upaya perbaikan telah dilakukan sesuai rekomendasi yang disampaikan pada Laporan Kinerja periode sebelumnya. Untuk meningkatkan capaian kinerja Pengadaan Sarana dan Prasarana yang terkait Pengawasan Obat dan Makanan, yang telah dilakukan adalah :

- ☛ percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta
- ☛ peningkatan kompetensi SDM melalui Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa sebanyak 2 orang.

2. PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, KEUANGAN, DAN EVALUASI

Kegiatan di atas diukur dengan menggunakan satu indikator, yaitu: jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu. Indikator tersebut diukur berdasarkan jumlah dokumen meliputi: dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dihasilkan dan harus dilaporkan Balai Besar POM di Bandung. Kegiatan ini mendukung tercapainya indikator sasaran strategis nilai SAKIP, karena jumlah dokumen dan ketepatan waktu penyampaian merupakan salah satu poin penilaian SAKIP.

Pada tahun 2018, jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu sebesar 10 dokumen dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja 9 dokumen. Dengan demikian capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut sebesar 111%.

TABEL 3.31
DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI
BALAI BESAR POM DI BANDUNG TAHUN 2018

NO	JENIS DOKUMEN	BATAS WAKTU PELAPORAN	WAKTU PELAPORAN
1	Perjanjian Kinerja Tahun 2018	5 Januari 2018	5 Januari 2018
2	RKAKL/DIPA tahun 2018	5 Desember 2017	5 Desember 2017
3	Laporan Kinerja tahun 2017	15 Februari 2018	15 Februari 2018
4	Laporan Triwulan I	5 April 2018	5 April 2018
5	Laporan Triwulan II	5 Juli 2018	5 Juli 2018
6	Laporan Triwulan III	5 Oktober 2018	5 Oktober 2018
7	Laporan Tahunan tahun 2017	15 Februari 2018	15 Februari 2018
8	Laporan Keuangan tahun 2017	8 Januari 2018	8 Januari 2018
9	Laporan Keuangan Semester 1 tahun 2018	9 Juli 2018	9 Juli 2018
10	Revisi Renstra tahun 2015-2019	September 2018	September 2018

Upaya yang telah dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu antara lain:



- ✎ Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi harus sesuai dengan Pedoman yang telah ditetapkan.
- ✎ Penyusunan dokumen perencanaan dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika perubahan lingkungan strategis baik nasional maupun internasional.

3.2. REALISASI ANGGARAN

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Nomor 23 Tahun 2013, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Keuangan Balai Besar POM di Bandung tahun 2017 telah dilaporkan melalui Laporan Keuangan, berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pada tahun 2018 Balai Besar POM di Bandung memperoleh anggaran sebesar Rp. 63.075.093.000,00 (DIPA Awal). Anggaran tersebut terdiri atas Belanja Pegawai; Belanja Barang; serta Belanja Modal. Pada tanggal 14 Agustus 2018 dilakukan pemotongan APBNP sebesar Rp. 968.440.000,00 sehingga anggaran yang dikelola oleh Balai Besar POM di Bandung menjadi sebesar Rp. 62.106.653.000,00.

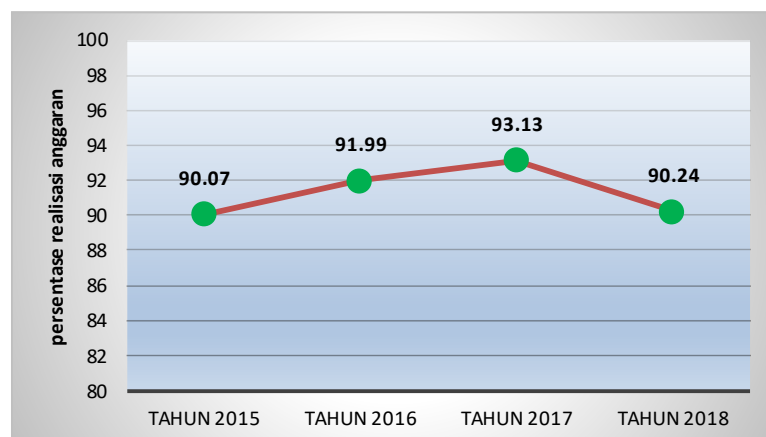
Secara keseluruhan serapan anggaran pada tahun 2018 yaitu sebesar 90,24%. Terjadi penurunan sebesar 2,89% dibanding tahun anggaran 2017 yang mencapai 93,13%. Perincian alokasi anggaran dan realisasinya dapat dilihat pada tabel 3.32 dibawah ini:

TABEL 3.32
RINCIAN REALISASI ANGGARAN BALAI BESAR POM DI BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2018

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Pegawai	Rp 19,373,505,000	Rp 18,810,010,873	97,09
2.	Belanja Barang	Rp 37,299,676,000	Rp 32,354,349,912	86,74
3.	Belanja Modal	Rp 5,433,472,000	Rp 4,883,781,298	89,88
JUMLAH		Rp 62,106,653,000	Rp 56,048,142,083	90,24

Penurunan serapan tersebut disebabkan karena:

1. Pagu anggaran Output Penguatan Kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan di Kab/Kota, yang termasuk dalam kegiatan Prioritas Nasional, tidak dapat direalisasikan secara maksimal (65,91 %) dikarenakan Operasional Kantor Loka POM Kabupaten Bogor dan Kota Tasikmalaya baru dilaksanakan pada akhir bulan Agustus 2018.
2. Efisiensi penyerapan pagu anggaran output Penyediaan Alat Laboratorium
3. Sisa anggaran kegiatan Layanan Publik cukup besar, disebabkan ada beberapa kegiatan KIE yang tidak dihadiri peserta sesuai dengan alokasi anggaran yang sudah disediakan.



GAMBAR 3.49
PERBANDINGAN SERAPAN ANGGARAN TAHUN 2015, TAHUN 2016, TAHUN 2017 DAN TAHUN 2018

Dalam rangka perbaikan ke depan diperlukan perencanaan yang lebih matang pada saat penyusunan anggaran sehingga dapat meminimalkan anggaran yang tidak terserap. Gambaran pencapaian sasaran kegiatan dengan alokasi anggaran dibandingkan realisasinya dapat dilihat pada tabel 3.33.

TABEL 3.33
ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN SASARAN KEGIATAN

NO	SASARAN KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE CAPAIAN
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu di wilayah kerja BBPOM Bandung	2.519.410.000	2.398.896.745	95,22
2.	Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM Bandung	681.220.000	649.240.800	95,31
3.	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM Bandung	14.029.653.000	12.904.376.493	91,98
4.	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja BBPOM Bandung	11.312.909.000	10.327.805.102	91,29
5.	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM Bandung	2.343.100.000	2.118.105.050	90,40
6.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi BBPOM di Bandung sesuai dengan road map Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019	31.220.361.000	27.649.717.893	88,56
TOTAL		62.106.653.000	56.048.142.083	90,24

Berdasarkan data tersebut di atas dapat dilihat bahwa persentase capaian anggaran yang paling besar serapannya adalah untuk mendukung sasaran kegiatan kedua, yaitu "Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM Bandung" (95,31 %) dan diikuti oleh sasaran pertama yaitu "Terwujudnya Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu di wilayah kerja BBPOM Bandung" (95,22 %). Persentase capaian anggaran terendah adalah untuk sasaran kegiatan keenam, yaitu : "Terwujudnya Reformasi Birokrasi BBPOM di Bandung sesuai dengan road map Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019" sebesar 88,56 %. Hal ini disebabkan adanya penyerapan yang rendah dalam kegiatan "Penguatan Kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan di Kab/Kota", sebagaimana telah dijelaskan diatas.

3.3. ANALISIS EFISIENSI KEGIATAN

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu sasaran kegiatan untuk menggunakan *input* yang lebih sedikit dalam menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau penggunaan *input* yang sama dapat menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau persentase capaian *output* sama/lebih tinggi daripada persentase capaian *input*. Efisiensi suatu sasaran kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input*, sesuai rumus berikut:

$$\text{IE} = \frac{\% \text{ CAPAIAN OUTPUT}}{\% \text{ CAPAIAN INPUT}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$\text{SE} = \frac{\% \text{ RENCANA CAPAIAN OUTPUT}}{\% \text{ RENCANA CAPAIAN INPUT}} = 100\%$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Efisiensi ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut:

Apabila $\text{IE} \geq \text{SE}$: kegiatan efisien
Apabila $\text{IE} < \text{SE}$: kegiatan tidak efisien



Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Dalam laporan kinerja ini, pengukuran tingkat efisiensi bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dalam laporan kinerja ini dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan hanya didasarkan pada rasio antara *output* dan *input* (berupa dana). Pengukuran efisiensi kegiatan secara lengkap dapat dilihat pada lampiran 6.

Dari perhitungan tingkat efisiensi Sasaran Kegiatan, terlihat bahwa semua Sasaran Kegiatan memiliki kategori efisien.

Dari data perhitungan efisiensi terlihat bahwa Sasaran Kegiatan Terwujudnya RB BBPOM di Bandung sesuai roadmap RB BPOM 2015 – 2019 memiliki tingkat efisiensi tertinggi. Sasaran Kegiatan ini didukung oleh 4 kegiatan yaitu Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi; Pengadaan sarana dan prasarana penunjang kerja; Layanan perkantoran dan Penguatan kelembagaan pengawasan obat dan makanan di kabupaten/kota. Dari 4 kegiatan tersebut yang memiliki tingkat efisiensi tertinggi adalah kegiatan Penguatan kelembagaan pengawasan obat dan makanan di Kabupaten/Kota (TE : 1,04) dan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi (TE : 0,19). Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten/Kota mendapat tingkat efisiensi tertinggi karena target 2 kabupaten/kota dapat terpenuhi 100 % dalam periode 4 bulan terakhir dari tahun anggaran 2018, hal ini disebabkan pembentukan Loka kabupaten Bogor dan Kota Tasikmalaya baru dilaksanakan pada bulan September 2018 dan pada kegiatan ini dialokasikan juga anggaran Penguatan Kelembagaan untuk menutupi Tukin 80 %, yang disiapkan untuk 12 bulan, namun kenaikan Tukin 80% hanya ditetapkan 6 bulan (Juli – Desember 2018), sehingga alokasi anggaran yang terserap sebesar 49.04 %.

Untuk Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat Terhadap Obat dan Makanan Aman di wilayah kerja BBPOM di Bandung tingkat efisiensinya juga tinggi. Sasaran Kegiatan ini didukung oleh kegiatan : Layanan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan; Komunitas yang diberdayakan dan Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS). Layanan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan menyumbang tingkat efisiensi yang tinggi (TE : 0,63). Dari target 3500 layanan, pada tahun 2018 dapat dilakukan 4406 layanan (125,89%) namun alokasi anggaran yang digunakan hanya 77,31%. Layanan informasi diukur berdasarkan jenis dan



frekuensi layanan informasi dan tindak lanjut pengaduan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Bandung baik penyuluhan langsung atau melalui media cetak/elektronik. Jenis layanan informasi antara lain : talkshow, pameran, penyuluhan, bimtek, iklan layanan masyarakat, layanan informasi, tindak lanjut pengaduan, narasumber. Peningkatan capaian tahun 2018 disebabkan telah ditetapkan petugas yang khusus melayani di loket unit layanan pengaduan konsumen (ULPK) dan Pelayanan Pengujian, sehingga pelayanan dapat meningkat. Disamping itu, kegiatan pelayanan publik sebagian besar tidak menggunakan dana secara langsung, misalnya layanan pengaduan konsumen.

Pengukuran tingkat efisiensi terendah didapat dari Sasaran Kegiatan Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung. Sasaran Kegiatan ini didukung oleh kegiatan Penyelenggaraan Sosialisasi/ Workshop/ Diseminasi/ Seminar/ Publikasi/ Penyuluhan, pada tahun ini target sebanyak 128 kegiatan dapat terlaksana seluruhnya (100%), dengan alokasi dana yang digunakan sebanyak 95,83 %. Besarnya prosentase alokasi dana yang digunakan cukup besar, dikarenakan kegiatan Penyelenggaraan Sosialisasi/ Workshop/ Diseminasi/ Seminar/ Publikasi/ Penyuluhan dilakukan di daerah yang cukup jauh dari ibukota kabupaten/kota sehingga dana akomodasi yang digunakan cukup besar.



BAB 4

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Balai Besar POM di Bandung Tahun 2018 mengukur pencapaian kinerja berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2018 yang berlandaskan Renstra Balai Besar POM di Bandung Tahun 2015-2019. Pada tahun 2018 yang merupakan tahun keempat dari RPJM tahap ketiga (2015-2019), Balai Besar POM di Bandung secara umum dapat berhasil mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Sasaran Kegiatan kesatu yaitu "Terwujudnya Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu di Provinsi Jawa Barat" diperoleh capaian indikator kinerja dengan kategori **memuaskan** sebanyak 3 (tiga) indikator, yaitu persentase obat yang memenuhi syarat di provinsi Jawa Barat, persentase kosmetika yang memenuhi syarat di provinsi Jawa Barat, dan persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat di provinsi Jawa Barat. 1 (satu) indikator kinerja dengan kategori **baik** yaitu persentase obat tradisional yang memenuhi syarat di provinsi Jawa Barat, dan 2 (dua) indikator kinerja dengan kategori **cukup**, yaitu indeks pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung dan persentase makanan yang memenuhi syarat di provinsi Jawa Barat.
2. Sasaran Kegiatan kedua yaitu "Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung" dengan indikator kegiatan Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang obat dan makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung, capaian indikator kinerja kategori **tidak dapat disimpulkan**.
3. Sasaran Kegiatan ketiga yaitu "Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Bandung" diperoleh capaian indikator kinerja dengan kategori **memuaskan**, yaitu Indeks pengetahuan masyarakat.
4. Sasaran Kegiatan keempat yaitu "Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di provinsi Jawa Barat" diperoleh capaian indikator kinerja dengan kategori **memuaskan** sebanyak 3 (tiga) indikator, yaitu persentase sarana produksi



Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Bandung, persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Bandung dan persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di provinsi Jawa Barat. 1 (satu) indikator kinerja dengan kategori **baik** yaitu persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di provinsi Jawa Barat, dan 1 (satu) indikator kinerja dengan kategori **cukup**, yaitu rasio tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Bandung.

5. Sasaran Kegiatan kelima yaitu "Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana obat dan makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung" diperoleh capaian indikator kinerja dengan kategori **tidak dapat disimpulkan**, yaitu Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM di Bandung.
6. Sasaran kegiatan keenam yaitu "Terwujudnya reformasi birokrasi BBPOM di Bandung sesuai dengan road map reformasi birokrasi BPOM 2015-2019" diperoleh capaian indikator kinerja dengan kategori **cukup**, yaitu nilai AKIP BBPOM di Bandung.
7. Realisasi anggaran pada tahun 2018 dengan presentase **90,24%** yaitu sebesar Rp. 56.048.142.083,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp. 62.106.653.000,00. Dari kegiatan yang telah dilaksanakan diperoleh hasil bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Bandung berjalan secara efisien.

4.2. SARAN

Untuk melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan perlu dilakukan strategi yang tepat, sehingga dengan sumber daya yang ada dapat diperoleh hasil yang maksimal. Untuk mengatasi berbagai masalah dan kendala tersebut, maka Balai Besar POM di Bandung perlu melakukan beberapa pendekatan, antara lain :

1. Koordinasi dengan lintas sektor lebih diintensifkan sehingga inpres No. 3 tahun 2018 tentang peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan dapat dilaksanakan dengan baik melalui pemantapan jaringan pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Wilayah Provinsi Jawa Barat.
2. Menjalin kerjasama dengan stake holder terkait, sehingga instansi yang berkomitmen dalam pengawasan Obat dan Makanan lebih banyak lagi. Selain itu program atau kegiatan yang merupakan tanggungjawab dari pemangku kepentingan didorong agar dilaksanakan secara mandiri sehingga kerjasama/kemitraan berjalan sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.
3. Peningkatan implementasi SAKIP di lingkungan Balai Besar POM di Bandung serta melaksanakannya secara konsisten dan berkelanjutan.
4. Mengupayakan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik dan melaksanakan area perubahan reformasi birokrasi secara terus menerus dan berkesinambungan.

LAMPIRAN 1
RENCANA STRATEGIS
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG
TAHUN 2015-2019

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target		
			2015	2016	2017
Balai Besar/Balai POM di Bandung					
	SS 1	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan			
	1.1.	Persentase obat yang memenuhi syarat	92.00	92.50	93.00
	1.2.	Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	59.54	60.54	61.54
	1.3.	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	87.41	88.41	89.41
	1.4.	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	99.67	99.67	99.67
	1.5.	Persentase makanan yang memenuhi syarat	66.53	67.03	67.53
	SS 2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat			
	2.1.	Tingkat Kepuasan Masyarakat	82,33	82,33	82,33
	2.2.	Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	1	2	3
	SS 3	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BB/BPOM di Bandung			
	3.1.	Nilai SAKIP BB/BPOM di Bandung	BB	BB	BB
Program Pengawasan Obat dan Makanan					
	SP 1	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan			
	1.1.	Persentase obat yang memenuhi syarat	92.00	92.50	93.00
	1.2.	Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	59.54	60.54	61.54

1.3.	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	Provinsi Jawa Barat	87.41	88.41	89.41
1.4.	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	Provinsi Jawa Barat	99.67	99.67	99.67
1.5.	Persentase makanan yang memenuhi syarat	Provinsi Jawa Barat	66.53	67.03	67.53
SP 2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat				
2.1.	Tingkat Kepuasan Masyarakat	Provinsi Jawa Barat	82.33	82.33	82.41
2.2.	Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	Provinsi Jawa Barat	1	2	3
SP 3	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BB/BPOM di Bandung				
3.1.	Nilai SAKIP BB/BPOM di Bandung	Provinsi Jawa Barat	BB	BB	BB
Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar/Balai POM di Bandung					
Meningkatnya kinerja pengawasan obat dan makanan di seluruh Indonesia					
1	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	Provinsi Jawa Barat	4.800	4.800	4.453
2	Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)	Provinsi Jawa Barat	100%	100%	100%
3	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	Provinsi Jawa Barat	2.36	2.36	2.36
4	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	Provinsi Jawa Barat	15.29	15.29	15.29
5	Jumlah Perkara di bidang penyidikan obat dan makanan	Provinsi Jawa Barat	23	23	23
6	Jumlah layanan publik BB/BPOM	Provinsi Jawa Barat	2515	2515	2515
7	Jumlah Komunitas yang diberdayakan	Provinsi Jawa Barat	22	27	35
8	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Provinsi Jawa Barat	10	9	10
9	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	Provinsi Jawa Barat	71.56	77.29	82.07

LAMPIRAN 1a
RENCANA STRATEGIS (HASIL REVISI SOTK BARU)
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG
TAHUN 2015-2019

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target		
			2018	2019	
Balai Besar POM di Bandung					
	SK 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Jawa Barat			
	1.1.	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	Provinsi Jawa Barat	70	71
	1.2.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	Provinsi Jawa Barat	93.5	94
	1.3.	Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	Provinsi Jawa Barat	83	75
	1.4.	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	Provinsi Jawa Barat	92	85
	1.5.	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	Provinsi Jawa Barat	95	96
	1.6.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Provinsi Jawa Barat	89.6	71
	SK 2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar/Balai POM di Bandung			
	2.1.	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	Provinsi Jawa Barat	60	61
	2.2.	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman	Provinsi Jawa Barat	-	66
	SK3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di Wilayah Kerja Balai Besar/Balai POM di Bandung			
	3.1.	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	Provinsi Jawa Barat	60	61
	SK 4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Jawa Barat			
	4.1	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar		100	100
	4.2	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Provinsi Jawa Barat	33	40
	4.3	Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	Provinsi Jawa Barat	45	55

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target	
			2018	2019
	4.4 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Provinsi Jawa Barat	84	85
	4.5 Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan	Provinsi Jawa Barat	40	50
	SK 5 Meningkatkan efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar/Balai POM di Bandung			
	5.1. Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II	Provinsi Jawa Barat	50	50
	SK 6 Terwujudnya Reformasi Birokrasi BBPOM/BPOM di Bandung sesuai dengan roadmap Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019			
	6.1 Nilai AKIP BBPOM di Bandung	Provinsi Jawa Barat	78	81
Program Pengawasan Obat dan Makanan				
Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar/Balai POM di Bandung				
	Meningkatnya kinerja pengawasan obat dan makanan di Provinsi Jawa Barat			
	1 Jumlah Perkara Di Bidang Obat Dan Makanan	Provinsi Jawa Barat	23	—
	2 Jumlah Sampel Yang Diuji Menggunakan Parameter Kritis	Provinsi Jawa Barat	4507	—
	3 Persentase Cakupan Pengawasan Sarana Produksi Obat Dan Makanan	Provinsi Jawa Barat	2.13	—
	4 Persentase Cakupan Pengawasan Sarana Distribusi Obat Dan Makanan	Provinsi Jawa Barat	15.29	—
	5 Jumlah Layanan Publik BB/BPOM	Provinsi Jawa Barat	3500	—
	6 Jumlah Komunitas Yang Diberdayakan	Provinsi Jawa Barat	1272	—
	7 Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Sesuai Standar	Provinsi Jawa Barat	87.3	—
	8 Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Yang Dilaporkan Tepat Waktu	Provinsi Jawa Barat	9	—
	9 Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat	Provinsi Jawa Barat	93.5	94
	10 Persentase Obat Tradisional Yang Memenuhi Syarat	Provinsi Jawa Barat	83	75
	11 Persentase Suplemen Kesehatan Yang Memenuhi Syarat	Provinsi Jawa Barat	92	85
	12 Persentase Kosmetik Yang Memenuhi Syarat	Provinsi Jawa Barat	95	96

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target	
			2018	2019
	13 Persentase Makanan Yang Memenuhi Syarat	Provinsi Jawa Barat	89.6	71
	14 Persentase Sarana Produksi Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan	Provinsi Jawa Barat	33	40
	15 Persentase Sarana Distribusi Obat Yang Memenuhi Ketentuan	Provinsi Jawa Barat	45	55
	16 Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu	Provinsi Jawa Barat	84	85
	17 Rasio Tindaklanjut Hasil Pengawasan Obat Dan Makanan Yang Dilaksanakan	Provinsi Jawa Barat	50	50
	18 Persentase Perkara Yang Diselesaikan Hingga Tahap II	Provinsi Jawa Barat	50	50
	19 Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Obat Dan Makanan	Provinsi Jawa Barat	60	61
	20 Nilai AKIP BBPOM di Bandung	Provinsi Jawa Barat	78	81



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

Jl. Pasteur No. 25 Bandung 40171

Telp. : 022 4230546, 4213152, 4266620, 4200381, 4200382 Fax. : 022 4230546

Email : bpom_bandung@pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : I Gusti Ngurah Bagus Kusuma Dewa, S.Si., Apt., MPPM
Jabatan : Kepala Balai Besar POM di Bandung
Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P
Jabatan : Kepala Badan POM RI
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandung, 12 September 2018

Pihak Kedua

Pihak Pertama



(Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P)

(I Gusti Ngurah Bagus Kusuma Dewa, S.Si., Apt., MPPM)



**BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG**

Jl. Pasteur No. 25 Bandung 40171

Telp. : 022 4230546, 4213152, 4266620, 4200381, 4200382 Fax. : 022 4230546

Email : bpom_bandung@pom.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
BALAI BESAR POM DI BANDUNG**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
RENJA 2018 (OTK Lama)			
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	4.507
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	2,13
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	15,29
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah Perkara di bidang Obat dan Makanan	23
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang terkait Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	85,87
6	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	9
7	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	Jumlah layanan publik	3.500
		Jumlah komunitas yang diberdayakan	42
PETA STRATEGI 2018 (OTK Baru)			
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu di Provinsi Jawa Barat	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM Bandung	70.00
		Persentase Obat yang memenuhi syarat di Provinsi Jawa Barat	93.50
		Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat di Provinsi Jawa Barat	83.00
		Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat di Provinsi Jawa Barat	92.00
		Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat di Provinsi Jawa Barat	95.00
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat di Provinsi Jawa Barat	89.60
		Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang obat dan makanan di wilayah kerja BBPOM Bandung	60.00
2	Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM Bandung	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang obat dan makanan di wilayah kerja BBPOM Bandung	60.00
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM Bandung	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan amandi wilayah kerja BBPOM Bandung	60.00
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Jawa Barat	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Jawa Barat	100,00
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuandi wilayah kerja BBPOM Bandung	33.00
		Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuandi wilayah kerja BBPOM Bandung	45.00
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktudi Provinsi Jawa Barat	84.00
		Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakandi wilayah kerja BBPOM Bandung	40.00

**BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG**

Jl. Pasteur No. 25 Bandung 40171

Telp. : 022 4230546, 4213152, 4266620, 4200381, 4200382 Fax. : 022 4230546

Email : bpom_bandung@pom.go.id

5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM Bandung	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap Ildi wilayah kerja BBPOM Bandung	50.00
6	Terwujudnya Reformasi Birokrasi BBPOM di Bandung sesuai dengan road map Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019	Nilai AKIP BBPOM di Bandung	78.00

Kegiatan :

- Program Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia** Rp **62.106.653.000**

Bandung, 12 September 2018

Pihak Kedua

(Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P)

Pihak Pertama

(I Gusti Ngurah Bagus Kusuma Dewa, S.Si., Apt.,MPPM)




























RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG
TAHUN 2018

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					REALISASI				
			B3	B6	B9	B12*	B3	B6	B9	B12		
RENJA 2018 (OTK Lama)												
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	1127	2254	3380	4.507						
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	0,52	1,19	1,89	2,13						
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	6,33	10,01	12,35	15,29						
4	Meningkatnya hasil tindaklanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah Perkara di bidang Obat dan Makanan	6	12	17	23						
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang terkait Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar			85,87	85,87						
6	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	5	6	8	9						
7	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	Jumlah layanan publik	875	1750	2625	3.500						
PETA STRATEGI (OTK Baru)												
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Jawa Barat	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	70,00	70,00	70,00	70,00						
		Persentase obat yang memenuhi syarat di Provinsi Jawa Barat	93,50	93,50	93,50	93,50						
		Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat di Provinsi Jawa Barat	62,54	62,54	62,54	83,00						
		Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat di Provinsi Jawa Barat	95,00	95,00	95,00	92,00						
		Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat di Provinsi Jawa Barat	90,41	90,41	90,41	95,00						
		Persentase makanan yang memenuhi syarat	85,00	85,00	85,00	89,60						
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang obat dan makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung				100,00						

LAMPIRAN 4
PENGUKURAN KINERJA SASARAN KEGIATAN
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG
TAHUN 2018

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGE T	REALISAS I	% CAPAIA N	KRITERIA
RENJA 2018 (OTK Lama)					
Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	4507	4516	100%	Baik 
Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	2.13	2.25	106%	Memuaskan 
Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	15.29	15.31	100%	Baik 
Meningkatnya hasil tindaklanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah Perkara di bidang Obat dan Makanan	23	23	100%	Baik 
Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	Jumlah layanan publik	3500	4406	126%	Tidak Dapat Disimpulkan 
	Jumlah komunitas yang diberdayakan	42	42	100%	Baik 
Pengadaan Sarana dan Prasarana yang terkait	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	85.87	87.87	102%	Memuaskan 

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGE T	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Pengawasan Obat dan Makanan					
Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	9	10	111%	Memuaskan 
PETA STRATEGI 2018 (OTK Baru)					
Terwujudnya Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu di Provinsi Jawa Barat	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	70	66.6	95%	Cukup 
	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93.5	98.3	105%	Memuaskan 
	Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	83	83.31	100%	Baik 
	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	92	99.38	108%	Memuaskan 
	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	95	99.07	104%	Memuaskan 
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	89.6	83.19	93%	Cukup 
Meningkatnya Kemandirian Pelaku Usaha, Mitra Dengan Pemangku Kepentingan, Dan Partisipasi Masyarakat	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang obat dan makanan di wilayah kerja BBPOM Bandung	60	83.71	140%	Tidak Dapat Disimpulkan 
	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM Bandung	60	71.01	118%	Memuaskan 

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGE T	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA	
Dan Makanan Aman Di Wilayah Kerja Bbpom Bandung Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Jawa Barat	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar	100	100	100%	Baik	
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM Bandung	33	39.54	120%	Memuaskan	
	Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM Bandung	45	52.67	117%	Memuaskan	
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja BBPOM Bandung	84	90.39	108%	Memuaskan	
	Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM Bandung	40	36.21	91%	Cukup	
Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM Bandung Terwujudnya Reformasi Birokrasi BBPOM di Bandung sesuai dengan road map	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM Bandung	50	69.57	139%	Tidak Dapat Disimpulkan	
	Nilai AKIP BBPOM di Bandung	78	75.8	97%	Cukup	

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGE T	REALISAS I	% CAPAIA N	KRITERIA
Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019					
Kegiatan	: Pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Bandung				
Anggaran	: Rp. 62.106.653.000,00				
Realisasi Anggaran	: Rp. 56,048,142,083,00				

LAMPIRAN 5
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG
TAHUN 2018

NO	SASARAN KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Jawa Barat	Sampel Makanan yang diuji dengan parameter kritis	Input : Dana Output : Jumlah sampel makanan yang diuji	Rp sampel	742,716,000 1350	710,000,576 1356	95.60 100.44
		Sampel Obat yang diuji dengan parameter kritis	Input : Dana Output : Jumlah sampel obat yang diuji	Rp sampel	1,776,694,000 3157	1,688,896,169 3160	95.06 100.10
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	Penyelenggaraan Sosialisasi/ Workshop/ Diseminasi/ Seminar/ Publikasi/ Penyuluhan	Input : Dana Output : Jumlah kegiatan	Rp kegiatan	10,495,178,000 128	10,057,068,868 128	95.83 100.00
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Bandung	Layanan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	Input : Dana Output : Jumlah layanan publik BBPOM	Rp layanan	316,296,000 3500	244,517,550 4406	77.31 125.89
		Komunitas yang diberdayakan	Input : Dana Output : Jumlah komunitas yang diberdayakan	Rp komunitas	450,231,000 42	346,810,000 42	77.03 100.00
		Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)	Input : Dana	Rp	3,449,168,000	2,905,220,875	84.23

NO	SASARAN KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Jawa Barat	Dukungan Teknis dan Manajemen Laboratorium	Output : Jumlah sekolah yang diintervensi	sekolah	1230	1230	100.00
			Input : Dana	Rp	3,236,526,000	3,028,970,115	93.59
		Penyediaan Alat Laboratorium	Output : Jumlah dokumen kegiatan yang dilaksanakan	dokumen	1	1	100.00
			Input : Dana	Rp	4,610,535,000	4,078,773,500	88.47
		Cakupan Pengawasan Sarana Produksi Obat dan Makanan	Output : Jumlah alat laboratorium yang diadakan	unit	27	27	100.00
			Input : Dana	Rp	809,107,000	786,831,720	97.25
		Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Sarana Pelayanan Kefarmasian	Output : Jumlah sarana produksi obat dan makanan yang diperiksa	sarana	386	411	106.48
			Input : Dana	Rp	756,451,000	654,527,500	86.53
		Pengawasan Sarana Distribusi Obat Tradisional, Kosmetika, Suplemen Kesehatan dan Makanan	Output : Jumlah sarana distribusi obat yang diperiksa	sarana	844	974	115.40
			Input : Dana	Rp	1,136,670,000	1,054,772,520	92.79
Audit Sarana Dalam Rangka Sertifikasi, Labelisasi Halal, Surveilans	Output : Jumlah sarana yang diperiksa	sarana	1036	1164	112.36		
	Input : Dana	Rp	763,620,000	723,929,747	94.80		
					382	416	108.90

NO	SASARAN KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	Penyidikan obat dan makanan	Input : Dana	Rp	1,925,000,000	1,716,097,971	89.15
			Output : Jumlah perkara di bidang obat dan makanan	perkara	23	23	100.00
6	Terwujudnya RB BBPOM di Bandung sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	Dukungan Teknis Investigasi Awal dan Penyidikan di Bidang Obat dan Makanan	Input : Dana	Rp	418,100,000	402,007,079	96.15
			Output : Jumlah laporan yang ditangani	laporan	1	1	100.00
		Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	Input : Dana	Rp	2,505,739,000	2,334,790,304	93.18
			Output : Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	dokumen	9	10	111.11
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kerja	Input : Dana	Rp	777,937,000	748,856,062	96.26
			Output : Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan	sarana	1	1	100.00
Layanan Perkantoran	Input : Dana	Rp	22,856,905,000	22,074,710,139	96.58		
	Output : Jumlah bulan layanan	bulan	12	12	100.00		
Penguatan kelembagaan pengawas obat dan makanan di Kabupaten/Kota	Input : Dana	Rp	5,079,780,000	2,491,361,388	49.04		
	Output : Jumlah kab/kota	kab/kota	2	2	100.00		

LAMPIRAN 6
PENGUKURAN TINGKAT EFISIENSI KINERJA
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG
TAHUN 2018

NO	SASARAN KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN	RATA-RATA % CAPAIAN TARGET		IE	SE	KATEGORI	TE
			INPUT	OUTPUT				
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Jawa Barat	Sampel Makanan yang diuji dengan parameter kritis	95.60	100.44	1.05	1	EFISIEN	0.05
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	Sampel Obat yang diuji dengan parameter kritis Penyelenggaraan Sosialisasi/ Workshop/ Diseminasi/ Seminar/ Publikasi/ Penyuluhan	95.06	100.10	1.05	1	EFISIEN	0.05
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Bandung	Layanan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Komunitas yang diberdayakan Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Dukungan Teknis dan Manajemen Laboratorium Penyediaan Alat Laboratorium	77.31	125.89	1.63	1	EFISIEN	0.63
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Jawa Barat	Kemampuan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Dukungan Teknis dan Manajemen Laboratorium Penyediaan Alat Laboratorium Cakupan Pengawasan Sarana Produksi Obat dan Makanan Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan	77.03	100.00	1.30	1	EFISIEN	0.30
			84.23	100.00	1.19	1	EFISIEN	0.19
			93.59	100.00	1.07	1	EFISIEN	0.07
			88.47	100.00	1.13	1	EFISIEN	0.13
			97.25	106.48	1.09	1	EFISIEN	0.09
			86.53	115.40	1.33	1	EFISIEN	0.33



DAFTAR TABEL



TABEL		HALAMAN
TABEL 2.1	Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Bandung Tahun 2018 (OTK Lama)	24
TABEL 2.2	Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Bandung Tahun 2018 (OTK Lama dan OTK Baru)	25
TABEL 2.3	Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja.....	27
TABEL 3.1	Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Tahun 2018	28
TABEL 3.2	Perbandingan Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018.....	29
TABEL 3.3	Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan ke-1 Tahun 2018	31
TABEL 3.4	Capaian Kinerja Indikator “Indeks Pengawasan Obat dan Makanan” Tahun 2018	31
TABEL 3.5	Capaian Kinerja Indikator “Persentase Obat yang memenuhi syarat” Tahun 2018	35
TABEL 3.6	Capaian Kinerja Indikator “Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat” Tahun 2018	39
TABEL 3.7	Capaian Kinerja Indikator “Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat” Tahun 2018	43
TABEL 3.8	Capaian Kinerja Indikator “Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat” Tahun 2018	47
TABEL 3.9	Capaian Kinerja Indikator “Persentase Makanan yang memenuhi syarat” Tahun 2018	50
TABEL 3.10	Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan ke-2 Tahun 2018	56
TABEL 3.11	Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan ke-3 Tahun 2018	60



TABEL

HALAMAN

TABEL 3.12	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	61
TABEL 3.13	Kegiatan Mendukung Meningkatnya Indeks Pengetahuan Masyarakat terhadap Obat dan Makanan Aman.....	63
TABEL 3.14	Layanan Informasi Tahun 2018.....	63
TABEL 3.15	Rincian Komunitas yang Diberdayakan.....	64
TABEL 3.16	Target dan Realisasi Sekolah Yang Diintervensi PJAS	65
TABEL 3.17	Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan ke-4 Tahun 2018	66
TABEL 3.18	Capaian Kinerja Indikator “Persentase Pemenuhan Pengujian Sesuai Standar” Tahun 2018.....	67
TABEL 3.19	Capaian Kinerja Indikator “Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan” Tahun 2018	70
TABEL 3.20	Capaian Kinerja Indikator “Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan” Tahun 2018	74
TABEL 3.21	Capaian Kinerja Indikator “Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu” Tahun 2018	78
TABEL 3.22	Capaian Kinerja Indikator “Persentase Rasio Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang Dilaksanakan di Wilayah Kerja BBPOM di Bandung” Tahun 2018.....	83
TABEL 3.23	Pengadaan alat laboratorium tahun 2018	88
TABEL 3.24	Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan ke-5 Tahun 2018 “Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM di Bandung”	92
TABEL 3.25	Perbandingan Persentase Perkara yang diselesaikan hingga tahap II di Wilayah Kerja BBPOM di Bandung Tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018	93
TABEL 3.26	Perincian Kasus Berdasarkan Laporan Kejadian Tahun 2018	95
TABEL 3.27	Hasil Penyidikan Kasus Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan Balai Besar POM di Bandung Tahun 2018	99
TABEL 3.28	Tindak Lanjut Perkara Pro-Justitia di Bidang Obat dan Makanan Balai Besar POM di Bandung Tahun 2018	99
TABEL 3.29	Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan ke-6 Tahun 2018 “Terwujudnya Reformasi Birokrasi BBPOM di Bandung sesuai dengan road map Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019”	100



TABEL

HALAMAN

TABEL 3.30	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Balai Besar POM di Bandung Tahun 2018.....	104
TABEL 3.31	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Balai Besar POM di Bandung Tahun 2018	105
TABEL 3.32	Rincian Realisasi Anggaran Balai Besar POM di Bandung Tahun Anggaran 2018	107
TABEL 3.33	Alokasi dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Kegiatan	108



DAFTAR GAMBAR



GAMBAR HALAMAN

GAMBAR 1.1	Struktur Organisasi Balai Besar PdOM di Bandung.....	4
GAMBAR 1.2	Struktur Organisasi Loka Tasikmalaya dan Bogor.....	7
GAMBAR 1.3	Profil Tingkat Pendidikan SDM Balai Besar POM di Bandung	9
GAMBAR 1.4	Wilayah Kerja Balai Besar POM di Bandung, Loka POM Bogor, dan Loka POM Tasikmalaya.....	11
GAMBAR 2.1	Transformasi BPOM sebagai Koordinator Pengawasan Obat dan Makanan	16
GAMBAR 2.2	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Balai Besar POM di Bandung	17
GAMBAR 2.3	Peta Strategi Level II Balai Besar POM di Bandung	18
GAMBAR 3.1	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018 ..	30
GAMBAR 3.2	Profil Realisasi “Indeks Pengawasan Obat dan Makanan” Tahun 2015, Tahun 2016 dan Tahun 2017	32
GAMBAR 3.3	Perbandingan Capaian Tahun 2018 dengan Target Tahun 2018 dan Target Tahun 2019 “Indeks Pengawasan Obat dan Makanan”	33
GAMBAR 3.4	Perbandingan Target dan Capaian BBPOM di Bandung dengan Balai Besar POM Provinsi lain “Indeks Pengawasan Obat dan Makanan”	34
GAMBAR 3.5	Profil Realisasi dan Capaian “Persentase Obat Memenuhi Syarat” Tahun 2015, Tahun 2016, Tahun 2017 dan Tahun 2018.....	36
GAMBAR 3.6	Profil Hasil Pengujian TMS Sampel Obat JKN Tahun 2017 dan Tahun 2018	36
GAMBAR 3.7	Perbandingan Capaian Tahun 2018 Dengan Target Tahun 2019 dan Target Nasional Tahun 2018 dan Tahun 2019 “Persentase Obat yang Memenuhi Syarat”	37
GAMBAR 3.8	Perbandingan Target dan Capaian BBPOM di Bandung dengan Balai Besar POM Provinsi lain “Persentase Obat yang Memenuhi Syarat”	38

**GAMBAR****HALAMAN**

GAMBAR 3.9	Profil Realisasi dan Capaian “Persentase Obat Tradisional Memenuhi Syarat” Tahun 2015, Tahun 2016, Tahun 2017 dan Tahun 2018	40
GAMBAR 3.10	Jumlah Sampel Obat Tradisional yang Tidak Memenuhi Syarat Tahun 2015, Tahun 2016, Tahun 2017 dan Tahun 2018.....	41
GAMBAR 3.11	Perbandingan Realisasi Tahun 2018 Dengan Target Tahun 2019 dan Target Nasional Tahun 2018 dan Tahun 2019 “Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat”	41
GAMBAR 3.12	Perbandingan Target dan Capaian Balai Besar POM di Bandung dengan Balai Besar POM Provinsi lain “Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat”	42
GAMBAR 3.13	Profil Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat Tahun 2015, tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018.....	44
GAMBAR 3.14	Profil Persentasi Sampel Kosmetik yang Tidak Memenuhi Syarat Tahun 2015, Tahun 2016, Tahun 2017 dan Tahun 2018.....	44
GAMBAR 3.15	Perbandingan Realisasi Tahun 2018 Dengan Target Tahun 2019 dan Target Nasional Tahun 2018 dan Tahun 2019 “Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat”	45
GAMBAR 3.16	Perbandingan Target dan Capaian BBPOM di Bandung dengan Balai Besar POM Provinsi lain “Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat”	46
GAMBAR 3.17	Profil Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat Tahun 2015, Tahun 2016, Tahun 2017 dan Tahun 2018.....	48
GAMBAR 3.18	Perbandingan Realisasi Tahun 2018 Dengan Target Tahun 2019 dan Target Nasional Tahun 2018 dan Tahun 2019 “Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat”	48
GAMBAR 3.19	Perbandingan Target dan Capaian Balai Besar POM di Bandung dengan Balai Besar POM lain “Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat”	49
GAMBAR 3.20	Profil Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2015, Tahun 2016, Tahun 2017 dan Tahun 2018.....	50
GAMBAR 3.21	Profil Hasil Pengujian Garam Yang Tidak Memenuhi Syarat Tahun 2015, Tahun 2016, Tahun 2017 dan Tahun 2018.....	51
GAMBAR 3.22	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Dengan Target Tahun 2019 dan Target Nasional Tahun 2018 dan Tahun 2019 “Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat”	51
GAMBAR 3.23	Perbandingan Target dan Capaian Balai Besar POM di Bandung dengan Balai Besar POM lain “Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat”	52
GAMBAR 3.24	Perbandingan Capaian BBPOM di Bandung dengan BBPOM Lain dan Capaian Nasional “Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di Bidang Obat dan Makanan”	57
GAMBAR 3.25	Perbandingan Target dan Capaian “Indeks pengetahuan masyarakat terhadap	



	Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM Bandung”	61
GAMBAR 3.26	Hasil Pengujian sampel sesuai standar tahun 2015, tahun 2016, tahun 2017, dan tahun 2018.....	68
GAMBAR 3.27	Perbandingan Hasil Pengujian sampel sesuai standar tahun 2018 dengan Provinsi lain.....	69
GAMBAR 3.28	Perbandingan Capaian Tahun 2015, Tahun 2016, Tahun 2017, Tahun 2018 dan Tahun 2018 “Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan”	71
GAMBAR 3.29	Perbandingan Capaian Tahun 2018 dan Target Tahun 2018 dan Tahun 2019 “Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan” .	72
GAMBAR 3.30	Perbandingan Capaian Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan antar Balai Besar POM di Bandung dengan Balai Besar POM Provinsi lain	72
GAMBAR 3.31	Profil Jumlah Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan.....	74
GAMBAR 3.32	Profil Jumlah Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat	75
GAMBAR 3.33	Perbandingan Capaian Tahun 2015, Tahun 2016, Tahun 2017, Tahun 2018 dan Target Tahun 2018 “Persentase Sarana Distribusi Obat yang memenuhi ketentuan”	76
GAMBAR 3.34	Perbandingan target dan capaian tahun 2018 dan target tahun 2019 Sarana Distribusi yang Memenuhi Ketentuan.....	76
GAMBAR 3.35	Perbandingan Capaian Persentase Sarana Distribusi Obat yang Memenuhi Ketentuan antar Balai Besar POM di Bandung dengan Balai Besar POM Provinsi lain.....	77
GAMBAR 3.36	Persentasi Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan.....	79
GAMBAR 3.37	Perbandingan Capaian Tahun 2015, Tahun 2016, Tahun 2017, Tahun 2018 dan Target Tahun 2018 “Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu”	80
GAMBAR 3.38	Perbandingan Capaian Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu antar Balai Besar POM di Bandung dengan Balai Besar POM Provinsi lain	81
GAMBAR 3.39	Perbandingan Capaian Tahun 2015, Tahun 2016, Tahun 2017, Tahun 2018 dan Target Tahun 2018 “Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan”	84
GAMBAR 3.40	Perbandingan Capaian Tahun 2018 dan Target Tahun 2018 dan Tahun 2019 “Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan” .	84
GAMBAR 3.41	Perbandingan Capaian Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan antar Balai Besar POM di Bandung dengan Balai Besar POM Provinsi lain	85
GAMBAR 3.42	Perbandingan Capaian Tahun 2015, 2016, 2017, 2018 terhadap Target Tahun 2018 dan 2019 “Persentase Cakupan Pengawasan Sarana Produksi Obat dan Makanan”	89
GAMBAR 3.43	Perbandingan Persentase Perkara yang diselesaikan hingga Tahap II di Wilayah	



	Kerja Balai Besar POM di Bandung dengan Balai Besar POM Lain Tahun 2018 .	94
GAMBAR 3.44	Perbandingan Jumlah Perkara Tahun 2015, Tahun 2016, Tahun 2017, Tahun 2018 dan Target 2019	98
GAMBAR 3.45	Profil Nilai SAKIP Tahun 2014, Tahun 2015, Tahun 2016 dan Tahun 2017	101
GAMBAR 3.46	Perbandingan Nilai SAKIP BBPOM di Bandung dengan BBPOM Lainnya	102
GAMBAR 3.47	Hasil Penilaian AKIP Balai Besar POM di Bandung.....	102
GAMBAR 3.48	Perbandingan Target dan Realisasi Pemenuhan Sarana Prasarana Tahun 2015, Tahun 2016, Tahun 2017, dan Tahun 2018.....	104
GAMBAR 3.49	Perbandingan Serapan Anggaran Tahun 2015, Tahun 2016, Tahun 2017 dan Tahun 2018.....	107